

## Jurnal

# Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi

Program Studi Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Syiah Kuala

Vol. 13, No. 1, Juni 2019

---

### Editor In Chief

Siti Ikramatoun, M.Si

### Managing Editor

Firdaus Mirza Nusuary, MA

### Editorial Board

Bukhari, MHSc. (UNSYIAH), Khairulyadi, MHSc. (UNSYIAH), Prof. Bahrein T. Sugihen. (UNSYIAH), Dr. Nirzalin, M.Si. (UNIMAL), Dr. Mahmudin. (UIN AR-RANIRY), T. Syarifuddin, M.Si. (UNIDA), Drs. Zulfan, M.Si. (UNSYIAH), Suci Fajarni, MA (UIN AR-RANIRY)

### Layouter

Khairul Amin

### Alamat Redaksi

Program Studi Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Syiah Kuala

Jln. Tgk. Tanoh Abee, Darussalam Banda Aceh

Telp. (0651) 7555267, Fax (0651) 7555270

E-mail: [Sosiologi.usk@gmailcom](mailto:Sosiologi.usk@gmailcom)

---

**Jurnal Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi** adalah Jurnal Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala yang memuat berbagai pendekatan yang berlandaskan pada isu sosial kemasyarakatan secara lokal, nasional maupun internasional melalui karya tulis ilmiah. Redaksi juga menerima tulisan seputar dinamika sosial masyarakat baik yang bersifat teoritis, kritis, reflektif, opini dan berbagai ide-ide yang menyangkut dinamika sosial kemasyarakatan. Tulisan minimal 15 halaman A4 Spasi 1, dilengkapi dengan abstrak (bahasa inggris), catatan kaki dan daftar pustaka. Penulis juga harus menyertakan nama lengkap serta asal universitas. Tulisan dikirim ke email: [sosiologiusk@gmail.com](mailto:sosiologiusk@gmail.com).

**Jurnal Sosiologi**  
**Media Pemikiran Dan Aplikasi**  
**Universitas Syiah Kuala**  
Volume 13, Nomor 1, Juni 2019

**DAFTAR ISI**

**Daftar Isi**

**Sensualitas Media Sosial di Era Globalisasi**

*A Zahid* ..... 1

**Evaluasi program CSR PT. Socfindo terhadap  
Kesejahteraan Masyarakat Nagan Raya**

*Baihaqi* ..... 16

**Problematika Perumahan Perkotaan di Kota Yogyakarta**

*Anggalih Bayu Muh. Kamim, Ichlasul Amal,  
M. Rusmul Khandiq* ..... 34

**Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan, Kemitraan, dan  
Penguatan Kelembagaan di Desa Terunyan, Bali**

*Dewa Putu Oka Prasiasa, Dewa Ayu Diyah Sri Widari* ..... 55

**Kearifan Lokal dan Peran Elit Agama dalam Mitigasi  
Bencana di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie**

*Muhammad Sahlan*..... 72

**Kebijakan Pangan dan Tradisi Lokal**

*Abdullah Akhyar Nasution* ..... 76

JURNAL  
SOSIOLOGI USK  
Media Pemikiran & Aplikasi



## SENSUALITAS MEDIA SOSIAL DI ERA GLOBALISASI

Kajian Sosiologi Media Marshall McLuhan sebagai  
Analisis Media Masa Kini

**A Zahid**

Prodi Sosiologi Agama  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
[azahid19@iainkediri.ac.id](mailto:azahid19@iainkediri.ac.id)

### Abstract

Historically, McLuhan stated that electronic dependence in the age of globalization has made humans in a great imagination called "global village". Since the development of electronic mass media technology has spread widely, it has made information resources easily accessible and life's dependence on technology. At present, the development of "global villages" in developed countries is getting worse and ultimately affecting developing countries like Indonesia. Although it provides convenience, it also raises concerns. The development of the social media which should be a source of information and facilitate access to communication instead becomes a place for pornography.

**Keywords:** McLuhan, Social Media, Globalization

### Abstrak

Secara historis, McLuhan menyatakan bahwa ketergantungan elektronik pada zaman globalisasi telah membuat manusia berada dalam sebuah imajinasi besar yang disebut "global village". Sejak perkembangan teknologi media massa elektronik menyebar luas membuat sumber informasi mudah diakses dan ketergantungan hidup pada teknologi. Saat ini, perkembangan "desa global" di negara maju semakin parah dan akhirnya mempengaruhi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Meski memberikan kemudahan, tetapi juga sekaligus menimbulkan kekhawatiran. perkembangan media sosial yang seyogyanya menjadi sumber informasi dan memudahkan akses komunikasi, malah mejadi ajang pornografi.

**Kata Kunci:** *McLuhan, Media Sosial, Globalisasi*

## Pendahuluan

Dewasa ini, perkembangan zaman dapat dikatakan hampir tak terkendali. Berbagai perubahan khususnya dalam bidang teknologi memberikan kemudahan sekaligus kekhawatiran di dalamnya. Kini, dunia serasa berada di dalam genggaman, menjelajahi dunia tidak lagi sesulit dulu sebelum mengalami perkembangan zaman. Di era ini, dunia seolah-olah telah menyediakan rumah baru bagi anak-anak zaman sekarang atau yang sering disebut dengan generasi *millennial*, dan yang baru-baru muncul yaitu generasi *alpha*. Rumah baru tersebut menjanjikan berbagai fasilitas di mana manusia akan mampu mereduksi waktu dan memangkas jarak. Sehingga tak terasa hanya dengan berada di dalam kamar saja dan berbekal *smartphone*, kita sudah bisa mengetahui sebuah informasi, berita, isu, dan pelbagai peristiwa yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri. Bahkan untuk dapat berkenalan dengan orang-orang baru dari berbagai belahan dunia, kita tidak harus bertemu secara langsung dengannya, cukup melalui berbagai aplikasi media sosial yang terpasang dalam *smartphone* saja, di sanalah orang-orang dari berbagai negara berkumpul. Tidak bisa dipungkiri, realitas sosial yang demikian sudah merambat pada anak zaman atau generasi *millennial* yang lahir antara tahun 1977-1994. Generasi ini ditandai dengan perkembangan teknologi, tingkat pendidikan dan pengetahuan lebih maju dari generasi sebelumnya (Sciffman dan Lesslie, 2000). Hal ini pula menjadi bukti dari perkembangan zaman yang disebut globalisasi.

Secara historis, McLuhan (1962) menyatakan bahwa ketergantungan secara elektroni terhadap zaman globalisasi telah melahirkan zaman di mana manusia berada dalam sebuah imajinasi besar yang disebut *global village*. Sejak sekitar tahun 1950-an, perkembangan teknologi khususnya media massa elektronik mulai menyebar luas, seperti media televisi dan radio. Akibat dari kemunculan media massa elektronik ini, menjadikan sumber informasi dapat dengan mudah diakses, salah satunya yaitu perkembangan media terutama di negara maju dengan bukti *oral society*, di mana masyarakat mulai saling menggantungkan

kehidupannya pada teknologi, dan hal itu menghasilkan sebuah dinamika dalam masyarakat yang memandang bahwa media massa merupakan candu.

Inilah yang menjadi dasar bahwa pada zaman tersebut ditandai sebagai masyarakat desa global yang sekaligus juga menjadi sifat dasar sebuah masyarakat desa global (McLuhan 1962, 26). Perkembangan desa global khususnya di masyarakat barat mulai akut, dan semakin hari semakin menjalar hingga akhirnya sampai pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Masyarakat yang notabeneanya terdiri dari masyarakat yang masih tradisional baik cara berfikir maupun gaya hidupnya, mulai bertransformasi menjadi masyarakat “pecandu” media sosial. Sebut saja *facebook*, *twitter*, *whatshhap*, sebagai alat komunikasi yang menyediakan berbagai fitur memberikakan kemudahan, kepraktisan, serta kenyamanan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal, perkembangan zaman atau era globalisasi ini memang memberikan berbagai kemudahan sekaligus kekhawatiran. Berbagai kemudahan yang dihasilkan dari perkembangan zaman menjadi dampak positif, namun kekhawatiran inilah yang akan menjadi dampak negatifnya. Contoh kecilnya saja, media sosial seperi; *Bigo*, *Camfrog*, dan *periscope*<sup>1</sup>. Aplikasi yang menyediakan fitur *live* ini mampu mereduksi konten yang layak untuk dipertontonkan atau tidak, sehingga bagi masyarakat modern, hal ini dapat menjadi sarana untuk mendapatkan totonan bisa berupa semi pornografi secara gratis.

Tayangan yang ditonton oleh penikmat aplikasi ini dapat direkam kembali sebagai konten baru yang nantinya bisa saja di unggah ke *channel* Youtube pribadinya, ataupun media-media pemutar video lainnya. Penyebaran “konten pornografi” hasil rekaman melalui berbagai aplikasi yang menyediakan fitur siaran langsung atau *live* semacam ini, menjadi sulit untuk dicegah karena meskipun terdapat konten yang berbau pornografi, hal itu dapat saja di *banned*.

---

<sup>1</sup>Penulis tidak mengeneralisir bahwa aplikasi ini adalah aplikasi yang menyediakan konten pornografi, tetapi pada kenyataanya tidak sedikit siaran langsung atau *live streaming* yang dihasilkan dari aplikasi tersebut berupa konten pornografi.

Sehingga dengan hanya menghapus konten-konten pornografi di media sosial tersebut, dirasa kurang efektif dan efisien.

Media yang seyogyanya menjadi sumber informasi, memudahkan akses komunikasi malah bertransformasi mejadi ajang pornografi. Hal ini tentu bukan kesalahan aplikasi media, tetapi dengan era global seperti saat ini, media sosial mampu mewadahi dan memanjakan generasi *millennial* yang “kebablasan” dalam menggunakan fitur yang disediakan oleh media tersebut. Dari sinilah peneliti melihat perlunya menggunakan media sosial secara bijak agar tidak terperangkap dalam jeratan pornografi. Selain itu, peran dan tanggung jawab dari produsen media sosial juga sangat diperlukan untuk membatasi konten-konten yang sifatnya mengandung pornografi, sehingga penggunaan media sosial seperti *bigo*, *periscope*, dan *Camforg* dapat menjadi ajang silaturahmi dari berbagai penjuru dunia.

### **Media dan Modernisme**

Perbincangan tentang modernisme tidak akan ada habis-habisnya, walaupun ada istilah post-modernisme yang banyak dikawal oleh Martin Heidegger dan Nietzsche yang didapuk sebagai pengancam garis silsilah post-modernisme masing-masing memaklumkan “kematian tuhan” dan “keberakhiran filsafat.” Mereka para pendukung post-modernisme lekas menyambutnya dengan menabuh genderang kematian dari modernisme, seperti Michel Foucault yang menyatakan “kematian manusia,” Roland Berhtes menyambut dengan “kematian perang,” mereka juga mengobrak-abrik “akhir ideologi,” “akhir representasi,” hasilnya pembahasan post-modern menjadi semacam perayaan yang gegap gempita dan pasar malam tempat segala dijajakan , namun sekaligus menjadi awal berakhirnya modernisme (Vattimo: 1988).

Diskursus lahirnya modernisme meninggalkan warisan berupa perkembangan kemajuan yang belum selesai dipecahkan, sehingga di lanjutkan di era post-modernisme, salah satunya adalah perkembangan media massa. Jika pada awalnya semangat untuk mencapai era modern adalah pencapaian tingkat

sosial yang disebut dengan kemajuan. Maka alat yang digunakan untuk mencapai kemajuan tersebut tidak lain tidak bukan adalah rasionalitas, kemajuan teknologi dan sains (Marcuse, 1964: 123-124). Sehingga post-modernisme lahir dengan wajah baru dari berbagai kompleksitas permasalahan yang ada di era modernisme tersebut.

Permasalahan perkembangan media sosial hingga berindikasi pada masyarakat yang kata Herbert Marcuse sebagai masyarakat *One Dimensional man* dengan ciri perkembangan ilmu pengetahuan, seni, filsafat, pemikiran sehari-hari, sistem politik, ekonomi dan teknologi yang cenderung instan dan cepat membuat manusia modern kehilangan daya dan prinsip kritis. Masyarakat modern baik benda maupun manusia direduksi menjadi sesuatu yang fungsional saja, terlepas dari substansi dan otonomi (Marcuse, 1964). Salah satunya kita bisa lihat dalam penggunaan media sosial.

*Media sosial* adalah media *online* yang mendukung adanya hubungan yang intens antar individu dengan menggunakan teknologi berbasis web yang membuat perubahan komunikasi satu arah menjadi dialog interaktif. Teknologi yang membuatnya dengan mudah untuk berinteraksi berbagi pesan dalam bentuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia *online*, forum-forum maya, termasuk *virtual world*. Media sosial berbasis pada teknologi internet yang membentuk pola komunikasi dan penyebaran informasi dari satu ke banyak *audiens* ataupun lebih dari itu (Paramitha, 2011:42). Sehingga media sosial menjadi hal yang membuat masyarakat cenderung instan dalam kehidupan sehari-hari.

Disisi lain media sosial sebagai media yang menyediakan pengguna merepresentasikan dirinya sebagai wujud yang lain agar terjalin relasi sosial, sosialisasi dan komunikasi dengan pengguna lain dengan bentuk ikatan secara virtual. Adapun fungsi dalam media sosial adalah pengenalan (*cognition*), di mana masyarakat bebas menentukan dengan siapa dia akan menjalin ikatan dan menjalin hubungan, bentuk komunikasi (*communicate*), upaya masyarakat berinteraksi dalam bentuk *virtual reality* di dalam media social, dan terakhir kerjasama (*co-opration*) (Nasrullah, 2015).



Adapun fungsi dari media sosial tersebut pada gilirannya membentuk macam-macam media sosial sebagai berikut (Puntoadi, 2011 : 34):

1. **Bookmarking**, adalah media berbagi alamat website yang memiliki kesamaan dalam minat dan ketertarikan.
2. **Content Sharing**, adalah situs-situs content sharing dimana khalayak menciptakan berbagai media dan akan dipublikasikan kepada orang lain.
3. **Wiki**, adalah media sosial yang sering menyajikan seluruh informasi oleh pengunjung situs itu sendiri dan khalayak dapat melakukan *editing* terhadap informasi itu jika merasa kurang tepat dan lengkap.
4. **Flickr**, adalah situs milik Yahoo sebagai spesialisasi pada *image sharing* dengan kontributor yang ahli dari seluruh dunia di bidang fotografi.
5. **Social network**, adalah aktivitas yang menggunakan berbagai fitur tersedia dalam situs tertentu untuk menjalin hubungan antar sesama.
6. **Creating Opinion**, adalah sosial media untuk berbagi pendapat dengan orang lain di seluruh dunia.

Salah satu yang menarik dari bentuk media sosial adalah social networking, di mana akses yang dibuka secara luas dan masyarakat mampu menjelajahi dunia. Hal inilah yang membuka perbedaan cara pandang dalam melihat realitas yang ada dalam media social, kebudayaan tradisional akan berubah menjadi kebudayaan baru dengan adanya akulturasi budaya yang dihasilkan oleh masyarakat akibat pengaruh dari media sosial.

### Global Village dan Social Network

Perkembangan media massa seperti yang dikatakan McLuhan di tandai dengan adanya *oral society* yang menjadi representasi dari bermulanya masyarakat modern. Dampak yang dihasilkan adalah ketergantungan masyarakat terhadap dunia elektronik, yang disebut sebagai *global village*: “*We live in a single constructed space resonance with tribal drums*” (McLuhan. 1962, 36). Analogi yang digunakan McLuhan dalam menganalisis perkembangan media teknologi akan berimbas pada konsekuensi logis yang akan dihadapi

manusia dalam bentuk interaksi sosial. Walaupun masyarakat global hidup dalam satu rumah dan satu ruangan tetapi kita mampu mencapai tapal batas ujung dunia dengan perkembangan teknologi.

Merambatnya bekembangan media teknologi diikuti oleh penemuan telegram, pesan yang dapat diterima dengan lebih cepat dari pada petugas pos menjadi bukti keberhasilan sekaligus awal baru dari masyarkat global dalam berbagai kerumitannya (McLuhan, 1994). Media komunikasi berupa telegram tidak disia-siakan sebagai alat komunikasi massal negara-negara maju dan berkembang, sehingga media berupa pesan cepat ini menjadi massal di dimasyarakat. Tetapi, masifnya media pesan ini tidak berimbas pada berkurangnya komoditas kertas sebagaimana uang tidak terkait lagi dengan logam dan berakhir menjadi kertas (McLuhan 1994). Perkembangan ini berimbas pada evolusi kebudayaan yang maju dibanding dengan masyarakat sebelumnya sehingga modernisme dalam tahap media komunikasi dianggap sebagai budaya tertinggi.

Evolusi kebudyayan masyarakat dengan kehadiran media komunikasi berbasis *social network* menjadi fasilitas dalam evolusi peradaban manusia, disitegrasi menjadi indikasi nyata dalam dunia nyata sehingga sosialisasi dan interaksi *face to face* mulai ditinggalkan. Dengan demikian muara dari perkembangan evolusi masyarakat dimulai dari poros ekonomi, sosial-kultural, dan politik, sehingga proses pertumbuhan dunia *global village* menjadi imajinasi nyata dari masyarakat modernisme yang semakin cepat (*speed up*). Fenomena ini mendorong kodefikasi kekuasaan antara daerah pusat dan daerah pinggiran (McLuhan, 1964).

Perkembangan teknologi semakin massif sehingga berimbas pada tatanan sosial, baik dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan, karena mereka yakin dengan independensi masing-masing mampu melaksanakan apa yang dibutuhkan dari tempat-tempat mereka. Maka, lahirlah monopoli kekuasaan dan hegemoni terhadap daerah-daerah yang marginal. Konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi atau *social networking* melahirkan konsep *de-westernisasi* (akulturasi budaya barat dengan budaya lain) yang menimpa

orang-orang barat sehingga menyebar terhadap negara di timur, maka terjadilah *de-tribalisasi* (berubahnya nilai-nilai budaya lokal ke modern) (McLuhan, 1994). Inilah yang nantinya terjadi pada dunia ketiga saat melesatnya dunia teknologi, salah satunya berdampak pada Indonesia.

Pada awalnya, orang-orang barat mempelajari dan mengadopsi nilai-nilai maupun norma dari dunia timur, dan sebaliknya orang-orang barat yang belajar di dunia timur tidak sedikit akan diadopsi oleh orang-orang timur sebagai sesuatu hal yang baru dan dianggapnya sebuah “kemajuan” atau “modern.” Ketika hal ini terjadi maka *finishingnya* adalah proses sosial dan kegiatan-kegiatan spesialisasi serta pemisahan (*specialization and separation*) yang merupakan sifat dasar terbentuknya masyarakat modern yakni pembagian masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang bersifat spesifik (*social differentiation*) seperti digambarkan oleh Durkheim (Parson, 1967).

Realitas demikian yang perlu diantisipasi oleh negara ketiga seperti Indonesia. Karena dengan banyaknya suku, bahasa, ras, dan kebudayaan akan menjadi salah satu objek *de-westernisasi*, salah satunya bisa dilihat dari dunia *fashion*, dan cara penggunaan media sosial atau media massa. Sebagaimana yang semestinya tidak ada kebudayaan atau budaya yang stagnan tanpa adanya habitus baru dari arena yang telah disinggahi.

### **Global Village dan Globalisasi**

Perlu digaris bawahi *global village* dan globalisasi mempunyai garis demarkasi. Seperti Walkasz dkk (2008) yang memperhatikan pembahasan rigid keduanya. Menurut mereka, *global village* merupakan metafor yang digunakan untuk menggambarkan dunia yang terhubung secara elektronik dan bersifat kompleks sebagaimana prediksi McLuhan. Konsep ini dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk membantu kita dalam melakukan analisa hubungan kita (masyarakat) dengan media pada masa kini dan menyiapkan masa depan. Globalisasi terhadap media, yang ditandai oleh internasionalisasi program-program TV, akses internet yang meluas, teknologi telepon genggam telah menghubungkan dunia.

Sedangkan posisi globalisasi adalah fenomena yang melibatkan proses sosial berupa integrasi ekonomi, budaya, kebijakan negara dan perkara politik di seluruh dunia. Globalisasi merupakan proses perpindahan orang, komoditas, kapital, pengetahuan, pemikiran, informasi dari suatu negara ke negara lain (Appadurai 2005). Artinya, dua poros ini, *global village* dan globalisasi merupakan dua hal yang saling terintegrasi dalam perubahan masyarakat dalam ruang kecil dan perubahan secara mendunia dalam ruang yang lebih universal. Adapun definisi yang akurat dalam mendefinisikan globalisasi seperti yang ditegaskan oleh Held dan McGrew (2004: 4).

“The expanding scale, growing magnitude, speeding up and deepening impact of interregional flows and patterns of social interaction. It refers to a shift or transformation in the scale of human social organization that links distant communities and expands the reach of power relations across the world’s major regions and continents.”

Rancangan globalisasi sebenarnya sudah dirancang sejak abad ke-19 atau awal ke-20, asumsi ini bisa dilihat dari banyak karya yang membahas modernitas seperti, Saint Simon, Karl Marx hingga yang relatif lebih kontemporer seperti MacKinder. Namun demikian, sebagai sebuah konsep akademis yang lebih utuh, globalisasi baru benar-benar disebutkan secara gamblang dan digunakan oleh para akademisi untuk memotret fenomena dunia kekinian pada paruh kedua abad ke-20, tepatnya sekitar dekade 1960-an sampai 1970-an (Held dan McGrew, 2004). Hingga modernisme menjadi sebuah kebaruan dari zaman yang sebelumnya, dan tentunya dengan berbagai konsekuensi di dalamnya.

Pergulatan secara akademis hingga pada banyaknya ilmuwan besar menuliskan globalisasi maka pada awal abad ke-21 globalisasi bisa dilihat dalam sebuah konsep yang merujuk pada kondisi: (1) *action at a distance*, (2) *time- space compression*, (3) *accelerating interdependence*, (4) *a shrinking world*, (5) *global integration*, (6) *the reordering of interregional power relations*, (7) *consciousness of the global condition* dan (8) *intensification of interregional interconnectedness* (Held dan McGrew, 2004: 3).

Secara esensial, globalisasi bukanlah sesuatu yang *finish* diperbincangkan, secara makan banyak perdebatan. Karena mereka mnyadari bahwa esensi dari istilah globalisasi cukup rumit untuk didefinisiakan sesederhana, -sebagai sebuah kemajuan dari bidang ekonomi, politik dan budaya- istilah globalisasi perlu pemahaman yang jauh bukan hanya sekedar sebagai kemajuan dalam tahapan tersebut. Pemikir seperti held dan McGrew (2004) meyakini secara skeptis tentang globalisasi yang hanya sebatas kemajuan. Hal senada hampir sama dengan pemahaman konsep McLuhan dengan *global village*-nya. Studi Wlakas dkk (2008) menunjukkan bahwa fenomena *global village* bersifat lokal dan perubahan fenomena budaya pun bersifat lokal sehingga berevolusi menjadi global.

Dalam konteks lain, *Global village* sering dinegasikan dengan wacana tandingan yaitu *local village*. Di mana garis demarkasi keduanya terletak pada pusat kontrol dan perkembangan teknologi, sehingga orang dewasa mampu mengontrol gaya hidup, nilai-nilai, dan pandangan dari kaum setelahnya. Berbeda dengan *local village* di mana desa lokal sudah mampu menyaring nilai, norma dan pandangan hidup penghuninya dengan kesepakatan dari masyarakat desa setempat. Perkembangan globalisasi berdampak pada prediski McLuhan, di mana anggota dari desa besar tidak bersifat terhubung secara homogen, tetapi lebih menyerupai lingkungan yang bersifat kompleks pada hubungan politik, ekonomi, dan sosial (Hobbes, 2007; Krandy, 1999).

### **Media Sosial dan Sensualitas**

Tak akan ada habisnya ketika kita memangkak persoalan media sosial, baik dari sejarah lahirnya sampai pada indikasi logis dan konsekuensi yang dihadapi saat ini. Pembahasan tentang media sosial selalu menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi dari berbagai pendekatan keilmuan, karena dalam media sosial mampu menampung segala hal yang sifatnya virtual sehingga sangat mudah untuk diakses siapapun. Media sosial seperti pisau bermata dua, yang mempunyai sisi tajam serta mampu berfungsi secara bersamaan, itulah kehebatan media sosial.

Salah satu yang sangat nyata-mungkin sudah hampir berubah- program TV, khususnya di Indonesia. Lebih banyak menampilkan konten yang sifatnya musiman serta hiburan, dari hiburan yang dikemas dengan berbagai aksi lawakan, sampai pada sensualitas, kasus yang mungkin bagi kaum awam adalah tabu. Seperti yang baru-baru ini masyarakat atau netizen diviralkan dengan harga “apem 80 juta.” Media sensualitas mampu membuat kerangka untuk menganalisis cara-cara di mana actor-aktor sosial mengkonstruksi makna, identitas, dan bentuk bentuk kelembagaan di dalam konteks sosiologis globalisasi (Guilanotti dan Robertson, 2006).

Komersialisasi media sosial tidak hanya berimbas pada rating TV, tetapi juga Youtube yang sekarang marak digandrungi oleh kalangan muda-mudi yang dapat menghasilkan materi. Komersialisasi media menjadi akumulasi produksi materi yang sangat menjanjikan di era globalisasi, tidak sedikit bahkan ketika kita singgah di aplikasi Youtube-seakan-akan aplikasi ini sudah menggeser fungsi TV- sehingga masyarakat banyak tergantung pada kuota internet. Komersialisasi tidak hanya masuk dalam sektor materi saja, tetapi pada tatanan nilai dan norma kehidupan masyarakat global.

Konten pornografi semakin marak, tinggal kita klik kata yang kita inginkan semua akan menyediakan dan dipertontonkan secara gratis- tentunya dengan sambungan internet- konten yang biasanya dijajakan dan diunggah ke Youtube seperti, *Bigo Live*, *CamForg*, dan *Periscope*. Aplikasi yang menawarkan fitur *video call* dan *live* ini bukan lagi sebagai edukasi positif. Karena budaya Indonesia dengan budaya barat akan berbeda, seperti contoh dalam hal pakaian. *Bikini* salah satunya sangat lah tabu dipertontonkan secara sengaja bahkan mereka rela bertukar *symbol* agar mendapatkan *give* yang bisa menghasilkan uang.

Badan tidak lagi menjadi hal yang secara alamiah dinikmati diri sendiri, tetapi menjadi penghasil materi dan wacana dalam realitas sosial yang nyata dalam virtualisasi media sosial. Bukan hanya dalam konten pornografi, yang ekstrim lagi media sosial menjadi sarang politisi sebagai agenda kampanye seperti *Facebook* dan *Twitter*. Bahkan saling menghujat, saling sindir menjadi

arena bebas dalam media sosial. Maka sudah bisa kita lihat fungsi media sosial adalah: 1) alat yang efektif untuk kampanye politik saat ini dan masa depan, 2) menggapai pemilih dan pendukung langsung, 3) yang digunakan oleh partai-partai politik untuk menunjukkan logo/icon mereka, dan 4) hasil hitung cepat juga menunjukkan bahwa partai-partai politik yang menggunakan media sosial sebagai bagian dari kampanye mereka memenangkan pemilu legislatif (Abdillah, 2014).

Para pengguna media sosial termasuk para politisi mampu memproduksi pesan yang melahirkan beribu bahkan berjuta interpretasi dari para pembacanya. Tanpa adanya pentas dalam media sosial ditambah dengan kemajuan teknologi informasi menjadi penyambung lidah para politisi dalam membangun *image* (citra) politik masing-masing guna meraup suara dari masyarakat. *Political branding* adalah penggunaan cara strategis *consumer branding* untuk membangun citra politik. Menurut Sandra (2013), inilah yang menjadi strategi polarisasi politik di media sosial saat ini, sehingga semua media sosial seakan-akan sudah direduksi oleh politik.

Dilansir dari detik.com, hasil penelitian dari *We Are Social* bekerjasama dengan *Hootsuite*, menyebutkan bahwa ada 130 juta orang Indonesia terbilang aktif di media sosial. Dari hasil laporan *We Are Social* bahwa total populasi Indonesia mencapai 265,4 juta dan pengguna internetnya setengah dari populasi yakni sebesar 132,7 juta. Adapun *platform* media sosial yang paling digandrungi adalah Youtube 43%, Facebook 41%, Line 33%, BBM 28%, Twitter 27%, Google+ 25%, FB Messenger 24%, LinkedIn 16%, skype 15 % dan WeChat 14%. (*Essential Insight Into Internet, Social Media, Mobile, and ecommerce Use Around the World*, 2018).

## Penutup

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah mengakibatkan pergeseran budaya di Indonesia. Meskipun tidak seluruhnya, namun hal itu cukup mempengaruhi paradigma maupun gaya hidup masyarakat. Menjamurnya berbagai macam aplikasi media sosial semakin memanjakan

generasi *millennial*. Namun sayangnya, kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh media sosial terkadang disalahgunakan oleh orang-orang yang hanya berorientasi pada keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang akan timbul.

Media sosial saat ini tidak lagi berada pada fungsi awalnya sebagai sarana penyampai informasi, kemudahan berkomunikasi dan berinteraksi. Kini media sosial lebih menjadi sebuah sarana politisasi dan pornografi. Dalam hal ini sangat diperlukan peran penting perusahaan-perusahaan penyedia layanan internet dan media sosial tersebut sebagai produsen untuk dapat memberikan layanan atau aplikasi-aplikasi yang bermanfaat dan mengedukasi masyarakat. Selain itu, partisipasi pemerintah juga sangat diperlukan untuk memberikan pembatasan dan pengawasan melalui regulasi yang jelas dan tegas tanpa mematikan kreatifitas anak bangsa, dan yang terpenting yaitu kesadaran diri dan kontrol dari masing-masing pengguna atau konsumen aplikasi media sosial tersebut, agar apa yang menjadi tujuan dan fungsi utama dikembangkannya teknologi berupa media sosial dapat digunakan dan dinikmati secara bijak dan cerdas.



### Daftar Pustaka

- Appadurai, Arjun. 2005. *Modernity at Large: Culture Dimension of Globalization*. London: University of Minnesota Press
- Abdillah, Leon Andretti. "Social Media as Political Party Campaign in Indonesia". *Jurnal Ilmiah MATRIK*, 16(1)
- Gianni Vattimo. 1988. *The end Modernity Nihilism and Hermnerutics in Post-Modern Culture*. Cambridge: Polity Press
- Herbert Marcuse. 1964. *One Dimensional Man; Studies of Advanced Industrial Society*. London: Routledge and Kegan Paul Ltd
- Husain, Chaidar. 2014. "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran di SMA Muhammadiyah Tarakan Husain". *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 2(2): 184-192
- McLuhan, Marshall. 1962. *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*. Toronto: University of Toronto Press
- McLuhan, Marshall. 1994. *Understanding Media: The Extensions of Man*. Canada: MIT press
- Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Paramitha, Cindy Rizal Putri. 2011. *Analisis Faktor Pengaruh Promosi Berbasis Sosial Media Terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan dalam Bidang Kuliner*. Thesis: Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogor
- Puntoadi, Danis. 2011. *Meningkatkan Penjualan Melalui Social Media*. Jakarta: Gramedia
- Schiffman, Lean, Leslie Lazar Kanuk. 2000. *Consumer Behavior*. New Jersey: Patience Hall International, Inc
- Sandra, Lidya Joyce. 2013. "Political Branding Jokowi Selama Masa Kampanye Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2012 di Media Sosial Twitter". *Jurnal Komunikasi*, 1(2)

## EVALUASI PROGRAM CSR PT. SOCFINDO TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NAGAN RAYA

**Baihaqi**

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng, Meulaboh  
*boy.dedek@gmail.com*

### **Abstract**

This article aims to investigate the contribution and impact of PT. Socfindo to the society around the company and to show the response of the society toward existing of PT. Socfindo. The research method used in this article is a qualitative approach. The theory used is the community empowerment theory. The results show that CSR program that is running still in a stage like charity, philanthropy dan infrastructure development. CSR nowadays did not exist yet an aspect of human resources development or community capability development. The existing of the company has an impact on society, that is a social conflict between society and company. Also, it has an impact on the living environment, like air pollution, waste leak, and dust. The economic impact has not been seen significantly. The company has not up to economic empowerment program. Society response to the company shows the distrust or skepticism caused by many dynamics.

**Keywords:** CSR, Community Empowerment, Community Welfare

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji tentang bagaimana kontribusi dan dampak PT. Socfindo terhadap masyarakat sekitar perusahaan dan bagaimana respon masyarakat terhadap kehadiran PT. Socfindo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR yang dijalankan masih pada tahap-tahap program yang bersifat *charity, phylantrophy* dan pembangunan infrastruktur, CSR saat ini belum menyentuh pada aspek peningkatan sumberdaya manusia atau peningkatan kapasitas masyarakat. Kehadiran perusahaan berdampak pada sosial, yaitu konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan, dampak lainnya berupa dampak terhadap lingkungan hidup, polusi udara, kebocoran limbah, debu. Dampak ekonomi belum terlihat secara signifikan, perusahaan belum sampai pada program pemberdayaan ekonomi. Respon masyarakat terhadap perusahaan menunjukkan ketidakpercayaan yang disebabkan oleh banyaknya dinamika.

**Kata Kunci:** CSR, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat

## Pendahuluan

Artikel ini mengkaji tentang bagaimana kontribusi dan dampak kehadiran PT. Socfindo terhadap masyarakat sekitar perusahaan dan bagaimana respon masyarakat terhadap PT. Socfindo. Kajian ini menjadi penting dalam ranah kajian akademik sebagai bentuk evaluasi terhadap PT. Socfindo yang telah beroperasi sejak lama di lingkungan masyarakat kabupaten Nagan Raya. Kehadiran perusahaan sejatinya tidak sekedar memperoleh keuntungan dari eksplorasi yang dilakukan, tetapi juga memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Kajian ini akan bermanfaat bagi PT. Socfindo sebagai bahan evaluasi internal perusahaan dan juga bermanfaat bagi pemerintah setempat agar lebih serius merespon isu-isu CSR.

Penelitian tentang CSR di Indonesia saat ini bukanlah isu baru, penelitian ini terus dilakukan, penelitian CSR saat ini berkisar tentang pentingnya pelaksanaan CSR (Wulandari, 2012), (Ernawan, 2014), (Rahmadani, Raharjo, & Resnawati, 2018), implementasi program CSR atau evaluasi program CSR (Partini, 2013), (Muhammad, Raharjo, & Resnawaty, 2018), keberhasilan perusahaan dalam membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar (Hayati & Suparjan, 2017), (Nurbaety, Ratnasih, & Ramdan, 2015) dan juga seiring terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar perusahaan, termasuk informasi yang penulis dapatkan sebelumnya di Kabupaten Nagan Raya, adanya ketidakharmonisan antara PT. Socfindo dengan masyarakat sekitar. Ketidakharmonisan ini merupakan konflik laten yang sewaktu-waktu dapat menjadi konflik terbuka yang dapat merusak keharmonisan antara masyarakat setempat dengan PT. Socfindo. Kajian tentang CSR PT. Socfindo di Nagan Raya bermanfaat selain sebagai evaluasi juga bermanfaat untuk membendung konflik laten yang akan menjadi konflik terbuka yang tidak dapat di duga.

Pada aspek kebijakan, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang dinamakan dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap masyarakat sekitar, dimana perusahaan itu berada dan beroperasi. Perusahaan tidak hanya

mengambil manfaat dari daerah dimana ia beroperasi, namun harus mampu menjawab persoalan-persoalan daerah, program-program mereka yang kemudian dinamakan dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Program-program CSR diharapkan dapat diwujudkan di daerah melalui program-program yang terencana dan terukur tanpa menjadikan masyarakat untuk ketergantungan (S & Raharjo, 2014). Berangkat dari studi-studi literatur yang penulis telusuri, kajian tentang CSR PT. Socfindo di Nagan Raya sejauh ini belum penulis temukan, atas dasar itu, maka kajian CSR PT. Socfindo menjadi penting untuk dilakukan.

CSR ini telah diperkuat dengan berbagai regulasi pemerintah sejak tahun 2001. Pelaksanaan CSR memiliki dasar hukum yang kuat yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, salah satunya kewajiban perusahaan yakni melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kemudian disebut dengan istilah CSR. Untuk lebih menguatkan pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

Beberapa daerah telah berhasil melaksanakan program CSR-nya, salah satunya keberhasilan dapat diamati pada PT. Semen Gresik dalam memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan dengan membangun kemitraan sebagai sebuah strategi. Perusahaan ini mampu dan berhasil membangun kemitraan bersama dengan Koalisi Perempuan Ronggolawe untuk peningkatan kapasitas perempuan dalam membatik dan mentransfer pengetahuan tentang motif-motif batik sekaligus mendapatkan bantuan berupa peralatan untuk membatik. (Hayati & Suparjan, 2017). Dari tulisan ini penulis ingin menyampaikan bahwa perusahaan yang hadir ditengah-tengah masyarakat saat ini pada dasarnya mampu untuk melakukan berbagai transformasi sosial masyarakat menuju kondisi yang diharapkan yaitu kesejahteraan.

Melihat Aceh, sebagai perbandingan saja, penulis telah melakukan observasi beberapa program yang dijalankan dan membaca beberapa sumber bacaan bahwa PT. Mifa bersaudara saat ini telah melaksanakan program CSR di

wilayah Barsela khususnya di Aceh Barat. Program-programnya mengarah pada pemberdayaan masyarakat desa dan fokus pada desa yang berada di sekitar tambang. Saat ini PT. Mifa Bersaudara membina delapan gampong, yaitu: Paya Baro, Pucuk Reudeup, Reudeup, Balee, Sumber Batu, Bukit Jaya, Buloh, Peunaga Cut Ujong. Selain itu PT. Mifa Bersaudara memiliki visi dan misi dan juga motto "*menambang dengan kepedulian alam*". Terkait dengan program CSR, mereka juga memiliki tujuh pilar utama CSR yaitu: peningkatan kesehatan masyarakat, partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan melestarikan seni budaya daerah, pendidikan dan pelatihan, pengembangan sarana desa, pengelolaan sumberdaya berbasis lahan, kemitraan UMKM dan kewirausahaan, pelestarian lingkungan hidup dan konservasi keanekaragaman sumberdaya hayati (Safrizal, 2016).

Pada beberapa daerah justru kehadiran perusahaan memunculkan konflik dan dinamika sosial antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, kesenjangan dan ketimpangan terjadi, apakah persoalan lahan (konflik lahan), persoalan tidak diutamakannya putra daerah untuk bekerja di perusahaan, pengelolaan limbah perusahaan yang tidak tepat sehingga memberikan dampak bagi masyarakat. Jika persoalan ini muncul berarti akan memunculkan ketimpangan dan kesenjangan antara perusahaan dengan masyarakat. Kesejahteraan hanya menjadi mimpi yang tidak pernah terwujud. Masyarakat belum tentu dapat merasakan manfaat dari hadirnya perusahaan didaerahnya.

Lalu bagaimana dengan PT. Socfindo yang bergerak dibidang perkebunan dan terletak di Kabupaten Nagan Raya, bagaimana tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap masyarakat sekitar, apa tanggung jawab PT. Socfindo terhadap masyarakat Nagan Raya khususnya masyarakat sekitar perusahaan. Observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan ketimpangan dan kesenjangan kesejahteraan antara PT. Socfindo dengan masyarakat sekitar perusahaan.

Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara sebagai informasi awal tentang bagaimana pendapat masyarakat pasca hadirnya PT. Socfindo di Nagan Raya, kami mencoba mewawancarai masyarakat sekitar perusahaan.

Wawancara awal yang kami lakukan dengan beberapa informan yang berada digampong sekitar perusahaan menunjukkan bahwa, kehadiran perusahaan belum merasakan dampak yang baik terhadap kehidupan masyarakat sekitar. (Sudirman, Herman dan Usman, wawancara, tanggal 3 Mei 2018).

Pada tataran normatif, masyarakat memiliki harapan yang besar ketika hadir perusahaan di daerahnya, harapannya adalah menjadi daerah yang maju dan sejahtera, apalagi didukung oleh pemerintah dalam berbagai regulasi dengan tujuan agar persoalan kemiskinan dapat tertanggulangi. Pada beberapa daerah justru berbagai dinamika terus hadir, ketika perusahaan ada dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat, sekalipun regulasi pemerintah tentang tanggung jawab sosial perusahaan telah ditetapkan.

Berangkat dari latar belakang diatas, perlu pengkajian lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial PT. Socfindo sebagai sebuah perusahaan yang besar terhadap masyarakat sekitar. Peneliti merumuskan pertanyaan penelitian bagaimana tanggung jawab perusahaan PT. Socfindo di wilayah Barsela khususnya di Kabupaten Nagan Raya, apa dampak dan kontribusinya terhadap masyarakat dalam perspektif masyarakat sekitar?

Untuk menjawab pertanyaan besar tersebut, penulis menggunakan persepektif teori-teori pemberdayaan masyarakat. Kemudian penulis melihat bagaimana proses yang dilakukan oleh perusahaan PT. Socfindo, apa saja yang dilakukan oleh perusahaan PT. Socfindo dalam mengembangkan CSRnya. Pada studi ini penulis menganalisis berdasarkan temuan-temuan lapangan dalam perspektif masyarakat sekitar perusahaan.

### **Metode Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Nagan Raya, fokus pada masyarakat yang tinggal dan menetap di sekitar perusahaan PT. Socfindo. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara secara mendalam (Sugiyono, 2010). Adapun informan dalam penelitian ini adalah

tokoh-tokoh masyarakat setempat dan warga masyarakat yang dianggap mampu memberikan informasi seputar topik penelitian ini. Penelitian ini tidak menetapkan jumlah informan, namun informan disesuaikan dengan kebutuhan data, jika data telah terpenuhi dan jenuh, maka pencarian informan akan dihentikan, informan yang diwawancarai secara mendalam dalam penelitian ini berjumlah 19 (sembilan belas) orang. Data yang didapatkan dari lapangan berupa hasil wawancara kemudian diketik ulang, selanjutnya dilakukan pemilahan data sesuai kebutuhan untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan.

## **Pembahasan**

### **Kontribusi PT. Socfindo dalam Persepsi Masyarakat Sekitar Perusahaan**

PT. Socfindo merupakan salah satu perusahaan yang besar di Indonesia dan telah beroperasi dalam jangka waktu yang sangat lama, semenjak Indonesia belum merdeka, pasca kemerdekaan, orde lama, orde baru dan sampai pada pasca reformasi saat ini. Kehadiran perusahaan PT. Socfindo ini telah memberikan dampak terhadap masyarakat yang tinggal dan hidup disekitar perusahaan. PT. Socfindo di Indonesia saat ini telah mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam untuk perkebunan sawit dan begitu banyak hasil yang telah didapatkan dari bumi Indonesia.

Tanggungjawab sosial yang lebih dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Saat ini PT. Socfindo yang berada di Kabupaten Nagan Raya, dikelilingi oleh beberapa gampong, yaitu Padang Panyang, Purwosari, Purworejo, Jati Rejo dan Arongan. Gampong-gampong ini tentu saja menaruh harapan yang besar terhadap perusahaan PT. Socfindo yang bergerak dibidang perkebunan sawit. Harapan yang diinginkan adalah terwujudnya kemandirian masyarakat sekaligus kemiskinan dapat ditanggulangi.

Untuk menanggulangi kemiskinan dan terciptanya kemandirian masyarakat tentu saja harus diprogramkan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Begitu banyak persoalan yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat di era modern saat ini, baik dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan agama, begitu juga yang dialami oleh masyarakat yang hidup disekitar perusahaan PT. Socfindo di Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena demikian, pemberdayaan masyarakat melalui program CSR penting untuk dilaksanakan dengan strategi membangun kemitraan dengan gampong sekitar perusahaan.

Beberapa informan yang penulis wawancara menginformasikan bahwa ada banyak bantuan yang diberikan oleh perusahaan PT. Socfindo, misalnya bantuan berupa material untuk pembangunan mesjid, bantuan untuk sarana olahraga masyarakat yaitu *volly ball*, pembangunan jalan gampong kembali yang telah rusak karena lalu-lalang truk pengangkut sawit, bantuan untuk kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan, misalnya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga kegiatan MTQ yang diadakan beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Nagan Raya. Bantuan-bantuan yang diberikan dapat berupa uang untuk acara-acara keagamaan dan juga dapat berupa barang atau material untuk pembangunan sarana dan prasarana.

Mawardi salah seorang kepala desa (Keuchik) yang tinggal dan menetap disekitar perusahaan PT. Socfindo dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:

*“Banyak bantuan yang kita terima dari PT. Socfindo, misalnya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial dan juga bantuan material untuk pembangunan mesjid”* (Mawardi, wawancara, 3 Juli 2018)

Hasil wawancara dengan informan, proses bantuan sosial yang diberikan oleh PT. Socfindo saat ini, bantuan akan diberikan jika masyarakat meminta melalui surat permohonan resmi dari gampong dengan menginformasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, tetapi jika tidak melalui proses permohonan resmi dari gampong bantuan sosial tidak diberikan. Bantuan sosial yang diberikan terkadang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bantuan-bantuan yang diberikan relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan perusahaan yang begitu besar dengan capaian keuntungan perusahaan yang besar pula. Bantuan-bantuan itu tidak sebanding dengan eksploitasi dan



eksplorasi kebun sawit yang dilakukan oleh PT. Socfindo, bantuan-bantuan tidak sebanding dengan pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari limbah pengolahan sawit, bantuan-bantuan tidak sebanding dengan polusi udara pabrik yang telah mempengaruhi kesehatan warga masyarakat. Bantuan-bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tanaman sawit.

Informasi ini diungkapkan oleh informan kami yaitu Herman salah satu warga masyarakat, berikut petikan wawancaranya:

*"Proses untuk mendapatkan bantuan itu, harus kita surati terlebih dahulu perusahaannya, jika tidak disurati maka bantuan tidak diberikan, padahal gampong kita sudah pernah membuat perjanjian atau MoU"* (Herman, wawancara, 5 Juli 2018).

Hal senada juga diungkapkan oleh Usman salah satu warga masyarakat, beliau menyampaikan tentang pencemaran lingkungan, berikut petikan wawancaranya:

*"Limbah dari perusahaan dapat berdampak terhadap lingkungan sekitar, kemudian asap dan debu juga, kami berharap ini penting untuk diperhatikan kembali terhadap kelestarian lingkungan"* (Usman, wawancara, 6 Juli 2018).

Berikutnya Mawardi yaitu *keuchik* atau kepala desa setempat juga mengungkapkan:

*"Bantuan-bantuan yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan perusahaan yang besar dan dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat"* (Mawardi, wawancara, 8 Juli 2018).

Bantuan-bantuan selama ini merupakan bantuan yang bermanfaat, namun masih bersifat pada *philantrophy* dan *charity*. Bantuan-bantuan ini tentu saja sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal dan menetap di sekitar perusahaan. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, penulis menilai bantuan-bantuan dari PT. Socfindo masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial. Penulis menilai perusahaan saat ini melalui CSRnya belum menyentuh pada aspek bagaimana mengembangkan potensi sumberdaya manusianya agar menjadi lebih mandiri, misalnya bantuan untuk

pembangunan mesjid sebagai tempat ibadah tetap dilakukan, tetapi bagaimana untuk pembangunan untuk sumberdaya manusianya juga harus diperhatikan, agar menjadi masyarakat yang bermanfaat bagi sesamanya. Hal ini pernah dilakukan oleh PT.Semen Gresik Pabrik Tuban yang telah penulis jelaskan diatas. Pihak perusahaan tidak hanya memberikan peralatan untuk membuat tetapi juga meningkatkan kapasitas perempuannya dengan melatih mereka untuk dapat membuat.

Hal ini diungkapkan oleh informan kami Saifullah warga masyarakat setempat, beliau mengungkapkan:

*“Program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat saat ini belum ada, kami berharap kedepan ada program-program pemberdayaan masyarakat, karena digampong saat ini banyak pemuda-pemuda yang menganggur”* (Saifullah, wawancara, 4 Juli 2018).

Harapannya dari masyarakat setempat yang telah kami wawancarai, mereka menyampaikan bantuan yang diberikan tidak lagi pada pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial semata, namun berkembang pada bantuan yang mendidik dan membantu masyarakat untuk menjadi lebih mandiri, idealnya perusahaan yang berada dilingkungan masyarakat dapat berkontribusi lebih besar bagi masyarakat sekitar dengan berbagai program melalui CSRnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Jika merujuk pada beberapa teori-teori pemberdayaan masyarakat, salah satu strategi untuk memandirikan masyarakat adalah melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, melatih dan mendidik masyarakat untuk dapat menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

Nilai-nilai kemandirian itu juga dapat dibaca jika masyarakat telah mampu menciptakan lapangan kerja, memiliki industri-industri rumahan (*home industry*) yang dapat dipasarkan sesuai dengan kebutuhan pasar selama ini. Masyarakat harus kreatif dan inovatif, potensi ini harus terus digali, karena pada dasarnya masyarakat memiliki potensi sumberdaya yang baik dan berkualitas, tetapi perlu pendampingan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya agar potensi ini dapat digali dan muncul.

Selain potensi secara personal, potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh gampong juga begitu banyak yang dapat diolah dan diproduksi untuk keberlangsungan kehidupan sosial-masyarakat, hanya saja terkadang masyarakat belum mampu membaca potensi sumberdaya alam yang mereka miliki. Saat ini mungkin saja masyarakat gampong mampu menghasilkan bahan baku yang kemudian dipasarkan, namun masyarakat belum kreatif dan inovatif untuk mengolah bahan baku yang ada dan kemudian dapat dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi pula dan menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Potensi-potensi ini seharusnya dibaca oleh perusahaan untuk dididik dan dilatih agar masyarakat memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas dan mandiri tanpa berharap pada orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan hasil penelitian yang telah dianalisis, menunjukkan bahwa perusahaan saat ini belum menjalankan CSR dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. CSR yang dilaksanakan PT. Socfindo saat ini masih pada tahap bantuan yang bersifat sementara *charity* dan *phylantrophy*.

Berikut ini kutipan wawancara dengan Masni warga masyarakat sekitar perusahaan:

*“Bantuan-bantuan yang diberikan ada, tapi saat ini belum ada program-program yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk masyarakat sekitar”* (Masni, wawancara, 13 Juli 2018).

Persoalan lingkungan sosial sekitar perusahaan memang bukan tanggungjawab sepenuhnya, namun seharusnya perusahaan harus mampu memberikan kontribusi yang bernilai untuk masyarakat sekitar perusahaan. Eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya alam berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar perusahaan, dampak eksploitasi dan eksplorasi ini seharusnya memberikan dasar bagi pemilik perusahaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dengan menerapkan berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui program CSR yang telah diatur dalam regulasi.

## Dampak Kehadiran Perusahaan PT. Socfindo dalam Persepsi Masyarakat

Kehadiran perusahaan tentunya diikuti oleh berbagai dampak, dampak itu dapat berupa dampak sosial, dampak ekonomi, maupun dampak lingkungan. Salah satu dampak sosial adalah konflik antara masyarakat dengan perusahaan, konflik ini dapat dipicu oleh ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar perusahaan, ketimpangan dan kesenjangan itu dapat berupa penerimaan tenaga kerja yang belum seimbang atau belum mengutamakan masyarakat sekitar perusahaan.

Persoalan itu pernah terjadi di Kabupaten Nagan Raya, khususnya masyarakat yang ditinggal dan menetap disekitar perusahaan PT. Socfindo. Beberapa informan menginformasikan bahwa selama ini penerimaan karyawan atau pegawai di lingkungan perusahaan PT. Socfindo belum mengakomodir masyarakat sekitar perusahaan. Karyawan dan pegawai yang bekerja di PT. Socfindo selama ini mayoritas dari luar Provinsi Aceh, sedangkan masyarakat sekitar hanya menjadi buruh kasar di perkebunan sawit ini yang tidak memerlukan *skill* yang lebih, kecuali tenaga dan fisik yang kuat untuk mengangkat hasil panen ke truk pengangkut hasil panen, padahal menurut beberapa informan banyak juga pemuda-pemuda disekitar perusahaan yang telah menempuh pendidikan sampai sarjana, tetapi peluang mereka untuk bekerja di perusahaan ini relatif sangat kecil.

Berikut ini penuturan Herman warga masyarakat, beliau mengungkapkan:

*“Saat ini jarang sekali pekerja/pegawai yang berasal dari gampong kita, para pekerja/pegawai lebih banyak dari masyarakat luar Nagan Raya, untuk masyarakat setempat kebanyakan bekerja dikebun untuk mengangkut sawit yang tidak perlu skill kecuali tenaga”.* (Herman, wawancara, tanggal 20 Juli 2018)

Konflik sosial lainnya adalah kepedulian perusahaan terhadap penggunaan fasilitas publik, badan jalan di perkampungan penduduk mengalami kerusakan yang dilalui oleh truk pengangkut hasil panen dan hasil pengolahan sawit. Masyarakat mulai tidak senang dengan kehadiran PT. Socfindo ini, Kehadiran perusahaan ini telah merusak fasilitas publik, badan

jalan menjadi rusak dan berdebu ketika dilalui oleh kendaraan. Kerusakan-kerusakan ini kemudian memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat, sehingga kemudian berujung pada konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan yang menuntut dibangunnya kembali jalan-jalan yang rusak yang dilalui truk perusahaan selama ini.

Hal diungkapkan oleh informan kami, yaitu Dirman warga masyarakat dan mantan ketua pemuda, beliau mengungkapkan:

*“Masyarakat kita pernah mengalami konflik dengan PT. Socfindo, karena kerusakan badan jalan akibat lalu lalang truk, tetapi kemudian jalan itu diaspal kembali”.* (Dirman, wawancara, tanggal 20 Juli 2018).

Dampak sosial lainnya terjadi pencurian sawit yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang telah merugikan perusahaan PT. Socfindo. Menurut informasi dari informan yang penulis dapatkan di lapangan, hal ini terjadi karena begitu banyak pemuda-pemuda yang menganggur dan tidak berpenghasilan tetap sehingga mempengaruhi perilaku pemuda-pemuda untuk melakukan tindakan menyimpang dari norma-norma agama dan norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dampak ekonomi relatif sangat kecil, kehadiran perusahaan PT. Socfindo saat ini belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar perusahaan. Masyarakat kebanyakan hanya menjadi buruh kasar di perusahaan PT. Socfindo dengan penghasilan yang relatif kecil seperti yang telah diungkapkan oleh informan diatas, namun begitu disatu sisi juga telah mengurangi pengangguran sekalipun masih relatif sangat kecil.

Kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar belum memberikan pengaruh yang signifikan dengan hadirnya PT. Socfindo, aktivitas masyarakat saat ini merupakan aktivitas rutinitas, tidak ada pengaruh dan perubahan ekonomi yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Diatas penulis telah menyampaikan dan menganalisis berdasarkan temuan-temuan lapangan, bahwa saat ini CSR yang dilaksanakan oleh PT. Socfindo belum mencapai pada tahap pemberdayaan. Hal diperkuat dengan wawancara penulis

dengan informan, yaitu Dewi warga masyarakat, beliau mengungkapkan:

*“Setahu saya saat ini belum ada program yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat”*. (Dewi, wawancara, tanggal 2 Juli 2018).

Kehadiran perusahaan pada umumnya berdampak pada lingkungan masyarakat sekitar, begitu juga dengan kehadiran PT. Socfindo. Perkebunan sawit yang tidak memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan akan sangat merugikan masyarakat sekitar perkebunan. Salah satu dampak lingkungan adalah suhu udara akan semakin panas, karena begitu banyak hutan yang harus dikorbankan, kondisi air tanah juga akan berkurang, keruh dan menguning, hal ini disebabkan oleh kebutuhan tanaman sawit untuk menyerap air dengan skala yang besar. Kondisi ini telah penulis amati beberapa kondisi lingkungan yang telah ditanami sawit, pengamatan ini pernah penulis lakukan di Nagan Raya dan Aceh Tamiang.

Dampak lingkungan lainnya berupa polusi udara dari pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Socfindo. Udara di lingkungan masyarakat sekitar perusahaan menjadi tidak bersih dan tidak sehat, menurut beberapa informasi dari informan yang penulis dapatkan bahwa debu dari mesin pabrik sangat mengganggu kesehatan masyarakat yang tinggal dan menetap disekitar perusahaan. Dampak lingkungan lainnya adalah limbah dari pengolahan sawit dan pernah mengalami kebocoran kemudian mengalir ke sungai yang mengakibatkan ekosistem sungai menjadi terganggu dan kemudian juga berdampak buruk pada masyarakat yang menggantungkan ekonominya di sungai.

Hal ini diungkapkan oleh Saifullah, warga masyarakat beliau menyampaikan:

*“Kehadiran perusahaan saat ini berdampak pada lingkungan gampong kami, ada asap dan debu”*. (Saifullah, wawancara, tanggal 22 Juli 2018).

Hal senada juga diungkapkan oleh Usman warga masyarakat:

*“Dampak dari limbah pengolahan sawit itu berbahaya sekali, belum lagi dengan asap dan debu”*. (Usman, wawancara, tanggal 12 Juli 2018).

## Tanggapan Masyarakat terhadap Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perusahaan PT. Socfindo. Beberapa informan yang telah diwawancarai, memberikan informasi bahwa, perusahaan saat ini belum memberikan kontribusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal dan menetap disekitar perusahaan. Hal ini didasarkan pada beberapa persoalan dan kasus yang pernah terjadi, yaitu saat penerimaan pegawai dan karyawan yang belum mengutamakan penduduk sekitar perusahaan, belum ada program pemberdayaan masyarakat seperti yang telah diatur dalam regulasi pemerintah, bantuan-bantuan yang diberikan hanya bersifat sementara, dampak kerusakan lingkungan akibat penanaman sawit, polusi udara dari asap pabrik yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, kebocoran limbah pengolahan sawit, kerusakan fasilitas umum, misalnya jalan perkampungan, konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan.

Atas dasar diatas, masyarakat berpendapat bahwa perusahaan saat ini hadir justru belum memberikan manfaat yang sesuai harapan masyarakat, misalnya masyarakat berharap ada perbaikan perekonomian masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh informan Herman warga masyarakat, beliau mengungkapkan:

*"Kami berharap kedepan akan ada program-program pemberdayaan masyarakat, karena digampong ramai sekali pengangguran".* (Herman, wawancara, tanggal 1 Juli 2018).

Kehadiran perusahaan sebagian mengalami dampak yang kurang baik terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Berdasarkan data yang didapat dimasyarakat, penulis menilai beberapa bantuan yang diberikan, pada dasarnya bermanfaat bagi masyarakat, namun perusahaan belum melakukan pengembangan pada program-program peningkatan kapasitas masyarakat. Bantuan-bantuan yang diberikan masih pada pembangunan yang bersifat *charity* dan *philantrophy*, misalnya, bantuan untuk pembangunan mesjid dan pembangunan gor mini/sarana olah raga, kedua sarana ini tentu saja sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. PT. Socfindo belum mengembangkan

pada tahap selanjutnya, yaitu *community empowerment*. Padahal jika merujuk pada teori-teori ilmu sosial, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur atau sarana semata, tetapi bagaimana pembangunan sumberdaya manusianya dan pengembangan kapasitas masyarakat.

Masyarakat juga pernah kecewa dan tidak senang dengan perilaku perusahaan yang berdampak pada fasilitas publik masyarakat yang telah dibangun dengan anggaran pemerintah daerah. Jalan perkampungan pernah mengalami kerusakan yang kemudian membuat masyarakat melakukan aksi untuk menuntut perusahaan untuk bertanggungjawab atas kerusakan fasilitas publik itu. Atas desakan masyarakat kemudian perusahaan bertanggungjawab untuk kembali membangun jalan perkampungan. Pembangunan ini dilakukan karena telah terjadi pemblokiran jalan oleh masyarakat dan masyarakat telah melakukan aksi tuntutan terhadap perusahaan PT. Socfindo. Kerusakan badan jalan ini akibat lalu-lalang truk pengangkut hasil panen dan hasil pengolahan sawit.

Terkait dengan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat sekitar, salah satu informan yang kami wawancarai mengungkapkan bahwa gampong kami pernah melakukan perjanjian dengan perusahaan PT. Socfindo, terkait dengan bantuan yang akan diberikan oleh perusahaan, salah satu perjanjiannya adalah akan membantu masyarakat khususnya pemuda untuk kebutuhan sarana dan prasarana olah raga (*volly ball*), tetapi menurutnya perjanjian ini hanya diatas kertas saja. Bantuan ini akan diberikan, apabila gampong kembali membuat surat permohonan kepada perusahaan PT. Socfindo, jika tidak melalui proses surat permohonan maka bantuan tidak direalisasikan.

Hal ini diungkapkan oleh Herman warga masyarakat:

*“Kita sudah punya mou/perjanjian dengan PT. Socfindo, tapi tetap harus mensurati secara resmi. Apabila tidak disurati secara resmi bantuan tidak diberikan, contohnya untuk kebutuhan olahraga para pemuda digampong”*. (Herman, wawancara, tanggal 10 Agustus 2018).



#### D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dimasyarakat, penulis menemukan bahwa PT. Socfindo di Nagan Raya yang bergerak dibidang perkebunan sawit telah melaksanakan CSR namun belum mengarah pada program-program pemberdayaan masyarakat. Berdirinya perusahaan tentusaja berdampak bagi kehidupan masyarakat sekitar perusahaan, dampak itu dapat berupa dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

Berdasarkan analisis data penelitian yang didapatkan dari masyarakat, program-program pemberdayaan masyarakat untuk dapat membangun kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan saat ini belum dijalankan oleh perusahaan. Program-program yang dijalankan oleh perusahaan saat ini ada yang bersifat *accidentally* disesuaikan dengan situasi sosial masyarakat. Program-program yang dijalankan lainnya masih bersifat pada bantuan sosial dan masih pada tahap pembangunan infrastruktur.

Respon masyarakat terhadap keberadaan PT. Socfindo mengalami ketidakpercayaan terhadap perusahaan, menurut masyarakat penerimaan karyawan atau pegawai juga belum mengutamakan putra daerah, padahal di gampong memiliki pemuda-pemuda yang lulusan sarjana yang mampu untuk bekerja di perusahaan PT. Socfindo. Menurut para informan, pegawai dan karyawan yang bekerja di PT. Socfindo saat ini banyak yang berasal dari luar daerah Nagan Raya. Masyarakat sekitar perusahaan mayoritas menjadi buruh kasar yang tidak perlu mengandalkan *skill* yang lebih kecuali tenaga dan fisik yang kuat untuk bekerja di perkebunan dan truk pengangkut sawit. Dampak dari persoalan ini kemudian menghadirkan berbagai persoalan, salah satunya pengangguran dan yang paling ekstrim adalah terjadi perilaku menyimpang yang merugikan perusahaan PT. Socfindo.

Saran penulis untuk PT. Socfindo, dapat melakukan evaluasi terhadap persoalan-persoalan dan isu-isu yang sedang berkembang dimasyarakat saat ini sekaligus juga mengevaluasi program-program yang dijalankan untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Program yang dijalankan harus

berbasis pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita atau gagasan pemerintah yang dituangkan dalam regulasi CSR. Saran lainnya juga disampaikan kepada pemerintah untuk mengevaluasi perusahaan agar menjalankan program CSRnya yang sesuai dengan regulasi yang telah pemerintah tetapkan. Program CSR merupakan program yang baik untuk menanggulangi persoalan kemiskinan, tetapi dibutuhkan kerjasama antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat sebagai mitra agar program-program yang dicanangkan dapat berjalan dengan baik.

### Daftar Pustaka

- Ernawan, E. R. 2014. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)". *Performa Jurnal Manajemen & Bisnis*, *XI*(2). <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/performa/article/view/3026/1894>
- Hayati, B. N., & Suparjan. 2017. "Kemitraan Sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program CSR Batik Cap Pewarna Alami di PT. Semen Gresik Pabrik Tuban". *Sosiologi USK*, *11*, 43-50. Retrieved from <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/9654/7630>
- Ife, J., & Tesoriero, F. 2008. *Community Development; Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, C. I., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. 2018. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Indonesia Power UPJP Kamojang". *Share Social Work Journal*, *8*(2), 195-202. <https://doi.org/10.24198/share.v8i2.20080>
- Nurbaety, A., Ratnasih, R., & Ramdan, H. 2015. "Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility PT.Bio Farma di Desa Sukamulya Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Sositologi*, *14*. Retrieved from <http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/1376/1044>
- Partini. 2013. "CSR dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Implementasi CSR-PTBA di Muara Enim, Sumatera Selatan)". *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, *20*(1), 84-99. <https://doi.org/10.22146/jml.18476>
- Rahmadani, Raharjo, S. T., & Resnawati, R. 2018. "Fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat." *Share Social Work Journal*, *8*(2), 203-210. <https://doi.org/10.24198/share.v8i2.20081>
- S, M. B., & Raharjo, S. T. 2014. "Corporate Social Responsibility (CSR) dari Sudut Pandang Perusahaan." *Share Social Work Journal*, *4*, 13-29. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13045/5945>
- Safrizal. 2016. *Peluang dan Tantangan Sarjana Sosiologi di Industri Tambang Batu Bara*. Aceh Barat.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, D. 2012. "Peranan Corporate Social Responsibility sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengurangi Kemiskinan." *Jurnal Universitas Jember*, *XI*(2), 1-9. Retrieved from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1187>

## PROBLEMATIKA PERUMAHAN PERKOTAAN DI KOTA YOGYAKARTA

\*Anggalih Bayu Muh. Kamim, \*Ichlasul Amal, \*M. Rusmul Khandiq

\*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada

*anggalih.bayu@yahoo.co.id*

### Abstract

This research aims to evaluate the problem of proper housing provision for Yogyakarta citizens. This is important to ensure the citizen's rights to be fulfilled and properly guaranteed. This study is descriptive quantitative research using the survey method and cross-sectional approach which aims to seize every variable. Data collecting is held online on 5-10 November 2018 via a google form. Property rights concept believe that every instrument must be guaranteed. But, this phenomenon makes low wages society loss their accessibility to access housing and risk of happening land conflict. The result of this research is that increasing housing demand in Yogyakarta was not relevant to the scarcity of land provision. On the other hand, this finding says that managing uninhabitable house did not have an adequate facility and expanding the slum area. The conclusion is housing policy in Yogyakarta until now was not successful, because many citizens did not have access to housing policy.

**Keywords:** Housing Policy, Demographics Density, Land Provision

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi masalah penyediaan perumahan layak bagi warga Kota Yogyakarta. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan hak atas warga terpenuhi dan terjamin dengan baik. Kajian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode survei dengan pendekatan *cross-sectional* yang bertujuan mengukur setiap variabel. Pengambilan data dilaksanakan pada 5-10 November 2018 secara daring melalui *google form*. Konsep *property rights* meyakini bahwa segala instrumen harus menjamin kepemilikan individu. Namun, ternyata membuat masyarakat berpenghasilan rendah kehilangan aksesibilitas mendapatkan perumahan dan rentan konflik lahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan di Yogyakarta yang semakin meningkat tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lahan yang terbatas. Hal ini juga memperlihatkan bahwa penataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak didukung oleh fasilitas umum yang memadai dan pemukiman kumuh yang semakin meluas. Pada akhirnya evaluasi dari kebijakan perumahan yang telah dilaksanakan di Kota Yogyakarta sampai saat ini masih terlihat secara parsial dalam arti kurang memperhatikan kebijakan di sektor lain

**Kata Kunci:** Kebijakan Perumahan, Kepadatan Penduduk, Ketersediaan Lahan

## Pendahuluan

Kajian ini akan mendalami upaya pemenuhan kebutuhan warga Kota Yogyakarta terhadap perumahan yang semakin sulit terpenuhi akibat keterbatasan lahan dan mahalannya nilai jual tanah. Penelitian dilakukan dengan mendalami persepsi warga mengenai masalah ketersediaan lahan yang terus berkurang akibat terus tumbuhnya pembangunan perkotaan yang kurang responsif terhadap pemenuhan perumahan bagi warga kelas menengah. Dengan melihat persepsi warga pula terhadap pembangunan sektor properti berupa hotel dan apartemen di Kota Yogyakarta juga dapat digunakan untuk mengevaluasi munculnya masalah harga tanah yang semakin mahal serta minimnya aksesibilitas warga terhadap lahan untuk pemenuhan perumahan. Pembangunan hotel dan apartemen di Kota Yogyakarta diduga memicu kenaikan harga tanah dan berpengaruh terhadap pemenuhan perumahan yang layak sebagai bagian dari hak atas kota yang didapatkan warga. Pembangunan hotel dan apartemen untuk memfasilitasi sektor pariwisata diduga telah memicu masalah ketersediaan lahan dan mahalannya harga rumah di Kota Yogyakarta.

Faktor utama kenaikan harga rumah tapak secara konsisten di Yogyakarta adalah karena kota tersebut merupakan tujuan wisata utama di Indonesia selain Bali, Bandung dan Jakarta. Sektor pariwisata yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta turut mendongkrak harga perumahan di kota. Kebutuhan rumah tapak di Yogyakarta masih terus berkembang seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi. Sementara, industri properti di Yogyakarta sendiri terus berekspansi, agar bisa menampung wisatawan yang datang berkunjung. Namun, saat ini sedang berlangsung moratorium pembangunan hotel di Yogyakarta yang peraturannya dikeluarkan oleh Pemerintah Walikota Yogyakarta, berlaku mulai awal tahun 2014 lalu hingga akhir tahun 2017. Moratorium yang diberlakukan demi meningkatkan okupansi hotel di Yogyakarta ini nyatanya berdampak pada pengalihan investasi dari pembangunan hotel ke pembangunan *homestay*. Hal inilah yang menyebabkan

harga perumahan di Yogyakarta terus meningkat secara konsisten pada tiap kuartalnya (Ika, 2017).

Harga perumahan di Yogyakarta mengalami kenaikan secara konsisten pada kuartal I dan II tahun 2017. *Rumah.com Property Index* mencatat bahwa pada kuartal II-2017, harga perumahan di Yogyakarta mencapai Rp 6 juta per meter persegi dengan kenaikan sebesar 0,12 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Tren kenaikan harga perumahan di Yogyakarta selalu terjadi pada tiap kuartalnya. Data *Rumah.com, Property Index* tentang Yogyakarta ini sangat penting sebagai solusi masalah transparansi data properti yang dibutuhkan oleh para pengembang maupun pencari hunian di Kota Yogyakarta. Data *Rumah.com Property Index* cukup penting digunakan, karena merupakan hasil analisis dari 400.000 *listing* properti yang diakses 3,4 Juta pengunjung setiap bulan (Ika, 2017).

Masalah aksesibilitas warga kota terhadap perumahan yang layak tentu telah mengganggu pemenuhan hak atas kota yang paling mendasar, yakni hak untuk hidup yang ditunjang lewat hunian. Padahal, kebutuhan perumahan di Yogyakarta masih terbilang cukup tinggi. Bahkan, angkanya mencapai 100 ribu lebih unit. Real Estate Indonesia (REI) Yogyakarta mengaku hanya mampu memenuhi 20 persen dari kebutuhan perumahan, sedangkan 80 persennya terpaksa diserahkan pada masyarakat untuk melakukan penyediaan secara mandiri. Namun, permasalahan keterbatasan lahan di Yogyakarta masih menjadi problem serius bagi REI DIY dalam mengembangkan proyek-proyek perumahan mereka. Selain itu, isu-isu lingkungan juga tak bisa begitu saja dari perhatian REI DIY (Anonim, 2014).

Oleh sebab itu, kajian untuk mengevaluasi masalah pemenuhan perumahan yang layak bagi warga Kota Yogyakarta perlu dilakukan untuk memastikan peri kehidupan warga terpenuhi dan terjamin dengan baik. Kajian ini akan dibatasi dengan melihat tiga variabel untuk mengevaluasi masalah perumahan di Kota Yogyakarta yakni, persepsi warga terhadap ketersediaan lahan dan persepsi warga terhadap kebijakan perumahan yang telah dilakukan pemerintah. Variabel ketersediaan lahan mengacu pada persepsi warga

mengenai ruang yang tersedia bagi upaya penyediaan perumahan bagi warga Kota Yogyakarta. Variabel kebijakan perumahan mengacu pada persepsi warga terhadap upaya penyediaan perumahan perkotaan yang telah dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta selama ini. Sudut pandang hak atas kota digunakan untuk membantu proses evaluasi penyediaan perumahan bagi warga kota di Yogyakarta dengan melihat aspek kontrol, akses dan partisipasi dalam kebijakan perkotaan.

### **Pemenuhan *Property Right* dalam Pembangunan Perkotaan**

Salah satu pembahasan yang sering keluar ketika membahas perkotaan adalah mengenai *property rights* (hak milik). Hak milik sering dikaitkan dengan seperangkat karakteristik institusional yang kompleks yang menjamin kepemilikan individu atau kelompok terhadap satu lahan tertentu (Papageorgiu and Turnbull, 2005). Seringkali isu mengenai hak milik banyak beredar di kawasan urban, di mana ketersediaan lahannya lebih sedikit daripada daerah rural. Dalam pembangunan kawasan perkotaan, hak milik memiliki nilai penting terutama dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi di kawasan terkait. Dalam riset yang dilakukan di Warsawa, Polandia (Górczyńska, Przemysław Śleszyński, and Niedzielski, 2018), hadirnya hak milik pasca upaya reprivatisasi setelah runtuhnya rezim sosialis pada 1990-an menyebabkan berubah dan berkembangnya luas perkotaan. Selain itu, seiring dengan semakin banyaknya pihak yang memiliki hak milik, menyebabkan konflik lahan meningkat. Selain itu, dengan mengikuti argumen dari De Soto (dalam Locke, 2015) bahwa pemberian hak milik dapat meningkatkan pasar lahan sehingga dapat meningkatkan harga lahan dan perekonomian, menyebabkan harga lahan di Warsawa semakin mahal dan mulai muncul perumahan-perumahan vertikal, sekalipun masalah konflik akibat pencatatan tanah pasca pengambilan tanah di era sosialisme yang buruk tetap terjadi.

Tingginya harga lahan terutama di kawasan CBD, menyebabkan perluasan kawasan ke daerah nondevelopable di suburban. Hal ini disebabkan murahnya lahan di sana karena memang kawasan tersebut tidak difokuskan

sebagai daerah pengembangan (Papageorgiu and Turnbull, 2005). Selain itu, masifnya penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan industri, perdagangan, dan kawasan vital lainnya, menggerus ketersediaan lahan bagi permukiman warga (Sulistiyani, 2002). Belum lagi, kebutuhan masyarakat perkotaan akan lahan semakin meningkat. Di Kota Yogyakarta sendiri, defisit perumahan per tahun mencapai 100.000 unit. Hal ini menyebabkan tingginya nilai lahan di Yogyakarta (Widiyanto, 2018). *Backlog* perumahan menyebabkan sulit dicapainya hak milik oleh masyarakat – terutama yang termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah – karena harganya semakin mahal. Sekalipun pemerintah Indonesia sendiri juga sudah mengantisipasi hal ini dengan menyediakan perumahan murah untuk MBR. Yang akan dijelaskan berikutnya.

Ada salah satu kasus menarik yaitu kasus *resettlement* yang terjadi di Semarang (Soesilowati, 2007). Kasus ini menunjukkan bahwa upaya *resettlement* bagi masyarakat miskin yang berada di kawasan kumuh ke perumahan susun malah menimbulkan pemiskinan struktural. Hal ini disebabkan oleh tidak dapat dicapainya sumber mata pencaharian mereka karena jauhnya jarak maupun mahalannya biaya transportasi menuju ke mata pencaharian mereka, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan sumber pendapatan. Sedangkan, harga lahan yang mereka huni pun terus meningkat. Dengan kata lain, hak milik mereka perlahan tercerabut, sekalipun mereka difasilitasi dengan diberi rumah, karena mereka tidak lagi mampu membayar sewa. Hanya yang memiliki pendapatan stabil yang bisa mendapatkan hak milik lahan secara penuh. Sehingga pemberian hak milik ini sangat berisiko untuk menciptakan kesenjangan dalam masyarakat, selain menimbulkan konflik.

### **Kebijakan *Property Right* dan Perumahan di Perkotaan Indonesia**

Jika ditarik lebih lanjut, ada beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan *property right*, baik masalah hak milik privat, hingga penyediaan perumahan di kawasan perkotaan. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh BPN sejak 2007, yaitu kebijakan *land titling* dengan tajuk Program Pembaruan Agraria Nasional. Walaupun menggunakan kata



“pembaruan agraria”, sebenarnya kebijakan ini lebih berupa pengakuan hak milik masyarakat atas beberapa tanah yang sebelumnya belum berstatus. Hal ini dikarenakan adanya keharusan untuk menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan lain dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhutanan, selain dengan kebijakan dari Presiden SBY (Rachman, 2017). Selain itu, ada kebijakan terbaru seperti UU No. 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman. UU ini mengatur mengenai kebijakan penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat. Dalam peraturan turunannya, seperti Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang. Diatur mengenai penyediaan perumahan bagi seluruh golongan masyarakat, terutama masyarakat yang kesulitan untuk mengakses. Peraturan turunan lainnya, yaitu Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, diatur lebih lanjut untuk pemerataan hak milik bagi masyarakat yang tidak mampu melalui penyediaan perumahan swadaya. Baik perumahan tapak maupun perumahan susun. Penentuan pemberian bantuan ini menggunakan penetapan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam aturan berikutnya, yaitu Permen PUPR 20/PRT/M/2015 Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Diatur lebih lanjut mengenai MBR yang mendapatkan fasilitas KPR Sejahtera yang diatur dengan batas penghasilan maksimal sebesar Rp 4.000.000 untuk rumah tapak, serta Rp. 7.000.000 untuk rumah susun (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015). Walaupun pola penentuan dengan penghasilan maksimal ini direncanakan untuk diganti dengan pola zonasi (Afriyadi, 2017; Komalasari, 2017).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif yang berusaha menggambarkan distribusi data pada variabel penelitian yang diteliti.

Rancangan penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan *Cross-sectional* yaitu subyek hanya diobservasikan satu kali saja dan pengukuran dilakukan terhadap variabel pada saat penelitian (Notoatmojo, 2002). Pengambilan data dilaksanakan pada 5-10 November 2018 secara daring melalui *google form*. Populasi penelitian ini adalah seluruh warga kota Yogyakarta yang terdapat di 14 kecamatan dengan jumlah sampel 275 warga Kota Yogyakarta yang tersebar di 14 kecamatan tersebut. Persebaran data yang ingin dilihat dari penelitian ini adalah variabel ketersediaan lahan dan variabel kebijakan perumahan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Evaluasi Penyediaan Perumahan oleh Pemerintah di Kota Yogyakarta

Dalam konteks Kota Yogyakarta, kecenderungan perkembangan permukiman kota dewasa ini mengelompok pada pusat kegiatan tertentu di wilayah perkotaan. Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan dan pelayanan memiliki daya tarik bagi beberapa penduduk yang memiliki kepentingan dan motif tertentu, sehingga menarik pendatang bertempat tinggal. Hal ini berakibat pada perkembangan permukiman beserta konsekuensinya pada perubahan kualitas lingkungan di sebagian kawasan permukiman semakin kumuh. Seperti halnya pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia, di Kota Yogyakarta masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok, yaitu keterbatasan penyediaan rumah, meningkatnya jumlah rumahtangga yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, serta permukiman kumuh yang semakin meluas (Ritohardoyo dan Sadali, 2017).

Fenomena di Kota Yogyakarta memperlihatkan kualitas kehidupan perkotaan telah menjadi komoditas, seperti halnya kota itu sendiri, di dunia di mana konsumerisme, pariwisata, budaya dan pengetahuan berbasis industri telah menjadi aspek utama ekonomi politik perkotaan. Hal tersebut telah menyebabkan serangan berulang melalui restrukturisasi kota sebuah *creative destruction* yang hampir selalu memiliki dimensi kelas. Mereka yang miskin,

kurang beruntung dan terpinggirkan dari kekuatan politik menjadi kelompok yang merasakan penderitaan akibat proses restrukturisasi perkotaan (Harvey, 2008).

Keberadaan RTLH menunjukkan adanya perubahan kualitas lingkungan permukiman di perkotaan ini, yang menjadi masalah bagi masyarakat maupun pemerintah dalam mengembangkan dan menciptakan kawasan kualitas lingkungan yang baik. Di Kota Yogyakarta hingga tahun 2014 terdapat 3.304 RTLH, rumah tidak layak huni, tersebar tidak merata di seluruh kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 393 tahun 2014 lokasi kawasan RTLH di Kota Yogyakarta, telah ditetapkan sebagai bagian dari lingkungan kritis, dan memerlukan penanganan serius agar tercipta lingkungan permukiman yang sehat, nyaman dan harmonis. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan RTLH dan permukiman kumuh, adalah memberikan dukungan kebijakan dan strategi atau program yang tepat, terpadu, dan komprehensif. Informasi lokasi keberadaan RTLH yang jelas dan kajian kesesuaian lahan RTLH terhadap tata ruang wilayah dapat menjadi bekal awal dalam menentukan beberapa strategi penanganan RTLH di Kota Yogyakarta (Ritohardoyo and Sadali, 2017).

Kawasan RTLH termasuk ke dalam kelompok kawasan permukiman kumuh, identik dengan kawasan bantaran sungai, terutama yang terdapat di Kota Yogyakarta. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh faktor lingkungan permukiman dengan kepadatan tinggi (baik bangunan maupun penduduk), serta berdasarkan pula faktor lain, seperti bentuk fisik bangunan. Kawasan tidak layak huni Kota Yogyakarta juga berasosiasi dengan ketiga sungai yang melalui Kota Yogyakarta, yaitu Sungai Winongo di bagian barat, Sungai Code di bagian tengah, dan Sungai Gadjah Wong di bagian timur. RTLH paling sedikit berada di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan dan Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedong Tengen. Meskipun berada di bantaran sungai, yaitu Kelurahan Ngupasan di bantaran Sungai Code dan Kelurahan Pringgokusuman di bantaran Sungai Winongo, kedua kelurahan tersebut

memiliki jumlah RTLH yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lain (Ritohardoyo and Sadali, 2017).

Riset yang dilakukan oleh Natalia Riza Putri Ayodiya terkait RTLH di Sungai Code menunjukkan bahwa warga kota tetap ingin bertahan tinggal di bantaran sungai. Mayoritas masyarakat Kampung Code Utara memilih untuk tetap tinggal di tepi Sungai Code karena lokasinya yang strategis yaitu dekat dengan tempat kerja dan pusat pelayanan lainnya, kondisi ekonominya yang pas-pasan untuk pindah rumah ke tempat yang lebih layak, dan memiliki keterikatan kekeluargaan yang erat antar masyarakatnya. Mereka tidak masalah dengan permukimannya yang berada di tepi sungai, tidak beraturan, dan tidak ada hak milik sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka yaitu mereka menginginkan permukiman di dekat lokasi kerja agar biaya transportasi murah karena mereka tidak memiliki pendapatan dan pendidikan yang tinggi. Sedangkan beberapa masyarakat yang bersedia untuk pindah dari Kampung Code Utara mengungkapkan bahwa mereka menginginkan rumah dengan berlokasi masih di kota, berbentuk deret, berstatus hak milik, dan cara membayar kredit (Ayodiya, 2014).

Upaya untuk melakukan penataan “kawasan kumuh” di Kota Yogyakarta memperlihatkan adanya tekanan untuk membersihkannya dengan alasan lingkungan dan sosial. Alasan tersebut digunakan oleh pemerintah kota seakan menutupi fenomena perampasan tanah yang meningkat setiap hari. Kekuatan modal didukung oleh negara mendorong untuk pembersihan kumuh secara paksa, dalam beberapa kasus mengambil secara “kejam” lahan yang telah dihuni oleh beberapa generasi. Akumulasi modal terjadi menggantikan permukiman “kumuh” akibat perkembangan *real estate* yang didorong proses investasi (Harvey, 2008).

Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun yang mengacu pada UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, diatur bahwa dalam pembangunan rumah susun komersial, pengembang wajib menyediakan rumah susun umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR) sekurang-kurangnya 20% dari total luasan lantai rumah susun komersial yang dibangun. Hal ini menjadi sukar diimplementasikan karena luasan 20 % dapat dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan, tetapi pada satu wilayah Kabupaten/Kota. Kondisi harga lahan yang tinggi di Kota Yogyakarta menjadi salah satu faktor yang tidak memungkinkan untuk implementasi aturan tersebut (Kristarani, 2015).

Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan terkait dengan penataan permukiman Kota Yogyakarta melalui kegiatan pembangunan Rusunawa, Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal dan penyediaan fasilitas untuk perbaikan rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni. Hingga tahun 2011, telah dilakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 1.589 unit. Pada tahun 2014 jumlah rumah tidak layak huni di Kota Yogyakarta semakin meningkat. Jumlah rumah tidak layak huni di Kota Yogyakarta sebesar 3.362 unit. Masalah lain yakni, ancaman penggusuran rumah-rumah warga oleh hotel-hotel. Tingginya tingkat pembangunan hotel di Kota Yogyakarta memberikan ancaman tersendiri bagi keberadaan rumah-rumah warga yang telah lama bertempat tinggal di Kota Yogyakarta. Beberapa warga telah menjual rumah mereka ke pengembang hotel. Dengan demikian, mereka harus pergi meninggalkan rumah dan mencari lokasi lain di Kota Yogyakarta maupun di luar Kota Yogyakarta (Kristarani, 2015).

Ada peningkatan signifikan pertumbuhan hotel yang sudah beroperasi di Provinsi DIY terutama di wilayah Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. BPS Provinsi DIY mencatat, jumlah hotel mencapai 1.106 pada 2011, terdiri dari 41 hotel bintang dan 1.035 hotel melati. Sedangkan pada 2014 jumlah hotel di DIY menembus angka 1.138 hotel, terdiri dari 71 hotel bintang dan 1.067 hotel melati. Jumlah tersebut sangat mungkin bertambah hingga ratusan hotel baru setelah 2014. Sebab, dari data yang dikurasi Warga Berdaya, sebuah kelompok penggiat yang kritis atas pola-pola pembangunan di Yogyakarta, menyebutkan sedikitnya ada 104 pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) hotel ke Dinas Perizinan Kota Yogyakarta pada 2013 atau pra-moratorium. Artinya, akan ada tambahan

ratusan hotel baru di Yogyakarta dalam proses izin dan kemungkinan beroperasi setelah tahun 2014. Kendati ada moratorium di Kota Yogya dan Kabupaten Sleman, hal ini tidak menyurutkan para pengusaha membangun hotel di kedua daerah tersebut. Alasan utamanya bukan semata kunjungan wisatawan dan okupansi di Yogya (DH, 2017).

Pengembang mengambil beberapa cara untuk melakukan pengembangan hotel di Kota Yogyakarta. Nihilnya Perda Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Sleman menjadi celah bagi pengembang untuk mulai membangun sebanyak-banyaknya apartemen dan hotel, mumpung belum ada aturannya. Selain itu, pola lain yang terlihat pada beberapa pembangunan di Provinsi Yogyakarta adalah mengakali prosedur mendapatkan izin. Manipulasi misalnya soal tanda tangan persetujuan warga. Sebelum melakukan pembangunan, pihak pengembang wajib melakukan sosialisasi terhadap warga di lingkungan setempat alias wilayah terdampak di ring satu. Biasanya, saat sosialisasi diedarkan tanda tangan untuk daftar hadir. Kertas daftar hadir ini yang kerap dimanfaatkan pengembang untuk dijadikan tanda bukti persetujuan sebagai syarat izin awal, yaitu Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) dan izin lingkungan (Putsanra, 2017).

Kondisi permainan bisnis yang dilakukan para pengembang di Kota Yogyakarta dan sekitarnya menunjukkan adanya fenomena *accumulation by dispossession*. Fenomena tersebut dapat dimaknai sebagai sebagai upaya yang diperlukan untuk membuat terobosan yang sukses ke dalam pembangunan kapitalis dengan dukungan kuat dari kekuatan negara baik melalui dorongan internal maupun eksternal. Ada banyak sekali aktivitas seperti ini baik berupa tindakan legal dan ilegal yang mempengaruhi kontrol aset oleh satu kelas lebih dari yang lain. Tapi bagaimana, kapan, dan mengapa *accumulation by dispossession* muncul dari keadaan latar belakang untuk mendapatkan keuntungan dari proses ekspansi bisnis properti. Di sisi lain, fenomena ini bisa juga mencerminkan upaya yang dilakukan pengusaha untuk menyatakan untuk 'bergabung dengan sistem' serta berdalih membantu pemerintah dalam

membangun kota dan mencari manfaat secara langsung dari akumulasi modal (Harvey, 2003).

“Permainan” bisnis pengembang di Kota Yogyakarta juga memicu kenaikan harga tanah. Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap 275 responden menunjukkan bahwa mayoritas responden yakni sebanyak 130 orang menyatakan sangat setuju dan 110 setuju terkait mahalny tanah di Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir. 30 responden menyatakan ragu-ragu, jika selama lima tahun terakhir tanah di Kota Yogyakarta mahal. 5 responden menyatakan tidak setuju selama lima tahun terakhir tanah di Kota Yogyakarta mahal. Berdasarkan analisa dengan *chi-square test* ternyata ada hubungan yang signifikan antara variabel pembangunan hotel yang meluas dengan variabel mahalny harga tanah di Kota Yogyakarta dengan nilai signifikasi di bawah 0,5, sehingga  $H_0$  ditolak.

**Tabel 1.**

Hasil *chi-square test* antara variabel pembangunan hotel dengan variabel mahalny harga tanah di Kota Yogyakarta

<b>Chi-Square Tests</b>			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	32.525 <sup>a</sup>	12	.001
Likelihood Ratio	33.846	12	.001
Linear-by-Linear Association	2.498	1	.114
N of Valid Cases	275		

a. 10 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13.

Sumber: *Data Primer yang telah diolah*

**Tabel 2.**

Persepsi Responden mengenai Mahalnya Harga Tanah di Kota Yogyakarta

No	Persepsi Responden mengenai Mahalnya Harga Tanah di Kota Yogyakarta	Frekuensi
1	Sangat Setuju	130
2	Setuju	110
3	Ragu-ragu	30
4	Tidak Setuju	5
5	Sangat Tidak Setuju	0
Jumlah Total		275

Mayoritas responden yakni sebanyak 120 orang menyatakan tidak setuju dan 42 orang menyatakan tidak setuju jika pembangunan hotel sesuai dengan kebutuhan warga. Di lain sisi, 7 responden menyatakan sangat setuju dan 34 responden setuju bahwa pembangunan hotel sesuai dengan kebutuhan warga. Sedangkan, 72 responden menyatakan ragu-ragu dalam menyikapi apakah pembangunan hotel sesuai dengan kebutuhan warga. Mayoritas responden yang menyatakan tidak setuju menunjukkan bahwa pembangunan hotel membuat berbagai permasalahan pemenuhan hak atas kota termasuk penyediaan perumahan di Kota Yogyakarta menunjukkan pembangunan perkotaan tidak sesuai dengan kepentingan warga.

**Tabel 3.**  
Persepsi Warga mengenai Pembangunan Hotel

No	Persepsi Warga mengenai Pembangunan Hotel	Frekuensi
1	Sangat Setuju	7
2	Setuju	34
3	Ragu-ragu	72
4	Tidak Setuju	120
5	Sangat Tidak Setuju	42
Jumlah Total		275

Sumber: *Data primer yang telah diolah*

Salah satu persoalan penting dihadapi oleh Kota Yogyakarta dalam perkembangan mutakhir adalah masalah perkembangan fisik kota. Kota makin menghadapi tantangan untuk meluaskan wilayah tata ruang sebagai akibat dari perubahan penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan penduduk semakin mendesak. Meningkatnya perubahan demografis yang secara dinamis terus meningkat telah mendorong meningkatnya kebutuhan penggunaan lahan untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan permukiman dan perumahan maupun kepentingan fasilitas sosial ekonomi (Kartikasari, 2007).

Kebutuhan perumahan sebagai akibat urbanisasi yang tak terkendali lebih banyak menimbulkan peningkatan permintaan potensial akan perumahan tetapi



bukan permintaan efektif. Sifat permintaan potensial adalah bahwa secara riil orang membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal, tetapi mereka tidak mempunyai daya beli yang memadai. Sedangkan, permintaan efektif adalah kebutuhan akan rumah yang disertai dengan daya beli yang seimbang. Kedua jenis permintaan ini masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri. Apabila, sekelompok orang memerlukan sarana tempat tinggal, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menjangkau, maka ini menjadi picu munculnya *slum area*. Di sisi lain, sekelompok orang yang memerlukan sarana tempat tinggal disertai kemampuan yang memadai untuk menjangkau juga belum tentu selalu dapat terpenuhi. Tuntutan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak huni tidak saja memenuhi standar kuantitas, tetapi juga harus memenuhi standar kualitas, sebab pemenuhan perumahan bagian dari hak atas kota warga (Sulistiyani, 2002).

Urbanisasi yang juga dipicu oleh masuknya banyak pendatang mendorong kebutuhan perumahan di Kota Yogyakarta meningkat. Ada beberapa faktor yang memicu peningkatan pendatang ke Yogyakarta. Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap persepsi 275 responden teridentifikasi beberapa faktor pemicu pendatang ke Kota Yogyakarta, yakni ketersediaan pekerjaan, kedudukan sebagai kota pendidikan, kedudukan sebagai kota pariwisata, dan biaya hidup yang terjangkau. Mayoritas responden melihat faktor kedudukan sebagai kota pendidikan menjadi pemicu pendatang menetap di Kota Yogyakarta yakni sebanyak 196 responden. Faktor biaya hidup yang terjangkau menjadi pemicu pendatang yang kurang dilihat bagi responden, karena hanya 6 responden yang melihatnya sebagai faktor pemicu.

**Tabel 4.**  
Faktor Pemicu Pendatang di Kota Yogyakarta

No	Faktor Pemicu Pendatang ke Yogyakarta	Frekuensi
1	Ketersediaan Pekerjaan	18
2	Kedudukan sebagai Kota Pendidikan	196

3	Kedudukan sebagai Kota Pariwisata	55
4	Biaya Hidup yang Terjangkau	6
Jumlah Total		275

Sumber: *Data Primer yang telah diolah*

Masuknya pendatang di Kota Yogyakarta menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk yang turut meningkatkan jumlah kebutuhan hunian serta pengembangan properti. Berdasarkan penelusuran terhadap 275 responden yang dilakukan oleh peneliti, ternyata mayoritas responden yakni 182 responden sangat setuju bahwa hadirnya pendatang memicu peningkatan kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta. 88 responden setuju hadirnya pendatang memicu peningkatan kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta. Hanya dua responden yang tidak setuju hadirnya pendatang memicu peningkatan kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta, sedangkan dua responden menyatakan tidak tahu.

**Tabel 5.**  
 Persepsi Responden bahwa Hadirnya Pendatang Memicu Peningkatan Kepadatan Penduduk di Kota Yogyakarta

No	Persepsi Responden bahwa Hadirnya Pendatang Memicu Peningkatan Kepadatan Penduduk di Kota Yogyakarta	Frekuensi
1	Tidak tahu	2
2	Sangat Setuju	182
3	Setuju	88
4	Ragu-Ragu	2
5	Tidak Setuju	2
Jumlah Total		275

Sumber: *Data Primer yang telah diolah*

Peningkatan kepadatan penduduk akibat masuknya pendatang diduga memicu geliat investasi properti di Kota Yogyakarta. Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap 275 responden, ternyata mayoritas responden yakni 144 orang setuju bahwa ada geliat investasi properti di Kota Yogyakarta. 88 responden menyatakan setuju ada geliat investasi properti di Kota Yogyakarta. 23

responden menyatakan ragu-ragu dan 16 responden menyatakan tidak setuju ada geliat investasi properti di Kota Yogyakarta. Apabila dilihat menggunakan analisa *chi-square tests*, ternyata ada hubungan yang signifikan antara variabel pendatang yang memicu kepadatan penduduk dengan variabel geliat investasi properti dengan nilai signifikansi di bawah 0,5%, maka  $H_0$  ditolak. Maka, pengembangan properti untuk mengatasi kepadatan penduduk akibat adanya pendatang perlu dilakukan.

**Tabel 6.**

Hasil *chi-square tests* antara variabel pendatang dengan geliat investasi properti di Kota Yogyakarta

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	28.016 <sup>a</sup>	16	.031
Likelihood Ratio	21.198	16	.171
Linear-by-Linear Association	.625	1	.429
N of Valid Cases	275		

a. 17 cells (68,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,01.

Sumber: *Data Primer yang telah diolah*

**Tabel 7.**

Persepsi Responden mengenai Geliat Investasi Properti di Kota Yogyakarta

No	Persepsi Responden mengenai Geliat Investasi Properti di Kota Yogyakarta	Frekuensi
1	Sangat Setuju	88
2	Setuju	144
3	Ragu-ragu	23
4	Tidak Setuju	16
5	Sangat Tidak Setuju	4
Jumlah Total		275

Sumber: *Data Primer yang telah diolah*

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap 275 responden menunjukkan bahwa mayoritas responden yakni sebanyak 172 orang setuju bahwa peran pengembang berperan dalam penyediaan perumahan yang layak di Kota

Yogyakarta. 54 responden menyatakan sangat setuju bahwa peran pengembang berperan dalam penyediaan perumahan yang layak di Kota Yogyakarta. Hanya sebanyak 3 responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan satu responden tidak tahu terkait peran pengembang dalam penyediaan perumahan. Penyediaan perumahan tersebut menjadi penting untuk memastikan pemenuhan hak atas kota bagi warga.

**Tabel 8.**  
Persepsi Responden mengenai Peran Pengembang dalam Penyediaan Perumahan

No	Persepsi Responden mengenai Peran Pengembang dalam Penyediaan Perumahan	Frekuensi
1	Tidak Tahu	1
2	Sangat Setuju	54
3	Setuju	172
4	Ragu-ragu	34
5	Tidak Setuju	11
6	Sangat Tidak Setuju	3
Jumlah Total		275

Sumber: *Data Primer yang telah diolah*

Perumahan berkedudukan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dan pengejawantahan diri, baik sebagai insan pribadi maupun sebagai satu kesatuan bersama dengan lingkungannya. Status dasar kebutuhan dasar akan perumahan tersebut bersifat struktural yang merupakan bagian dari kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Keberadaan perumahan melekat pada suatu kawasan, berarti secara mutlak rumah berdiri membutuhkan lahan. Guna terpenuhi persyaratan perumahan yang memadai dan lingkungan yang baik maka sebuah rumah memerlukan lahan yang cukup. Sementara itu, penyediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan semakin sempit. Khususnya, di perkotaan permasalahan serupa menjadi semakin menonjol dari waktu ke waktu seiring dengan kebutuhan pertumbuhan perkotaan itu sendiri (Sulistiyani, 2002).

Kebijakan-kebijakan perumahan di perkotaan dicanangkan tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan kebijakan di sektor lain, seperti

kebijakan kependudukan, pengendalian urbanisasi, dan pembangunan pedesaan dan diversifikasi ekonomi dan pembuatan *site planning* untuk dapat memperjelas pengembangan/pertumbuhan kota, sehingga lebih terkendali. Ada beberapa pemikiran yang dapat menyokong kebijakan perumahan di perkotaan. *Pertama*, manajemen pembangunan dengan merumuskan kebijakan perumahan yang menyeluruh dan terpadu, dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan fungsional, potensi, dana dan daya, peningkatan ekonomi dan tata ruang serta tata guna tanah. *Kedua*, pendekatan etis pembangunan dengan mempertimbangkan keterjangkauan, diferensiasi subsidi, diferensiasi program sehingga dapat mencakup pelbagai permasalahan di semua kalangan masyarakat, dan asas pemerataan penyebaran perumahan. *Ketiga* pendekatan teknis, pembangunan perumahan secara bertahap, terus menerus, dengan teknologi tepat guna, dan tepat sasaran. *Keempat*, pendekatan sosiologis, dengan pertimbangan aspek kemasyarakatan yang memiliki kultur yang hendaknya dipertimbangkan dalam membuat *site planning* (Sulistiyani, 2002).

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sudah tergambarakan tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan warga Kota Yogyakarta terhadap akses perumahan yang semakin sulit terpenuhi akibat keterbatasan lahan dan semakin mahalnya nilai jual tanah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Kebutuhan perumahan di Yogyakarta yang semakin meningkat tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lahan yang terbatas. Masifnya pembangunan hotel dan apartemen untuk memenuhi kebutuhan pariwisata ternyata telah memicu terbatasnya ketersediaan lahan dan mahalannya harga rumah di Kota Yogyakarta. Responden dari hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa mahalannya harga tanah berhubungan dengan pembangunan hotel yang meluas dan kepadatan penduduk akibat masuknya pendatang memicu geliat investasi properti di Kota Yogyakarta. Setelah moratorium pembangunan hotel yang

memiliki evaluasi dalam implementasinya di mana pengalihan industri pariwisata dari pembangunan hotel ke pembangunan homestay perlu ditanggapi secara serius sehingga warga terpenuhi hak atas kota terhadap hunian perumahan.

- b) Penataan perkotaan berkaitan dengan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) ternyata tidak didukung oleh fasilitas umum yang memadai dan pemukiman kumuh yang semakin meluas. Beberapa kawasan tidak layak huni dekat dengan sungai di Kota Yogyakarta. Penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah perlu ditingkatkan secara kuantifikasi dan evaluasi ketepatan sasaran penerima dengan pendataan yang baik. Dari sisi skema pembiayaan perumahan baik dari negara maupun sektor swasta memiliki keterbatasan alokasi anggaran sehingga berpengaruh kepada warga kota dalam mengakses perumahan.
- c) Kebijakan perumahan yang telah dilaksanakan di Kota Yogyakarta sampai saat ini masih terlihat secara parsial dalam arti kurang memperhatikan kebijakan di sektor lain. pengembangan perumahan dengan motif ekonomi tanpa memperhatikan secara mendalam aspek lingkungan akan berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan. Revitalisasi rumah tidak layak huni di Kota Yogyakarta berguna memastikan pemukiman yang sehat, nyaman, dan harmonis. Hal ini penting di mana aspek sosial kemasyarakatan perlu dikaji mendalam agar mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga kebijakan perumahan dapat bermanfaat untuk warga kota.
- d) Kebijakan pemberian property right di Kota Yogyakarta pada akhirnya malah menimbulkan permasalahan baru, seperti masalah lingkungan, kemiskinan struktural, serta semakin naiknya harga lahan yang menyebabkan susah akses bagi sebagian masyarakat. Bahkan, kebijakan perumahan dari masyarakat belum bisa sepenuhnya digunakan oleh masyarakat di Kota Yogyakarta itu sendiri.

### Daftar Pustaka

- Anonim. 2014. "Kebutuhan Perumahan Di DIY Capai 100 Ribu Unit." *Tribun Jogja*.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayodiya, Natalia Riza Putri. 2014. "Model Kebijakan Permukiman Kampung Code Utara Di Tepi Sungai Code." *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 10(1):22-32.
- DH, Agung. 2017. "Marak Hotel & Apartemen Di DIY Bikin Harga Tanah Gila-Gilaan."
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 2015. *Peranan APBN Dalam Mengatasi Backlog Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- Górczyńska, Magdalena, Przemysław Śleszyński, and Michael A. Niedzielski. 2018. "Impact of Property Rights and Ownership on the Development of Warsaw's Contemporary City Centre." *European Planning Studies* 1-21.
- Harjanto, Totok. 2016. "STRATEGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KAWASAN PERKOTAAN." *Jurnal Ekonomi* 5(2):44-70.
- Harvey, David. 2003. *The New Imperialism*. New York: Oxford University Press.
- Harvey, David. 2008. "The Right to the City." 23-40.
- Harvey, David. 2012. *Rebel Cities From The Right To The City To The Urban Revolution*. London: Verso.
- Ika, Aprillia. 2017. "Pariwisata Dongkrak Harga Rumah Di Yogyakarta." *Kompas*.
- Kartikasari, Testy Triani. 2007. *Kajian Tingkat Pertumbuhan Dan Tingkat Perkembangan Kecamatan Umbulharjo: Studi Kasus: Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta*. Universitas Diponegoro.
- Komalasari, Tia Dwitiani. 2017. "Pemerintah Ubah Kriteria Warga Yang Berhak Miliki Rumah Dijual Murah." *Pikiran Rakyat*. Retrieved April 15, 2019 (<https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2017/05/16/pemerintah-ubah-kriteria-warga-yang-berhak-miliki-rumah-dijual-murah-401254>).
- Kristarani, Hillary. 2015. "Implementasi Hunian Berimbang Di Kota Yogyakarta." 1-14.
- Locke, Anna. 2015. *Property Rights and Development Briefing: Property Rights and Economic Growth*. London.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Papageorgiu, Chris and Geoffrey K. Turnbull. 2005. "Economic Development and Property Rights: Time Limits on Land Ownership." *Economic Development Quarterly* 271-83.
- Putsanra, Dipna Videlia. 2017. "Trik Pengembang Untuk Dapatkan IMB Di Yogyakarta." *Tirto.Id*.
- Rachman, Noer Fauzi. 2017. *Land Reform & Gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Ritohardoyo, Su and Mohammad Isnaini Sadali. 2017. "KESESUAIAN KEBERADAAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) TERHADAP TATA RUANG WILAYAH DI KOTA YOGYAKARTA." *Tata Loka* 19(4):291-305.
- Soesilowati, ETTY. 2007. "Kebijakan Perumahan Dan Permukiman Bagi Masyarakat Urban." *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Dinamika* 16(1):106-25.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2002. "Problema Dan Kebijakan Perumahan Di Perkotaan." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5(3):327-44.
- Widiyanto, Danar. 2018. "Moratorium Perlu Dicabut, Apartemen Solusi Memangkas 'Backlog.'" *Krjogja.Com*. Retrieved April 15, 2019 ([https://krjogja.com/web/news/read/65553/Moratorium\\_Perlu\\_Dicabut\\_Apartemen\\_Solusi\\_Memangkas\\_Backlog](https://krjogja.com/web/news/read/65553/Moratorium_Perlu_Dicabut_Apartemen_Solusi_Memangkas_Backlog)).
- XAfriyadi, Achmad Dwi. 2017. "Pemerintah Bakal Ubah Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah." *Liputan6.Com*. Retrieved April 15, 2019 (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2938413/pemerintah-bakal-ubah-kriteria-masyarakat-berpenghasilan-rendah>).



## DESA WISATA BERBASIS PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DI DESA TERUNYAN, BALI

**\*Dewa Putu Oka Prasiasa; \*\*Dewa Ayu Diyah Sri Widari**

\*Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Handayani Denpasar, Bali  
*dewaputuoka18@gmail.com*

\*\*Akademi Pariwisata Denpasar, Bali  
*dewaayusriwidari@gmail.com*

### Abstract

This Article aims to formulate empowerment strategies, identify forms of partnership, and develop an institutional reinforcement model to support Terunyan Tourism Village. The result shows that the strategy applied by the manager of Terunyan Tourism Village using Conformity Model that implements the program using the learning process approach. Partnerships conducted four patterns of interaction between the community institution of Terunyan Village, Terunyan Tourism Village, Tourism Stakeholders, and the Management of Terunyan Tourism Village. Institutional Reinforcement Model conducted among the involvement of all Village society and community institution in relation to support the Terunyan Tourism Village, and revitalize groups (*sekaha*) to strengthen the development of tourism products in Terunyan Tourism Village.

**Keywords:** Empowerment, Partnerships, Institutional Strengthening, Tourism Village, Terunyan

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemberdayaan, mengidentifikasi bentuk-bentuk kemitraan, dan menyusun model penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung pengembangan Desa Wisata Terunyan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh pengelola Desa Wisata Terunyan mempergunakan model kesesuaian yang mengimplementasikan program dengan mempergunakan pendekatan proses pembelajaran. Kemitraan yang dilakukan berbentuk empat pola interaksi antara Pranata Masyarakat Desa Terunyan, Desa Wisata Terunyan, Pelaku Pariwisata, dan Pengelola Desa Wisata Terunyan. Model Penguatan Kelembagaan yang dilakukan antara lain melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa serta Pranata Masyarakat yang ada di desa dalam kaitan mendukung Desa Wisata Terunyan, dan merevitalisasi kelompok (*sekaha*) untuk memperkuat pengembangan produk wisata di Desa Wisata Terunyan.

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan, Kemitraan, Penguatan Kelembagaan, Desa Wisata, Terunyan*

## Pendahuluan

Wisata hijau adalah suatu bentuk wisata yang terjadi sebagai akibat adanya pergeseran minat wisatawan dalam melakukan wisata. Pergeseran minat dalam berwisata itu ditandai dengan perubahan pola perjalanan wisata. Menurut Boniface (1999: 7) wisata hijau bercirikan skala kecil, menaruh perhatian terhadap masalah lingkungan serta sosial, sejarah dan budaya, kehidupan liar, berada dalam kendali lokal, dukungan terhadap ekonomi lokal, penggunaan orang-orang lokal, berorientasi mutu, serta konservasi.

Dampak yang dapat ditimbulkan oleh perubahan pola perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan yang berwisata ke Bali antara lain dapat mengganggu terwujudnya harmonisasi kepariwisataan dan kebudayaan Bali. Karena pada awalnya pola perjalanan pariwisata budaya Bali dilandasi oleh falsafah *tri hita karana*, dan akibat perubahan yang terjadi saat ini falsafah tersebut mulai ditinggalkan. Akibatnya hubungan antara kebudayaan dan pariwisata tidak lagi sinergis, harmonis dan berkelanjutan, yang pada akhirnya tidak dapat mensejahterakan masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Jika kondisi ini terjadi, akan bertentangan dengan harapan dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 pada intinya mengharapkan hubungan antara kebudayaan dan kepariwisataan dapat sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat, tercipta pelestarian budaya serta lingkungan.

Pengembangan potensi wisata diharapkan dapat memberi manfaat pada destinasi pariwisata dan masyarakat lokal. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberi solusi terhadap dampak yang akan ditimbulkan terhadap budaya dan pariwisata dari perubahan pola perjalanan wisata adalah melalui pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan, kemitraan dan penguatan kelembagaan. Pengembangan desa wisata memiliki tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umum tersebut adalah hadirnya bentuk pembangunan pariwisata yang bersinergi dengan budaya lokal dan pembangunan berkelanjutan,

menyesuaikan dengan situasi kekinian, pemerataan serta memperluas pembangunan potensi lokal. Kemudian pemanfaatan potensi lokal dalam pembangunan pariwisata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Fakultas Teknik UGM, 1992: 3).

Meskipun Bali sebagian besar wilayahnya sudah diterpa oleh arus modernisasi, namun masih terdapat desa yang belum terjamah arus modernisasi. Desa tersebut memegang teguh adat istiadat dan tradisi tradisional yaitu Desa Terunyan. Desa ini terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan merupakan desa tua di Bali serta dikenal sebagai *bali mula* atau *bali aga*. Untuk mencapai desa ini, pengunjung harus naik perahu dengan jarak yang cukup jauh. Saat ini jalan menuju Desa Terunyan sudah tersedia, namun kondisi jalan masih sangat memprihatinkan. Salah satu tradisi unik yang masih dipertahankan di daerah ini adalah tradisi pemakaman. Tradisi ini di luar *bali aga* dikenal istilah *ngaben*, namun di *bali aga* (Desa Terunyan) jenazah warganya diletakkan di tanah di bawah pohon. Pohon tersebut dikenal dengan nama *taru menyen*. Penguburan seperti ini disebut *mepasah* sebagai simbol jenazah sudah dikembalikan ke bumi.

Saat ini Desa Terunyan memiliki tiga kuburan. Pertama disebut *sema bantas*, kuburan yang diperuntukkan bagi mereka yang meninggal karena bunuh diri, berkelahi dan penyakit ganas. Kedua disebut *sema nguda*, kuburan yang diperuntukkan bagi bayi atau orang dewasa yang belum menikah. Ketiga adalah *sema wayah*, kuburan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang meninggal akibat sakit biasa. Selain ketiga kuburan tersebut, Desa Terunyan juga memiliki potensi budaya berupa Pura Pancering Jagat yang berarti "Pusar Dunia", bangunan dengan satu atap besar di tengahnya yang disebut *bale agung*, dan tempat berkumpul para wanita lajang yang disebut *bale daha*.

Meskipun Desa Terunyan memiliki potensi alam, tradisi dan budaya yang sudah dikenal oleh wisatawan domestik dan mancanegara, namun terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Desa Terunyan antara lain belum memiliki *something to do* (sesuatu yang dikerjakan) dan *something to buy*

(berbagai produk cinderamata untuk kenangan). Untuk pengembangan desa ini sebagai desa wisata, syarat adanya sesuatu yang dapat dilakukan di suatu kawasan sangat penting. Selain itu wisatawan harus memperoleh kenangan, sehingga perlu tersedia cinderamata sebagai ciri khas mereka sudah mengunjungi desa wisata.

Untuk dapat memunculkan *something to do* dan *something to buy*, strategi pemberdayaan, kemitraan serta penguatan kelembagaan dari Desa Wisata Terunyan perlu dilakukan. Oleh karena itu artikel ini bertujuan merumuskan strategi pemberdayaan; menemukan bentuk kemitraan; serta menyusun/memformulasikan model penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung pengembangan Desa Terunyan sebagai desa wisata.

## Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif dengan paradigma interpretivisme (*post-positivisme*). Sebagaimana karakter penelitian kualitatif, maka dalam hal ini peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan serta interpretasi data, pedoman wawancara, dan catatan lapangan. Oleh karena itu data dalam penelitian ini bersumber dari informan sebagai data primer dan dokumen serta monografi Desa Terunyan sebagai data sekunder. Penentuan Informan penelitian dilakukan menggunakan model *purposive*, terdiri dari Aparat Desa Terunyan, Pengurus Desa Adat Terunyan, Tokoh Masyarakat, Pengelola Desa Wisata Terunyan, dan Pemilik Usaha Pariwisata di Desa Terunyan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumen.

## Pembahasan

### Konsep Desa Wisata

Desa wisata dikenal juga dengan istilah *village tourism*, *rural tourism*, *farm tourism*, atau *agro tourism* (Leu, 1992:212; Dolors, 1995:49; Iakovidou, 1995:87; Oppermann, 1996:212; Dowling, 1996:220). Sedangkan desa wisata di Indonesia merupakan keterpaduan dari atraksi, akomodasi, serta fasilitas

pendukung yang tersaji dan menyatu dengan struktur kehidupan, tata cara, dan tradisi (Nuryanti, 1993). Penetapan sebuah desa sebagai desa wisata harus memiliki daya tarik wisata (*attractions*), mudah dijangkau (*accessibilities*), dan terdapat sarana pariwisata (*amenities*). Keamanan dan dukungan masyarakat serta aparat desa sangat diperlukan. Desa wisata sebagai alternatif dalam pengembangan pariwisata merupakan upaya untuk mengatasi sisi negatif yang terjadi pada pengembangan kawasan wisata yang bersifat tertutup (*enclave*).

Mengacu pada penelitian serta studi UNDP dan WTO, terdapat tiga pendekatan dalam pengembangan desa wisata yaitu interaksi tidak langsung, interaksi setengah langsung, dan interaksi langsung (UNDP dan WTO, 1981). Studi ini menekankan pada pentingnya cerminan suasana desa dalam pengembangan desa wisata. Untuk itulah atraksi di desa wisata ditujukan pada pengembangan budaya dan alam desa. Berdasarkan potensi desa, beragam atraksi dapat dikembangkan yaitu aktivitas persawahladangan, kesenian tradisional, permainan tradisional, arsitektur tradisional, serta budaya lokal. Jika ini terjadi, maka pengembangan desa wisata lebih memanfaatkan potensi desa. Fasilitas wisata yang disediakan harus menampilkan potensi desa. Desa dengan segala potensinya bukan saja dijadikan daya tarik wisata, akan tetapi keunikan serta keaslian yang berkaitan dengan cara hidup masyarakat desa perlu disajikan. Dengan demikian masyarakat dapat berperan dalam menjaga keberlanjutan desa wisata.

Terkait perkembangan suatu desa wisata, Bashar dan Ajloni (2012) dalam kajiannya tentang motivasi wisatawan asing berwisata ke situs pedesaan di Petra, Yordania menyatakan bahwa salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke pedesaan karena tersedianya fasilitas lingkungan. Untuk itu revitalisasi program serta strategi diperlukan untuk memberikan pengalaman kepada wisatawan serta meningkatkan dampak sosial dan ekonomi. Selain aspek fasilitas, Chiu, et al. (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *image* afektif dipengaruhi oleh *image* kognitif dan mengkonfirmasi proses pembentukan *image* destinasi. Meskipun tidak ada hubungan langsung antara

loyalitas wisatawan dengan *image* kognitif, namun ditemukan *image* kognitif tidak langsung mempengaruhi loyalitas wisatawan.

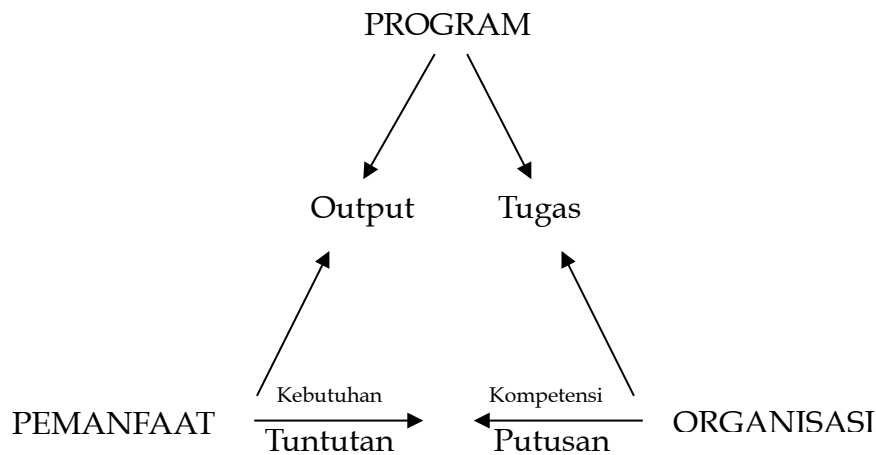
Senada dengan hal itu, dalam hal kualitas destinasi suatu desa wisata, Rajaratnam dan Nair (2015) mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat delapan atribut utama yang mempengaruhi kualitas destinasi yaitu fasilitas, aksesibilitas, logistik, pengalaman, kebersihan, informasi, keamanan, dan keramahan. Lebih lanjut, Chang dan Tsai (2016) dengan penelitiannya yang berjudul "*Influences of The Cultural Implications and Tourism Attractiveness of Festival Tourism on Tourist*", menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi daya tarik wisata adalah implikasi dan integrasi budaya yang membentuk pengalaman baru bagi wisatawan.

### **Strategi Pemberdayaan Desa Wisata Terunyan**

Menurut Tarigan (2000: 19) program yang diimplementasikan dengan mempergunakan pendekatan proses pembelajaran adalah salah satu bentuk Model Pemberdayaan. Model ini menekankan pada kesesuaian antara program, pelaksanaan, serta kelompok sasaran. Oleh karena itu, untuk merumuskan strategi pemberdayaan di Desa Wisata Terunyan, perlu dilakukan dengan mempergunakan Model Kesesuaian.

Lebih lanjut, menurut Tarigan (2000: 19) program akan berhasil dilaksanakan bila ada (1) terdapat kesesuaian antara penawaran program dengan kebutuhan kelompok sasaran (pemanfaat); (2) kesesuaian antara persyaratan program dengan kemampuan organisasi pelaksana; dan (3) kesesuaian antara persyaratan program untuk menghasilkan *output* dengan yang dilakukan oleh kelompok sasaran program. Adapun Model Kesesuaian tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 1**  
Model Kesesuaian



Sumber: Tarigan, 2000:19

Berdasarkan model yang dikembangkan, dapat dipahami jika terjadi ketidaksesuaian antara tiga unsur dalam implementasi program, maka harapan yang ingin dicapai dari program sulit tercapai. Jika program *output*-nya tidak dibutuhkan oleh kelompok sasaran, maka *output* program tidak bermanfaat. Jika pelaksana program tidak mampu melaksanakan tugas sesuai persyaratan program, maka *output* program menjadi tidak tepat. Atau, jika kelompok sasaran tidak memenuhi persyaratan sebagai pelaksana program, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Untuk itulah diperlukan kemampuan dari ketiga unsur tersebut menciptakan kesesuaian agar program dapat terimplementasi.

Dengan hadirnya Model Kesesuaian seperti Gambar 1 dapat memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Meskipun terjadi penyesuaian antar elemen - program, pemanfaat dan organisasi - namun ketiganya tetap merupakan dimensi dari isi kebijakan (program), dimensi dari konteks implementasi (organisasi), maupun dimensi dari *outcomes* (pemanfaat). Jika Model Kesesuaian dikembangkan sebagai sebuah strategi, dikaitkan dengan keberadaan Desa Terunyan yang dikembangkan sebagai desa wisata, secara matrik dapat disajikan seperti tabel berikut:

**Tabel 1**  
Strategi Model Kesesuaian Desa Terunyan Sebagai Desa Wisata

Komponen Model Kesesuaian	Isi/Muatan	Prasyarat	Rekomendasi
Program (program yang dikembangkan oleh Desa Wisata Terunyan)	Penyajian produk wisata yang menjadi keunikan/ciri khas Desa Terunyan ( <i>something to buy</i> )	Aksesibilitas dan Amenities berkualitas	Produk yang disajikan dapat berupa alam, budaya, tradisi, dan <i>man made</i> atau memadukan keempatnya
Pemanfaat (masyarakat desa setempat dan wisatawan)	Produk mengacu kebutuhan wisatawan Desa Wisata Terunyan	Produk harus unik, berkualitas, serta betul-betul berasal dari Desa Terunyan	Prinsip <i>quality tourism</i> dari <i>tourism village</i> harus tersaji secara baik dengan melibatkan masyarakat desa setempat
Organisasi (pengelola Desa Wisata Terunyan)	Pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Terunyan	Melibatkan semua unsur / pranata kemasyarakatan yang memiliki kompetensi	Masyarakat yang dilibatkan pada pengelolaan dan operasionalisasi desa wisata betul-betul memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaan

Sumber: Diolah dari hasil penelitian (2019)

Selain penerapan strategi, keberhasilan pengembangan Desa Wisata Terunyan dilihat dari keberhasilan pemberdayaan (budaya, lingkungan, dan ekonomi tumbuh) dari masyarakat desa setempat; penerimaan kehadiran desa wisata oleh masyarakat Desa Terunyan; kemampuan mengembangkan dan membentuk jaringan desa wisata lain di Bali dan di luar Bali; semua pelayanan memenuhi standar bidang pariwisata; terbentuknya kelembagaan (*ancillary*) yang akan mengelola Desa Wisata Terunyan.

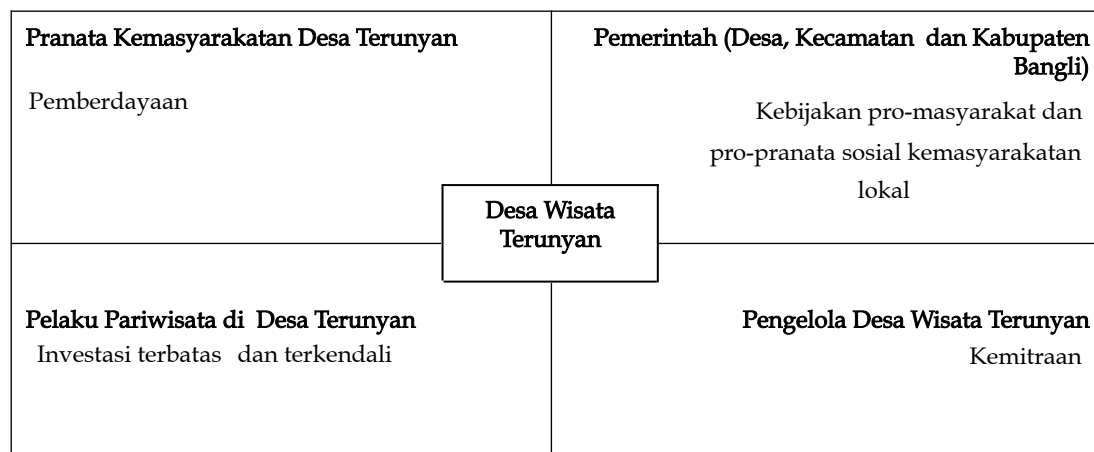


### Bentuk-bentuk Kemitraan Desa Wisata Terunyan

Pengembangan Desa Wisata Terunyan tidak saja mengedepankan keuntungan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, yang terpenting adalah keberlanjutan budaya dan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan pengembangan Desa Wisata Terunyan, maka diperlukan kemitraan. Berikut ini disajikan bentuk-bentuk kemitraan antara *Stakeholders* Desa Wisata Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan seperti gambar berikut ini:

#### Gambar 2

Bentuk Kemitraan antara *Stakeholders* Desa Wisata Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan



Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2019

Berdasarkan bentuk kemitraan antara *Stakeholders* Desa Wisata Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan seperti Gambar 2, pola interaksinya dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. Interaksi Pranata Kemasyarakatan Desa Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan berwujud pemberdayaan pranata yang ada di masyarakat seperti pelibatan *banjar, tempek, dusun, sekaha-sekaha*. Dengan pemberdayaan pranata kemasyarakatan Desa Terunyan tersebut secara langsung dan tidak langsung masyarakat mendapat manfaat dari pengembangan desanya sebagai desa wisata.
2. Interaksi Pemerintah (kabupaten, kecamatan dan desa) dengan Desa Wisata Terunyan, melalui kebijakan-kebijakan tidak saja terkait dengan

desa wisata, tetapi kebijakan-kebijakan sektor pariwisata yang lebih pro-rakyat dan pro-pranata kemasyarakatan desa sehingga betul-betul manfaat dari desa wisata dirasakan oleh masyarakat pada tingkat akar rumput.

3. Interaksi Pelaku Pariwisata di Desa Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan. Implementasi interaksi ini jika dikaitkan dengan investasi, maka investasi harus bersifat 'terbatas dan terkendali', artinya investasi hanya dilakukan dengan mempergunakan modal (ekonomi, sosial dan budaya) yang menjadi milik masyarakat Desa Terunyan terhadap berbagai keperluan Desa Wisata Terunyan dengan diprioritaskan pada investasi yang bersifat memberdayakan masyarakat Desa Terunyan. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, investasi dari luar Desa Terunyan sangat dibatasi. Hal ini dimaksudkan agar efek menetes (*trickle down effect*) dari Desa Wisata Terunyan benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
4. Interaksi antara Pengelola Desa Wisata Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan. Interaksinya bersifat kemitraan dan pengelola hanya terdiri dari masyarakat lokal yang merupakan wakil dari masing-masing pranata kemasyarakatan di Desa Terunyan. Komponen-komponen Desa Terunyan yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata berfungsi sebagai mitra kerja untuk saling menguatkan, sehingga Desa Wisata Terunyan memiliki nilai tambah dan daya saing. Daya saing desa wisata dapat dibentuk melalui transformasi data, informasi, dan ide. Hasil transformasi ketiganya dapat dirubah menjadi produk (*tangible* dan *intangibile*) yang dapat menciptakan pengetahuan untuk meningkatkan daya saing desa wisata.

Isu-isu terkait komodifikasi (mutu produk, sarana dan prasarana, dan Sumber Daya Manusia Pariwisata) menjadi hal yang penting dalam rangka keberlanjutan pengembangan desa wisata. Berdasarkan penelitian, isu komodifikasi di Desa Wisata Terunyan memerlukan program dan kebijakan

holistik sebagai akibat pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan yang memiliki kegiatan sangat kompleks, multi sektor, dan multi produk. Oleh sebab itu, diperlukan sinergisitas dari *Stakeholders* yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata Terunyan.

Dengan adanya keterbatasan pemerintah dalam manajemen pengelolaan desa wisata, maka diperlukan revitalisasi terhadap pranata kemasyarakatan yang ada di Desa Wisata Terunyan. Revitalisasi tersebut antara lain berupa peningkatan partisipasi masyarakat pada aktivitas di desa wisata, penataan areal di dan sekitar desa wisata, pemberian nilai tambah (*value added*) pada produk wisata beserta sistem pemasarannya dengan mempergunakan kekuatan jaringan di dan antara desa wisata yang ada di Bali.

Karena sektor pariwisata meliputi kegiatan yang kompleks dan multi sektor, maka isu berikutnya yang tidak kalah menariknya untuk dikemukakan adalah isu koordinasi (baik koordinasi internal maupun eksternal) dalam pengelolaan desa wisata. Peningkatan daya saing produk perlu melibatkan aktor utama yang ada di balik pengembangan desa wisata. Peran aktor utama tersebut merupakan isu strategis, karena dari aktor utama inilah kontribusi dalam pengembangan desa wisata akan berawal. Dalam pengembangan desa wisata, ada sejumlah aktor utama yang dapat diidentifikasi antara lain: Kementerian Pariwisata, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa), Asosiasi Profesi Pariwisata, Usaha Pariwisata, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Masyarakat, Media Massa, dan Lintas Departemen. Masing-masing aktor ini diharapkan akan memberikan kemudahan terutama terkait dengan penentuan peran serta fungsi masing-masing terkait dengan keterlibatannya dalam desa wisata. Masing-masing aktor bermitra guna memberikan kontribusi yang optimal bagi upaya mendorong keberhasilan sebuah desa wisata, termasuk bagi pengembangan Desa Wisata Terunyan.

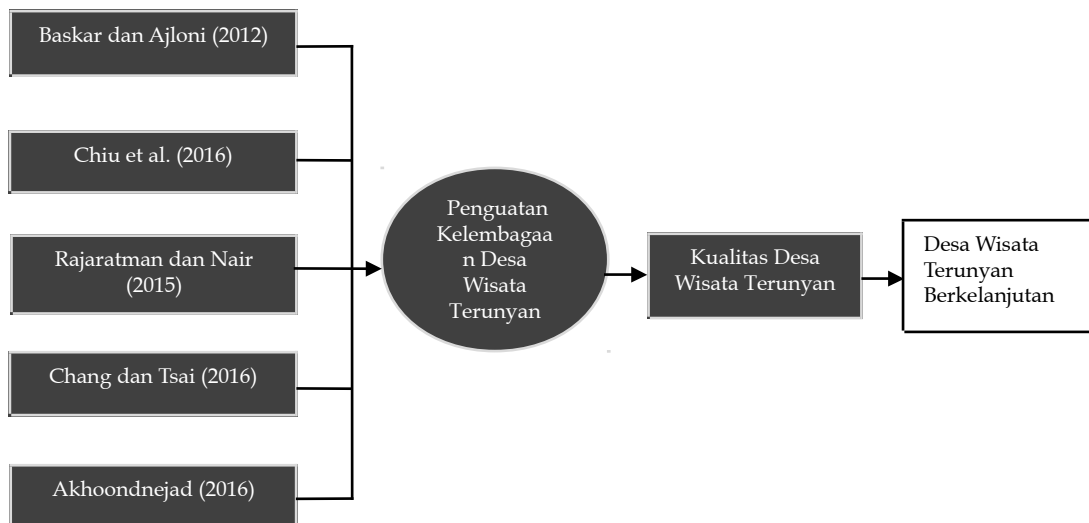
Penanganan yang komprehensif diperlukan terhadap berbagai isu (seperti pengelolaan, komodifikasi, koordinasi, dan aktor utama) sebagai sub sistem dalam kemitraan desa wisata. Melalui penanganan yang komprehensif tersebut

akan hadir desa wisata yang dapat mensejahterakan masyarakat desa. Harapan tersebut akan tercapai apabila kualitas pengalaman wisatawan selama berwisata di desa wisata dapat ditingkatkan, dihasilkannya sumber daya manusia yang kompeten, dilakukannya survei terhadap produk yang dihasilkan oleh desa wisata, terhindarnya wisatawan dari dampak negatif oleh masyarakat lokal dan lingkungan (*resources stewardship*), terciptanya lingkungan usaha di desa wisata yang lebih baik melalui visi, misi, strategi, program serta kebijakan yang jelas serta dilaksanakan oleh *Stakeholders*.

### **Model Penguatan Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Terunyan sebagai desa wisata**

Desa Wisata Terunyan memerlukan penguatan kelembagaan (*ancillary*), dengan tujuan untuk mempertahankan keberadaan serta autensitas Desa Terunyan sebagai desa *bali aga* di Bali. Untuk mencapai tujuan tersebut, penguatan kelembagaan oleh masyarakat setempat dioperasionalkan dalam bentuk pengembangan Desa Wisata Terunyan. Penguatan kelembagaan di Desa Wisata Terunyan dilakukan melalui: (1) pelibatan seluruh lapisan masyarakat desa serta Pranata Kemasyarakatan dalam kaitan mendukung Desa Wisata Terunyan; (2) revitalisasi terhadap kelompok (*sekaha*) yang menghasilkan produk wisata untuk memperkuat pengembangan Desa Wisata Terunyan. Penguatan kelembagaan mampu memperkuat citra Desa Wisata Terunyan. Implementasi Sadar Wisata juga bertambah kuat sebagai akibat penguatan kelembagaan. Dengan penguatan kelembagaan yang dilakukan, secara otomatis semua aktivitas terkait Desa Wisata Terunyan akan melembaga. Penguatan kelembagaan pada akhirnya dapat meningkatnya kualitas Desa Wisata Terunyan yang ditandai dengan tingkat kepuasan wisatawan yang semakin meningkat setelah mereka mengunjungi desa wisata tersebut. Jika penguatan kelembagaan yang telah dilakukan oleh Desa Wisata Terunyan dihubungkan dengan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat disajikan seperti gambar berikut ini:

**Gambar 3**  
Hubungan Penelitian Sebelumnya dengan  
Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Terunyan



Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2019

Penguatan kelembagaan yang telah dilakukan di Desa Wisata Terunyan mendukung implementasi penelitian Baskar dan Ajloni (2012) dari aspek fasilitas lingkungan pedesaan, revitalisasi program serta strategi pengembangan; Chiu et al. (2016) dari aspek *image* destinasi (termasuk di dalamnya *image* desa wisata sebagai bagian dari destinasi pariwisata); Rajaratman dan Nair (2015) dari aspek kualitas destinasi, persepsi terhadap destinasi, dan delapan atribut kualitas destinasi yaitu fasilitas, aksesibilitas, logistik, pengalaman, kebersihan, informasi, keamanan, dan keramahtamahan; Chang dan Tsai (2016) dari aspek integrasi dan karakteristik budaya yang dapat menciptakan pengalaman baru; serta Akhoondnejad (2016) dari aspek autentisitas yang dapat mempengaruhi persepsi terhadap kualitas, nilai, dan kepuasan.

Struktur organisasi pengelola desa wisata sebagai cerminan dari kelembagaan desa wisata, saat ini diisi oleh pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dalam rangka penguatan kelembagaan Desa Wisata Terunyan, maka organisasi pengelola desa wisata kedepannya perlu diisi oleh perwakilan dari pranata kemasyarakatan yang ada di Desa Terunyan yaitu *bendesa adat*,

*kelian banjar, kelian dusun* atau *kelian tempek, sekaha-sekaha*, Badan Pertimbangan Desa, Pokdarwis, Generasi Muda (*teruna-teruni*), *Pecalang*, serta unsur-unsur lainnya yang ada di desa setempat. Pelibatan pranata kemasyarakatan Desa Wisata Terunyan ditujukan untuk penguatan kelembagaan dan terimplementasinya pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Sedangkan *Stakeholders* lainnya seperti dari Aparat Desa Terunyan, Pemerintah Kecamatan Kintamani, Pemerintah Kabupaten Bangli, dan Pemerintah Provinsi Bali bersifat sebagai pembina dan menjalankan fungsi koordinasi dengan desa wisata.

## Penutup

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh pengelola Desa Wisata Terunyan adalah mempergunakan Model Kesesuaian yang berintikan kesesuaian antara tiga elemen yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.
2. Kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Terunyan berbentuk empat pola interaksi yaitu: (a) interaksi antara Pranata Kemasyarakatan Desa Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan; (b) interaksi antara Pemerintah (kabupaten, kecamatan dan desa) dengan Desa Wisata Terunyan; (c) interaksi antara Pelaku Pariwisata di Desa Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan; dan (d) interaksi antara Pengelola Desa Wisata Terunyan dengan Desa Wisata Terunyan.
3. Model Penguatan Kelembagaan dalam rangka mendukung pengembangan Desa Wisata adalah melalui (a) pelibatan seluruh lapisan masyarakat desa serta Pranata Kemasyarakatan yang ada di desa dalam kaitan mendukung pengembangan Desa Terunyan sebagai desa wisata berbasis budaya; dan (b) merevitalisasi kelompok (*sekaha*) yang

Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan, Kemitraan, dan Penguatan Kelembagaan di Desa Terunyan, Bali menghasilkan produk wisata untuk memperkuat pengembangan Desa Wisata Terunyan.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Mengacu pada strategi pemberdayaan yang dirumuskan dengan mempergunakan Model Kesesuaian, maka program-program yang disusun terkait operasionalisasi Desa Wisata Terunyan agar mengacu pada potensi alam, budaya, dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Desa Terunyan.
2. Kemitraan yang terjadi diantara *Stakeholders* Desa Wisata Terunyan diharapkan mampu menghasilkan program yang dapat mensejahterakan masyarakat Desa Terunyan.
3. Untuk memperkuat kelembagaan, pengelolaan Desa Wisata Terunyan agar melibatkan seluruh Pranata Kemasyarakatan Desa Terunyan yang memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

### Daftar Pustaka

- Akhoondnejad, A. 2016. "Tourist Loyalty to a Local Culture Event: the Case of Turkmen Handicrafts Festival." *Journal of Tourism Management* 52: 468-477. (<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.06.027>).
- Bashar, Ajloni, A.A.A. 2012. "Motivating Foreign Tourist to Visit The Rural Site in Jordan, Village of Petra." *Australian Journal of Business and Management Research* 2(5): 01-07.
- Boniface, Priscilla. 1999. *Mengelola Wisata Budaya Bermutu*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Chiu, W, Zeng, S., Cheng, P.S.T. 2016. "The Influence of Destination Image and Tourist Satisfaction on Tourist Loyalty: A Case Study of Chinese Tourist in Korea." *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research* 10(2): 223-234. DOI: 10.1108/IJCTHR-07-2015-0080.
- Chang, F.H., Tsai, C.Y. 2016. "Influences of The Cultural Implications and Tourism Attractiveness of Festival Tourism on Tourist Loyalty." *Journal of Business and Management Studies* 2(1): 1-10.
- Dolors, M.G., Canoves., Valdovinos. 1995. "Farm Tourism, Gender and The Environment in Spain." *Annals of Tourism Research* 22(2): 267-282. ([https://doi.org/10.1016/0160-7383\(94\)00096-4](https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00096-4)).
- Dowling, R. 1996. "Ecotourism in Thailand." *Annals of Tourism Research* 23(2): 488-490.
- Fakultas Teknik. 1992. *Penyusunan Tata Ruang dan Rencana Detail Teknik Desa Wisata Terpadu di Bali*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Iakovidou, O. 1995. "The Female Gender in Greek Agrotourism." *Annals of Tourism Research* 22(2): 481-484. ([https://doi.org/10.1016/0160-7383\(94\)00099-9](https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)00099-9)).
- Leu, W. 1992. The Swiss Experience. In: Nuryanti (editor). *Universal Tourism Enriching or Degrading Culture*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nuryanti, Windu. 1993. "Concept, Perspective and Challenges." *Naskah Lengkap Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Oppermann, M. 1996. "Rural Tourism in Southern Germany." *Annals of Tourism Research* 23(1): 86-102. ([https://doi.org/10.1016/0160-7383\(95\)00021-6](https://doi.org/10.1016/0160-7383(95)00021-6)).
- Rajaratnam, S.D., Nair, V. 2015. "Destination Quality an Tourist' Behavioural Intentions: Rural Tourist Destinations in Malaysia." *Journal Emerald*



---

*Worldwide Hospitality and Tourism Themes* 7(5): 463-472. DOI: 10.1108/whatt-06-2015-0026.

Tarigan, A. 2000. *Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat*. Tesis: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

UNDP and World Tourism Organization. 1981. *Tourism Development Plan for Nusa Tenggara, Indonesia*. Madrid.

### **Undang-Undang dan Peraturan**

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan Budaya Bali.

## KEARIFAN LOKAL DAN PERAN ELIT AGAMA DALAM MITIGASI BENCANA DI KECAMATAN TANGSE KABUPATEN PIDIE

**Muhammad Sahlan**

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh  
*sahlan.hanafiah@gmail.com*

### **Abstract**

*Knowledge about disasters has not been part of the local wisdom of society even though disasters have occurred many times. Every disaster happens as if always be something new. For this reason, this study aims to discuss local wisdom and the role of religious elites in disaster mitigation in Tangse, Pidie District. Because of the involvement of religious elites in the context of Acehnese people's still very important. Local wisdom of the community that should be a fortress, in fact, has first drowned and died because the local wisdom routinization has never run. Religious advice offered regarding forest and environmental conservation has lost its meaning because other people's economic alternatives have not been available. This condition is getting worse because people who are expected to be a fortress to prevent illegal logging are part of the activity. Finally, the religious elite as a strategic group also trapped in a circle of "timber economy" that invites disaster.*

**Keywords:** Disasters, Local Wisdom, Elite Religion, Tangse District

### **Abstrak**

Pengetahuan tentang bencana seringkali belum menjadi bagian bersemayam dalam kehidupan masyarakat meski bencana tersebut telah datang silih berganti. Setiap terjadi bencana, seakan-akan selalu menjadi sesuatu yang baru. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang kearifan lokal serta peran elit agama dalam mitigasi bencana di Tangse Kabupaten Pidie, mengingat keterlibatan elit agama dalam konteks kehidupan masyarakat Aceh yang masih sangat penting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik dan tsunami menjadi dua peristiwa dominan yang mengubah pola mata pencaharian masyarakat Tangse yang kemudian melahirkan pola pikir instan, sekaligus membuat masyarakat sulit keluar dari aktivitas penebangan liar yang melahirkan bencana. Kearifan lokal masyarakat yang seharusnya dapat menjadi benteng malah sudah terlebih dahulu tenggelam dan mati karena rutinisasi kearifan lokal sudah tak pernah dijalankan. Demikian pula dengan eksistensi elit agama dalam masyarakat menjadi sangat lemah dan lumpuh ketika berhadapan dengan aktivitas penebangan liar karena "berkah ekonomi" juga dinikmati oleh mereka.

Petuah-petuah keagamaan yang disamapaikan terkait pelestarian hutan dan lingkungan menjadi kehilangan makna, karena alternatif ekonomi masyarakat yang lain memang belum tersedia. Kondisi ini menjadi semakin parah karena orang-orang yang diharapkan menjadi benteng untuk mencegah pelepasan liar malah menjadi bagian dari aktivitas tersebut. Akhirnya elit agama sebagai kelompok strategis juga ikut terjebak dalam lingkaran “ekonomi kayu” yang mengundang datangnya bencana.

**Kata Kunci:** *Bencana, Kearifan Lokal, Elit Agama, Kecamatan Tangse*

\*\*\*

## Pendahuluan

Tangse adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pidie yang berada di kawasan pegunungan Pidie, berjarak sekitar 190 km dari Kota Banda Aceh, Ibukota Provinsi Aceh. Letaknya yang sangat strategis dan dengan kekayaan alam yang melimpah, membuat Tangse pernah menjadi daerah yang paling makmur di Aceh pada masa lalu. Namun, sejak tahun 2011 hingga kini, daerah ini telah berubah menjadi kawasan bencana. Hampir setiap tahun bencana datang menghampiri masyarakat dari tanah longsor hingga banjir bandang (Lihat; Junaidi Hanafiah, 2015. “Tangse yang Kini Akrab Bencana”).

Meski Tangse kini telah menjadi “langganan bencana”, namun pengetahuan tentang bencana seolah belum menjadi bagian dari *local wisdom* yang bersemayam dalam kehidupan masyarakat. Setiap bencana yang datang, seakan-akan itu selalu menjadi sesuatu yang baru. Irwan Abdullah mengakui bahwa secara akademik, pengkajian tentang bencana masih sangat langka dan miskin sehingga setiap bencana yang terjadi selalu dianggap sebagai sebuah pengalaman baru dan ditanggapi sebagai sesuatu yang seakan-akan belum memiliki pengetahuan dan pengalaman kolektif tentang itu (Irwan Abdullah, 2006). Padahal, kejadian bencana sejatinya telah mengungkap esensi dan rahasia tentang kelemahan dan kekuatan tersembunyi dalam masyarakat, yang dalam situasi “normal” tertutup oleh sistem dan struktur yang membungkusnya (Humaedi, 2015: 213). Ketika bencana yang sama terjadi dan datang silih

berganti, idealnya masyarakat kawasan bencana memiliki pengetahuan, baik itu refleksi dari pengalaman maupun kajian-kajian yang bersifat saintis sehingga bisa menjadi *early warning* untuk meminimalisir dampak bencana, bahkan kehadiran bencana itu sendiri. Masyarakat bisa berkaca dan belajar dari pengalaman masa lalu. Makna teoritis pembelajaran ini menjadi penting mengingat manusia pada hakikatnya sebagai *animal historicum* yang terus bergelut dalam historisitasnya.

Dalam konteks Aceh, keterlibatan elit agama dalam kehidupan masyarakat Aceh secara kultural masih menjadi *center of social* yang memiliki *informal power* yang tersebar sebagai kekuatan penyeimbang dalam struktur masyarakat. Ulama dalam tatanan sosial di Aceh adalah kaum yang masih dilirik sebagai salah satu kelompok strategis, baik itu pada keputusan-keputusan politik, sosial maupun dalam hal kebudayaan. Kemampuan elit agama dalam menguasai ilmu agama menjadi basis legitimasi untuk menjadikan mereka solusi atas berbagai permasalahan keummatan. Namun, kurangnya implementasi sosial melalui panggung-panggung ceramah maupun moment keagamaan lainnya sebagai upaya penyadaran manusia akan pentingnya menjaga lingkungan diduga menjadi salah satu faktor penyebab maraknya dan tingginya intensitas bencana di bumi Tangse terkhusus, dan Aceh pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran elit agama dalam mitigasi bencana yang terjadi di dalam masyarakat Tangse. Disamping itu, artikel ini juga ingin melihat bagaimana kearifan lokal yang berupa hukum adat pada masyarakat rawan bencana “berbicara” tentang mitigasi bencana. Dengan memenuhi tujuan-tujuan itu, maka penelitian ini diharapkan bisa menambah perspektif kajian kebencanaan, baik secara teoritis, maupun praktis.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan mengeksplorasi suatu kenyataan sosial secara natural. Jenis penelitian ini

menempatkan obyek penelitian sebagai subjek aktif yang berada dalam lingkungan natural dan diupayakan untuk dideskripsikan secara timbal-balik dengan *thick description* (Koentjaraningrat. 1991:87; Sanapiah Faisal, 1989: 18). Sebagaimana karakter penelitian kualitatif, peneliti akan menjadi instrumen kunci dan bersifat utama dalam proses pengumpulan data. Peneliti akan berada di dalam wacana dimana produksi terhadap makna berlangsung, artinya peneliti secara *intens* akan berada dalam lingkungan dan kehidupan masyarakat yang diteliti.

Beberapa teknik pengumpulan data peneliti gunakan yaitu kajian literatur, dokumentasi, observasi partisipasi, diskusi grup terfokus dan wawancara mendalam. Setelah semua data dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti diatas, maka analisa data akan dilakukan secara induktif dimana para peneliti membangun pola-pola, kategori-kategori dan tema- temanya dari bawah ke atas, dengan mengolah data ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. Pada akhirnya, penelitian ini akan menghasilkan sebuah gambaran yang kompleks dari suatu masalah atau isu yang diteliti (Creswell, 2010: 261-263).

## **Pembahasan**

### **Tangse dan Dinamika Sosial Masyarakat**

*Tangse is a dreaming land*, begitulah kalimat yang cocok untuk menggambarkan daerah ini. Kecamatan Tangse bagai kota eksotis yang dikelilingi oleh perbukitan dan aliran sungai yang jernih membuat siapapun yang berkunjung ke daerah ini merasa ketagihan. Tanahnya yang subur, udaranya yang sejuk dan pemandangannya yang indah sangat memanjakan mata dan memberikan nilai tersendiri bagi mereka penikmat keindahan alam. Wilayah administrasi Kecamatan Tangse berbatasan dengan Kecamatan Keumala di sisi utara, Aceh Barat di sebelah selatan, Aceh Besar dibagian Barat dan Kecamatan Mane di sisi timur. Luas wilayahnya ± 750 KM<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk 26.235 jiwa, terdiri dari 4 mukim, 28 gampong dan berada di atas ketinggian 600-1200 mdpl (Tangse dalam Angka, 2017).

Sejak dulu Tangse telah terkenal sebagai daerah penghasil beras terlezat di Aceh, aromanya yang wangi dan teksturnya yang pulen membuat beras Tangse menjadi komoditas utama masyarakat kala itu. Namun kisah itu kini seolah tinggal kenangan, Tangse yang sempat menjadi primadona, saat ini lebih dikenal sebagai daerah “langganan bencana”. Beras Tangse pun sudah tidak lagi diproduksi, yang tersisa hanya “merk”nya saja. Sebagian besar masyarakat kini sudah mulai meninggalkan arena pertanian yang dulu sempat membuat Tangse menjadi primadona.

Pada masa konflik, daerah Tangse yang dikelilingi pegunungan serta kondisi hutan yang natural “menyediakan” banyak kayu menjadikannya sebagai daerah yang cukup banyak dijarah sekaligus sebagai tempat “transaksi” pada masa itu. *“Pada masa konflik Aparat dan GAM telah sama-sama memperkosa hutan, GAM yang tebang kayu, aparat yang beli”* (Wawancara, Oktober 2018), ujar seorang Imam Mukim dan sekaligus mantan anggota GAM Tangse. Belum lagi kondisi yang mencekam pada masa konflik sebagaimana daerah lainnya di Aceh, membuat aktivitas masyarakat menjadi sangat terbatas. Begitupula dengan masyarakat Tangse yang harus meninggalkan perkebunan mereka pada saat itu karena ketakutan akibat konflik yang terjadi. Masyarakat lebih memilih beraktivitas di area perkampungan saja. Sehingga mereka yang sebelumnya menggantungkan hidup dari perkebunan, pada masa konflik terpaksa harus meninggalkannya. Akibatnya perkebunan yang sempat menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat berubah menjadi hutan dan semak belukar (Hasil wawancara dengan Imam Mukim Layan, Oktober 2018).

Setelah konflik usai dan kondisi Aceh semakin kondusif, masyarakat tidak lagi kembali ke perkebunan yang dulu pernah mereka kerjakan karena akses menuju perkebunan yang ada di kawasan hutan telah rusak. Terlebih lagi, pasca tsunami geliat pembangunan di Aceh meningkat, permintaan kayu untuk pembangunan pun semakin meningkat pula. Kondisi ini mendorong masyarakat Tangse untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutang Tangse karena sangat menguntungkan dan membawa berkah ekonomi secara

instan. Dampaknya, terjadi penebangan liar secara massif dan hal ini secara perlahan mengubah pola mata pencaharian masyarakat serta membuat hutan-hutan yang ada menjadi gundul. Singkatnya, ekonomi kayu yang menjanjikan pasca tsunami secara perlahan berhasil mengubah pola mata pencaharian masyarakat.

Kini, sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya pada kayu yang ada di hutang Tangse meskipun sebagian besar hutan Tangse adalah kawasan lindung, sehingga tetapi kehancurannya menjadi tidak terelakkan. Masyarakat sudah terlanjur menikmati mudahnya mendapat uang dari menjual kayu, sehingga cukup sulit untuk kembali ke lahan pertanian. Jika pun kembali, pertanian itu bukan lagi yang utama. "*Saat ini kayu adalah sumber ekonomi utama masyarakat*" tutur salah seorang Geuchik (Kepala Desa). Lahan pertanian dan perkebunan memang masih tersedia, namun kayu dianggap jauh lebih menjanjikan karena dapat diperoleh dengan cepat. Sedangkan pertanian membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, apalagi perkebunan yang aksesnya saja membutuhkan perjuangan. Akhirnya komoditas pertanian hanya dilirik sebagai sumber skunder dan kayu tetap menjadi sumber primer ekonomi masyarakat.

Perubahan demi perubahan yang terjadi secara pelan tapi pasti telah mengubah *landscape* kehidupan sosial masyarakat tangse. Hutan yang ada sudah tidak lagi dipandang sebagai anugerah tuhan yang harus terus di jaga dan dilindungi demi keselamatan hidup mereka. Terjadi perubahan cara pandang masyarakat dalam melihat hutan, yakni dari hutan sebagai ruang yang menjaga kehidupan dengan segala sumberdaya nabati, berubah menjadi ruang-ruang penyedia modal bagi produksi yang mereka pikirkan untuk terus di eksploitasi. Perubahan inilah yang kemudian melahirkan praktek *illegal logging* tanpa memperhatikan kearifan dan nilai-nilai lingkungan sehingga bencana pun menjadi langganan. Eksplorasi kayu yang terjadi telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Bahkan upaya-upaya tersebut sudah jauh dari kebiasaan yang pernah mereka praktikkan dahulu.

## Bencana Tangse: Dulu dan Kini

Bencana banjir yang menimpa Kecamatan Tangse beberapa tahun terakhir bukanlah yang pertama kali terjadi. Berdasarkan penuturan salah seorang Mukim di Kecamatan Tangse, pada era tahun 1971, bencana banjir bandang pernah terjadi di Kecamatan Tangse. Tetapi, bencana tersebut tidak sampai menelan korban ataupun merusak infrastruktur yang ada. Kehidupan masyarakat Tangse yang dekat dengan alam dan lingkungan kala itu membuat banjir bandang yang datang tidak menjadi musibah yang berarti. Mata pencaharian masyarakat yang mayoritas bertani membuat aliran sungai menjadi salah satu sumber utama aktivitas pertanian. Selain sebagai sumber pengairan dan irigasi, masyarakat Tangse juga menjadikan aliran sungai sebagai salah satu sumber teknologi pengolahan hasil panen secara tradisional. Ketika terjadi banjir, laju air yang datang berhasil dihambat oleh banyaknya kincir-kincir yang ada disepanjang aliran sungai tersebut, sehingga banjir yang pernah terjadi pada masa lalu tidak berubah menjadi bencana bagi masyarakat. Kini, mesin peralatan pertanian padi modern telah menggantikan teknologi klasik tradisional yang pernah dipraktekkan masyarakat Tangse dalam mengolah hasil panen mereka. Imam Mukim Layan mengatakan *“sekarang kincir sudah tidak ada lagi, orang sekarang giling padi tidak susah seperti dulu. Sudah banyak mesin giling padi, malah sudah sampai kerumah-rumah”*.

Beralihnya perhatian masyarakat dari aliran sungai akibat perubahan alat produksi secara sistematis mengalihkan perhatian masyarakat dari sungai itu sendiri. Ketika peralatan pertanian tradisional masih dominan digunakan, hampir setiap hari masyarakat bersinggungan dengan aliran sungai sehingga sampah kecil maupun besar yang mengganggu aliran sungai akan cepat dibersihkan. Namun saat ini peralatan pertanian modern telah “mengasingkan” perhatian masyarakat sehingga aliran sungai pun sudah tak seperti dulu lagi. Sampah-sampah kayu bertumpukan, limbah hasil penebakan liar menyumbat aliran dan pendangkalan pun terjadi. Ketika hujan turun deras, volume air bertambah, sampah kayu hasil penebangan terseret air dan akhirnya menghantam perumahan dan persawahan yang ada di sekelilingnya. Hingga menyeret Tangse



tenggelam dan berubah menjadi kawasan rawan bencana. Jika pada masa lalu bencana banjir bandang yang terjadi tidak begitu merugikan atau bahkan tidak dipandang sebagai bencana, tapi kini peristiwa banjir telah menjadi petaka bagi masyarakat. “*Tiada tahun tanpa bencana, tiada tahun tanpa banjir*”, demikian penuturan Tokoh Masyarakat Gampong Peunalom II.

### **Mitigasi Bencana di Kecamatan Tangse**

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 4 tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Salah satu elemen yang menjadi kunci dari pencegahan bencana adalah pemerintah daerah melalui aturan yang jelas terkait tata ruang wilayah. Dalam konteks ini, rencana pola ruang yang dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Pidie sebetulnya telah secara tegas mengklasifikasikan pola tata ruang dan wilayah yang ada, termasuk tata ruang dan wilayah untuk Kecamatan Tangse (Yamani dkk, 2015). Peraturan ini pada tataran implementasinya masih ditemukan kelemahan, terutama dalam hal penindakan atau penegakan hukum. Kawasan hutan lindung dan konservasi sebagai kawasan yang harus steril dari aktivitas penebangan liar, pada kenyataannya tidak demikian karena ternyata masih terjadi penebangan liar secara massif. Pada tahun 2012, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pidie, Ir M Hasan Yahya, menyebutkan lebih kurang 500 hektare kawasan hutan lindung di Kecamatan Tangse telah rusak akibat maraknya penebangan liar. Ia menambahkan bahwa dari luas keseluruhan hutan lindung Tangse 54.729 hektare, kini sudah mencapai 500 hektare yang telah gundul karena terus-terusan ditebang” (Lihat, Serambinews.com. “500 Hektare Hutan Lindung di Tangse Rusak”).

Secara normatif, mitigasi bencana dilakukan secara terus menerus oleh pihak pemerintah melalui BPBD Pidie maupun BNPB dengan turut melibatkan unsur-unsur lokal seperti LSM, pemerintah Gampong dan tokoh-tokoh setempat. Pemerintah melalui BPBD dan BNPB telah melakukan serangkaian sosialisasi

tentang mitigasi bencana. Sosialisasi tersebut dilakukan disekolah dan beberapa tempat atau daerah yang rawan maupun terdampak bencana. Bahkan papan-papan pengumuman tentang pentingnya menjaga hutan, menghentikan penebangan liar serta jalur-jalur evakuasi ketika bencana datang merupakan “objek” yang sangat mudah kita temui di sepanjang jalan di Kecamatan Tangse. Papan-papan pengumuman, himbauan dan arah ataupun rute evakuasi bencana sudah dapat kita lihat sejak memasuki perbatasan Kecamatan Tangse. Tetapi himbauan-himbau tentang bahaya menebang pohon ataupun dampak kerusakan alam bagi hanya menjadi plakat-plakat yang kehilangan makna. Karena dibelakang itu, aktivitas penebangan masih berlangsung dan bahkan didukung oleh “oknum-oknum” yang harusnya massif mengkampanyekan bahaya *illegal logging* bagi masyarakat. Selain itu, ada pula upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah datangnya bencana, yaitu dengan melakukan razia kepada para penebang liar. Namun menurut pengakuan beberapa responden, aksi razia yang dilakukan oleh pihak terkait terkesan tidak serius. Karena sebelum razia dilakukan, informasi terkait titik razia sudah menyebar kepada masyarakat dan tentunya para penebang kayu juga sudah mengetahuinya.

Komitmen pemerintah dan aparat pada tataran implementasi kebijakan yang lemah kemudian melahirkan respon negatif masyarakat terhadap pemerintah terkait aktivitas penebangan liar yang terjadi. Dalam survey yang dilakukan oleh Mujani (2016) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat Kecamatan Tangse dalam menjaga hutan berada pada kategori rendah, penanggulangan *illegal logging* pun masih belum memadai karena belum adanya program yang nyata serta sanksi bagi para pelaku *illegal logging* di Kecamatan Tangse tersebut. Belum lagi penegakan hukum yang lemah membuat aktivitas penebangan liar semakin menjadi-jadi. Bahkan, penebangan liar yang melibatkan oknum aparat penegak hukum telah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Tangse. “Tidak jarang pelaku-pelaku *illegal logging* tersebut di *support* oleh oknum-oknum tertentu sehingga aktivitas penebangan berjalan

dengan lancar dari proses penebangan hingga distribusinya” ungkap beberapa responden.

Dengan kondisi yang demikian, mitigasi bencana sebagai suatu upaya mengurangi resiko bencana di Kecamatan Tangse yang di inisiasi oleh pemerintah maupun masyarakat setempat menjadi kehilangan substansinya. Pada akhirnya mitigasi bencana tidak menjadi serangkaian upaya sistematis untuk menanggulangi resiko bencana yang pada ujung-ujungnya dapat menghilangkan datangnya bencana tersebut. “Proyek penyadaran” kepada para korban bencana pun sia-sia karena aktivitas pengundang bencana terus dilakukan “secara berjamaah”. Mitigasi bencana berubah menjadi rutinitas tahunan dan lebih menjadi tanggap darurat yang bermuatan ekonomis dimana bencana dianggap sebagai suatu “berkah” tersendiri. Jika terjadi bencana berarti bantuan akan datang, jika bantuan datang, berarti “proyek” tanggap darurat bencana siap dijalankan. “*Kalau sudah banjir di Tangse, tinggal kontek kantor; nyo ka banjir, peng jalan ka na*”, ujar salah seorang anggota Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Pidie.

### **Kearifan Lokal dan Peran Elit Agama**

Berdasarkan FGD dan wawancara mendalam yang dilakukan, ditemukan bahwa pada masa lalu pernah hidup suatu pengetahuan lokal yang bijaksana berkaitan dengan hubungan manusia dan hutan yang ada di Kecamatan Tangse. Salah seorang tetua Gampong layan dalam satu kesempatan FGD yang dilakukan mencoba mengingat kembali petuah-petuah lama atau syair yang dulu selalu dituturkan oleh para orang tua mereka dalam konteks berinteraksi dengan alam dan hutan. Namun apa daya, ingatan itu telah hilang dari benaknya. Beliau menceritakan bahwa dulu sering disampaikan kepada mereka dimasa muda pepatah aceh atau yang lebih dikenal dengan sebutan hadih maja itu. “*dulu ada, banyak syair atau hadis maja tentang, menjaga lingkungan dan hutan, sebentar ya, saya ingat-ingat dulu... wah sudah gak ingat lagi*” tutur Teungku Abu Bakar.

Hilangnya pengetahuan masyarakat terkait kearifan lokal tentang menjaga lingkungan hingga seorang tetua kampung pun tidak mampu mengingatnya lagi, mengindikasikan bahwa kearifan lokal itu benar-benar sudah tenggelam dan mati. Masyarakat Tangse sudah tidak pernah lagi mempraktekkan budaya bertutur untuk melanggengkan kearifan lokal yang dulu mereka ketahui dan praktekkan. Jika sekelas tetua kampung saja sudah tidak ingat, apalagi generasi muda. Maka tidak berlebihan kemudian jika dikatakan bahwa kearifan lokal di Tangse sebetulnya telah tenggelam dan itu terjadi karena rutinisasi kearifan lokal sudah tak pernah dijalankan dan aksi refleksi pun tak pernah ada.

Selain kearifan lokal dalam tutur, ketua Mukim Layan juga menyampaikan bahwa pada masa lalu, hukum adat yang berbicara tentang pelestarian hutan demi mencegah hadirnya bencana dalam masyarakat juga menjadi pengetahuan yang hidup dalam masyarakat. Kearifan lokal tersebut berbentuk norma adat tentang larangan menebang kayu sembarangan, karena sejak dulu sebenarnya masyarakat telah menyadari bahwa penebangan hutan akan mengundang bencana. Norma adat atau kearifan lokal tersebut adalah larangan menebang kayu 200 depa dari bibir sungai dan 50 depa dari lereng gunung. Menurut kepala Mukim Layan, larangan ini tercantum pada hukum adat masa lalu. Sehingga pernah suatu ketika, unsur adat, elit agama dan tokoh masyarakat membuat *draf* dan kesepakatan bersama terkait larangan menebang pohon yang bersumber dari hukum adat tersebut. Tetapi kesepakatan bersama yang di inisiasi oleh unsur adat dan elit agama tersebut tidak pernah dijalankan dan draft yang mereka susun tidak mendapat respon positif dari pemangku kebijakan. Akhirnya kearifan lokal tentang larangan menebang pohon sembarangan tersebut kini juga hanya menjadi kenangan.

Selanjutnya, terkait dengan peran elit agama, dalam konteks masyarakat Tangse pada dasarnya elit agama atau *Teungku* secara kultural masih dapat diidentifikasi sebagai kelompok strategis yang masuk dalam kategori elit sublimatif. Kemampuan elit agama Tangse dalam bidang agama membuat

legitimasi mereka secara kultural masih diakui oleh masyarakat secara umum. Mimbar-mimbar pengajian dan moment keagamaan masih didominasi oleh peran elit agama lokal atau *Teungku* dayah yang ada di Kecamatan Tangse. Bahkan setiap Gampong yang ada di Kecamatan Tangse terdapat dayah yang dipimpin oleh seorang *Teungku* tempat masyarakat menimba ilmu agama. Otoritas kultural yang dimiliki oleh elit agama sebagai kelompok strategis sangat berperan dalam denyut nadi masyarakat Tangse. Jika warga Tangse ditanya siapa ulama yang dihormati di Gampong ini, mereka akan menjawab *Teungku* dayah, demikian pula elit integratif yang ada seperti aparat pemerintah yang juga mengatakan bahwa *Teungku* dayah adalah orang yang dihormati (Hasil FGD, September 2018).

Sebagai kelompok strategis, elit agama di Tangse sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah dan upaya dalam hal mencegah terjadinya bencana. Beberapa peran yang sudah dilakukan oleh elit agama terkait dengan upaya pencegahan bencana adalah bekerjasama dengan ketua adat setempat dan tokoh masyarakat dalam merumuskan kesepakatan bersama terkait dengan penebangan hutan. Sebagaimana dijelaskan oleh Fakhruddin Umar:

*“Menyangkut dengan masalah agama, hukum adat ada yang berbicara untuk mencegah bencana. Jadi waktu itu ada kami buat draf yang diketuai oleh imam mukim. Draft qanun tentang masalah penebangan kayu di hulu sungai yang mengacu pada hukum di masa lalu. Jadi aturan itu sudah kami buat bersama-sama, tapi setelah kami ajukan aturan itu, di DPR aturan itu jadi tidak jelas dan tidak ditindak lanjuti”*(Wawancara dengan Bapak Fachrudin Umar, Oktober 2018)

Selain merancang qanun, peran lainnya yang dimainkan oleh elit agama adalah memberikan teguran pada para penebang liar di pegunungan Tangse, membahasnya dalam mimbar-mimbar khutbah dan memasukkan materi pemahaman bencana dalam pengajian-pengajian. Namun hal itu masih direspon negatif oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya posisi struktural mereka di masyarakat dan lemahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Selain itu, sirkulasi ekonomi yang mendukung terlaksananya kegiatan keagamaan yang dipimpin oleh para ulama juga masih

bersumber dari aktivitas-aktivitas penebangan liar. Kondisi ini semakin melemahkan otoritas ulama saat berhadapan dengan isu penebangan liar. *“Peran kami sebagai pemangku adat dan agama sudah mengusahakan tapi adat tidak didengar, apa yang kami bilang tidak didengar. Adat tidak ada kekuatan hukumnya, tidak ada penjara kalau melanggar hukum adat, denda pun sudah tida didengar sekarang”*, kata salah satu elit agama lokal di Tangse.

Meskipun demikian, dalam aspek sosial keagamaan elit agama masih menjadi referensi utama masyarakat, hal itu dapat dilihat dalam beberapa kegiatan yang ada dalam masyarakat di mana kaum ulama tetap menjadi aktor utama dalam kegiatan tersebut seperti dalam acara pernikahan, acara adat, kematian dan sosia keagamaan lainnya. Tetapi jika terkait dengan penebangan hutan yang secara pasti mengundang akan datangnya bencana, petuah-petuah keagamaan masih belum didengarkan oleh masyarakat. Alasan ekonomi masih menjadi narasi utama yang membuat petuah keagamaan dari para elit agama tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Perekonomian masyarakat yang masih sangat tergantung pada hutan dan kayu serta belum ada alternatif lain sebagai penggantinya, “memaksa” masyarakat untuk melakukan penebangan liar demi memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun aktivitas itu membahayakan hidup mereka sendiri. Salah seorang elit pemerintah menceritakan;

*“Contoh Gampong Blang Pandak, sekarang tidak ada lagi yang mau bertani, khusus mereka menebang kayu padahal resikonya tinggi, tahun kemarin (2017) ada 2 orang meninggal tertimpa pohon kayu, memang itu resiko, tapi hari ini meninggal, belum genap tujuh hari sudah kehutan lagi”*(Hasil FGD bersama Pemerintah Gampong, September 2018)

Bukan hanya warga biasa, para elit lokal juga terlibat di dalamnya, tak terkecuali oknum elit agama yang ikut terseret dalam “lingkaran setan” tersebut. Dalam konteks ini, keterlibatan elit agama bisa didapatkan dalam dua jenis; pertama sebagai aktor yang melakukan penebangan dan kedua sebagai pihak yang merasakan hasil dari penebangan itu. *“Bagaimana (ulama) mau melarang kami motong kayu, kalau warga tidak potong kayu, maka tidak ada uang masuk. Kalau tidak ada uang, bagaimana kami mau menyumbang untuk*

*keberlangsungan kehidupan dayah...*" ungkap salah seorang tokoh masyarakat Gampong Peunalom I.

Apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tersebut menggambarkan ada semacam ikatan yang sulit untuk dihindari. Pekerjaan warga sebagai penebang atau hanya sebagai pengangkut kayu hasil tebang illegal menjadi sumber pendapatan yang menggerakkan roda perekonomian. Uang yang didapatkan kemudian didistribusikan untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk biaya pendidikan anak-anaknya yang mengaji di dayah atau pesantren. Bukan hanya itu, warga juga menyumbang untuk biaya operasional dayah agar lembaga pendidikan informal tersebut terus bisa berjalan. Kondisi ini secara tidak langsung sangat membatasi peran ulama untuk berbicara bahwa penebangan yang dilakukan secara illegal adalah perbuatan terlarang karena mendatangkan mudharat bagi masyarakat.

Kala dominasi elit agama hanya bertumpu pada kemampuan politik dan kultural tanpa ditopang dominasi secara ekonomi, maka implikasinya adalah terjadi resistensi di kalangan agensi jika ada pihak otoritas agama yang melarang penebangan liar. Resistensi yang dihadirkan bisa dalam bentuk sangat sederhana, yaitu masyarakat hanya pura-pura mendengar ketika berhadapan langsung dengan pihak yang memiliki otoritas, namun tidak mematuhi larangan-larangan disampaikan. Selain dari faktor di atas, perlawanan semacam ini bisa terjadi karena masyarakat menganggap bahwa hutan yang mereka tebang adalah basis material yang sebenarnya memang hak mereka. Anggapan ini terjadi karena ekosistem hutan itu berada dalam wilayah yang menjadi tempat tinggal mereka.

Jika ditarik lebih jauh, melemahnya otoritas elit agama dalam kehidupan masyarakat Aceh saat ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran peran dan sakralitas elit agama dalam masyarakat Aceh. Terutama pasca konflik dan tsunami dimana kaum elit agama atau ulama tidak lagi mampu memainkan otoritas layaknya Aceh pada masa lalu. Dalam konteks Aceh secara umum, perubahan dalam sistem kekuasaan dan tata pemerintahan sejak Aceh bergabung dalam Negara kesatuan Republik Indonesia menjadi alasan utama lahirnya

kondisi tersebut. Kedua, pelembagaan yang terjadi di kalangan ulama sendiri, misalnya HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh), MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), dan MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh), di mana masing-masing lembaga tersebut mengklaim diri sebagai kelompok yang selayaknya disebut "ulama". Ketiga, adanya kontestasi peran ulama di Aceh. Tarik ulur kepentingan di kalangan internal ulama menjadi faktor penting akan hilangnya legitimasi dan kekuatan peran ulama secara umum di masyarakat saat ini.

## Penutup

Kondisi konflik dan bencana tsunami yang terjadi di Aceh secara sosiologis menjadi salah satu penyebab lahirnya bencana yang terus menerus di kecamatan Tangse. Konflik dan Tsunami menjadi dua peristiwa dominan yang mengubah pola mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Tangse. Peristiwa tersebut telah melahirkan pola pikir instan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga membuat masyarakat sulit keluar dari aktivitas penebangan liar yang menciptakan efek mata rantai ekonomi dan membawa berkah bagi geliat perekonomian masyarakat meski resiko bencana yang kemudian diterima akibat aktivitas tersebut jauh lebih besar.

Kearifan lokal masyarakat yang seharusnya dapat menjadi benteng malah sudah terlebih dahulu tenggelam. Kearifan lokal di Tangse tenggelam dan mati karena rutinisasi kearifan lokal sudah tak pernah dijalankan dan aksi refleksi pun tak pernah ada. Akhirnya kearifan lokal tentang larangan menebang pohong sembarangan serta budaya tutur yang dulu pernah menjadi "kompas" masyarakat dalam memperlakukan alam kini hanya menjadi kenangan. Demikian pula dengan eksistensi elit agama sebagai agen sosial. Ketika elit agama berhadapan dengan aktivitas penebangan liar yang mengundang bencana, otoritas yang mereka miliki menjadi sangat lemah karena "berkah" ekonomi juga dinikmati oleh mereka. Petuah-petuah keagamaan yang mereka sampaikan terkait pelestarian hutan dan lingkungan menjadi kehilangan makna, karena alternatif ekonomi masyarakat yang lain memang belum tersedia.



Hal ini menjadi semakin parah karena orang-orang yang diharapkan menjadi benteng untuk mencegah pekebangan liar malah menjadi bagian dari aktivitas tersebut. Akhirnya elit agama sebagai kelompok strategis juga ikut terjebak dalam lingkaran “ekonomi kayu” tersebut.

Terakhir, proses mitigasi bencana belum dilakukan secara komprehensif, yang terjadi selama ini hanya terkait pada tanggap darurat paska bencana, sedangkan respon terhadap sumber bencana masih terabaikan. Padahal mitigasi bencana juga seharusnya terkait dengan upaya terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan aktor lokal yang potensial untuk melakukan rekayasa sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk keluar dari “lingkaran ekonomi kayu” yang menjebak masyarakat Tangse masuk dalam pusaran bencana, selain penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penebangan liar dan aktor-aktor atau oknum yang terlibat, juga diperlukan intervensi dan perhatian serius dari pemerintah untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat dengan cara memaksimalkan potensi-potensi yang ada seperti; perkebunan, perikanan dan palawija sebagai alternatif perekonomian masyarakat. Dan hal ini tentunya dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap melibatkan aktor lokal yang potensial.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2006. *Dialektika Natur, Kultur, dan Struktur: Analisis Konteks, Proses, dan Ranah dalam Konstruksi Bencana*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Antropologi Pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tanggal 13 November 2006.
- Achmad Yamani, Ernan Rustiadi, Widiatmaka. 2015. "Evaluasi Pola Ruang Berbasis Kerawanan Banjir di Kabupaten Pidie". *Tata Loka*, 17(3): 130-146
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Daeng, Hans J. 2012. *Manggarai Daerah Sengketa Antara Bima dan Goa, dalam Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan; Tinjauan Antropologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal, Sanapiah. 1989. *Fotmat-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Hanafiah, Junaidi. 2015. "Tangse yang Kini Akrab Bencana". Diakses pada tanggal 25 September 2017 dari situs: <http://www.mongabay.co.id/2015/12/20/Tangse-yang-kini-akrab-bencana/>.
- Humaedi, M. Alie. "Disaster Management Based on The Perspective of InterReligious Connection and Local Wisdom". *Analisa Journal of Social Science and Religion*. 22(2)
- Kecamatan Tangse dalam Angka tahun 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie. Diakses dari situs: <https://pidiekab.bps.go.id/publication/2017/09/20/454d93edc58d82d0fb8da3cc/kecamatan-tangse-dalam-angka-2017.html>
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sartini. 2004. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat". *Jurnal Filsafat*, 37: 111-120.
- Serambinews.com. "500 Hektare Hutan Lindung di Tangse Rusak". Diakses pada oktober 2018 dari situs: <http://aceh.tribunnews.com/2012/03/06/500-hektare-hutan-lindung-di-Tangse-rusak>

## KEBIJAKAN PANGAN DAN TRADISI LOKAL:

Studi tentang Dampak Kebijakan Pengelolaan Pangan Daging terhadap Keberadaan Tradisi *Uwer* di Kabupaten Gayo Lues

**Abdullah Akhyar Nasution**

Program Studi Antropologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe  
*4n4st.ime@gmail.com*

### Abstract

As a basic necessity, the availability of foodstuffs requires the state to be involved in its fulfillment through regulation. In carrying out of the functions, the state also makes regulations on other aspects. That condition, sometimes, raises contradictory things at the stage of implementation, especially at the local level. Culturally, the system of the food supply of proteins sourced from buffalo practiced by many tribes in Indonesia including by the Gayo community in Gayo Lues District. In Gayo, the system of traditional buffalo farms is called *Uwer*. It is interesting to see how the food policy has contributed to the local cattle tradition. This is the problem in this study. As a preliminary study result, data on research gathered through work fields and literature studies. Results of the study showed that there are many food policies at the national level that directly or indirectly contribute to the existence of traditional livestock patterns including farms that are practiced by the Gayo community. On its development, the Gayo community has also made modifications to the *Uwer* system to response the social and cultural changes. If not accompanied by protection and conservation efforts, local buffalo livestock systems that reloaded with local wisdom values will potentially lose or abandoned by the public.

**Keyword:** *Food Policy, Pureweren, Local Wisdom*

### Asbtrak

Sebagai kebutuhan dasar, ketersediaan bahan pangan mengharuskan negara terlibat dalam pemenuhannya yang diwujudkan melalui regulasi. Hanya saja dalam menjalankan fungsinya negara juga membuat regulasi tentang aspek lainnya. Kondisi demikian, adakalanya memunculkan hal yang kontradiktif pada tahap implementasi terutama di tingkat lokal. Secara kultural, sistem penyediaan bahan pangan protein hewani bersumber dari kerbau telah dipraktekkan oleh banyak suku di Indonesia termasuk oleh masyarakat Gayo di Kabupaten Gayo Lues. Di Gayo, sistem peternakan kerbau tradisional disebut dengan *uwer*. Menjadi hal yang menarik melihat bagaimana kebijakan pangan yang ada ikut memengaruhi tradisi beternak di tingkat lokal. Inilah yang menjadi rumusan masalah dalam studi ini. Hasil studi awal memperlihatkan bahwa ada banyak regulasi pangan di tingkat nasional yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi eksistensi pola peternakan tradisional termasuk

peternakan yang dipraktikkan oleh masyarakat Gayo, yang dikenal dengan *uwer*. Dalam perkembangannya, masyarakat gayo juga melakukan modifikasi pada sistem *uwer* guna menyiasati perubahan sosial dan budaya. Jika tidak dibarengi dengan upaya proteksi dan konservasi, sistem peternakan kerbau lokal yang sarat akan nilai-nilai kearifan lokal akan berpotensi hilang atau ditinggalkan oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pangan, Pureweren, Kearifan Lokal

## Pendahuluan

Pangan adalah salah satu persoalan penting dalam kehidupan manusia. Keterbatasan alam menyediakan pangan menjadi perhatian banyak kalangan dalam sejarah peradaban manusia. Robert Malthus (1798) seorang ahli demografi dalam dalam sebuah bukunya memprediksi kepunahan manusia sebagai akibat dari keterbatasan persediaan pangan. Secara sederhana, Malthus menceritakan bahwa mengingat pertumbuhan populasi manusia yang tumbuh layaknya deret ukur, sementara ketersediaan bahan pangan hanya tumbuh seperti deret hitung maka pada satu waktu manusia akan punah dengan sendirinya.

Apa yang dikhawatirkan Maltuhus pada dasarnya juga menjadi persolan yang diperhatikan oleh banyak kalangan bahkan hingga kini. Bagi mereka keterbatasan pangan menjadi salah satu faktor penyebab kepunahan manusia. Dengan kondisi seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan bahan pangan bukanlah masalah yang baru. Tidak itu saja, kita juga jadi mengerti bahwa masalah ketersediaan pangan adalah masalah universal yang selalu muncul di setiap era manusia.

Persoalan ketersediaan pangan sampai saat ini benar-benar menjadi masalah di banyak tempat di muka bumi. Ini dikarenakan ada semacam kesepakatan bahwa pangan murah sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Pemikiran neo liberal ini muncul didasarkan pada asumsi dari pada memproduksi, biarlah negara miskin membeli pangan dari negara kaya yang bisa memproduksi. Akibatnya banyak negara tergantung pada beberapa negara semata. (Tujan, 2007). Pembahasan tentang ketersediaan pangan saat ini terkesan

masih hanya seputar ketersediaan sumber karbohidrat semata. Anggapan ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Dalam banyak kebudayaan masyarakat, bahan pangan utama selalu identik dengan unsur karbohidrat dan hal itu kemudian memacu manusia untuk membangun sistem pengetahuan, ekonomi yang berpusat pada cara bagaimana ketersediaan karbohidrat disediakan. Selain bahan makanan yang mengandung karbohidrat, beberapa produk makanan yang mengandung unsur protein juga memiliki peran penting. Oleh karena karbohidrat dan protein sebagai bahan makanan yang harus dianggap “berpasangan”, maka keberadaan kedua bahan pangan tersebut jelas menjadi penting. Hal ini paling tidak terlihat dari sistem mata pencaharian tradisional yang selalu menempatkan usaha menjamin ketersediaan kedua jenis sumber makanan tersebut menjadi pusat dari aktivitas ekonomi manusia.

Jika banyak kalangan selalu berfokus pada sistem penyediaan bahan pangan berunsur karbohidrat, maka perbincangan tentang sistem penyediaan bahan pangan berunsur protein masih hanya menjadi bahan diskusi terbatas dari kalangan tertentu. Hal ini dapat dimaklumi, karena ketersediaan protein memiliki dua sumber yaitu; protein nabati yang bersumber dari tanaman dan protein hewani, yang bersumber dari hewan.

Terkait dengan ketersediaan pangan, Indonesia merupakan salah satu negara yang juga mengalami masalah terkait penyediaan bahan makanan yang berupa unsur protein (baik nabati maupun hewani) dalam kurun beberapa tahun terakhir. Laporan Reily mengungkapkan bahwa:

“Selama tahun 2018 pasokan daging lokal masih belum bisa memenuhi kebutuhan daging masyarakat. Merujuk data dari Kementerian Pertanian, Reily menyebutkan total produksi daging sapi nasional sepanjang 2018 diperkirakan mencapai sekitar 403.668 ton dengan total kebutuhan mencapai 663.290 ton. Dengan kondisi semikian, maka kemampuan internal Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan daging sapi masyarakat baru mencapai 60,9% saja. Di tahun-tahun sebelumnya, gejala yang sama juga terjadi”. (Reily, 2018)

Meningginya permintaan akan sumber protein yang mayoritas bersumber dari daging hewan yang bisa saja diakibatkan dari peningkatan kesejahteraan dan atau pertambahan jumlah penduduk. Namun satu hal yang pasti, dalam

beberapa tahun terakhir kebutuhan akan protein hewani tersebut belum bisa diatasi. Sekalipun demikian, harus dipahami bahwa upaya untuk mengatasi kebutuhan protein hewani di beberapa daerah secara potensial bisa diatasi. Hal ini dikarenakan di wilayah tertentu dari bagian negara ini terdapat sistem produksi dan distribusi sumber protein hewani yang juga menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat tersebut. Namun demikian, sistem peternakan lokal tersebut belum bisa ikut berkontribusi banyak untuk ikut menyumbang secara nasional.

Merujuk pada kondisi dimana produk ternak sangat dibutuhkan dalam menopang kehidupan tubuh manusia tersebut (Suryana, 2007) maka negara harus memberi perhatian pada sistem produksi sumber protein hewani. Di tingkat lokal, salah satu sistem peternakan yang potensial dikembangkan untuk ikut menyediakan pangan protein adalah sistem peternakan kerbau lepas liar yang dipraktekkan oleh masyarakat Gayo di Kabupaten Gayo Lues. Secara kultural sistem beternak kerbau lepas liar oleh masyarakat Gayo dikenal dengan istilah *Pureweren*. Upaya mengkaji keberadaan sistem peternakan lokal dalam kerangka kebijakan pangan secara nasional menjadi sangat penting dilakukan. Tidak hanya itu, pembahasan tersebut juga menarik jika dilihat dari perspektif bagaimana kebijakan nasional kerap berpotensi menggerus sistem peternakan kerbau, sebagaimana yang dialami oleh masyarakat Gayo di Kabupaten Gayo Lues.

Merujuk pada gambaran yang telah diuraikan sebelumnya, maka upaya mengkaji tentang ragam kebijakan pengelolaan pangan berupa daging dan kaitannya dengan sistem peternakan lokal menjadi sangat penting dilakukan. Tidak hanya itu, pembahasan tersebut juga menarik jika dilihat dari perspektif bagaimana kebijakan pengelolaan pangan berupa daging termasuk kebijakan melalui program pengintroduksian lembu akan menggerus sistem peternakan kerbau yang secara kultural telah dipraktekkan oleh masyarakat Gayo. Terkait dengan narasi yang telah disampaikan di atas, maka dalam studi isu yang menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana ragam kebijakan pengelolaan

pangan berupa daging berkiatan dengan dengan potensi hilangnya tradisi beternak kerbau secara tradisional di Gayo Lues.

### Metode Penelitian

Sebagai sebuah studi awal, permasalahan yang diajukan dalam studi ini akan dijawab dengan menggunakan metode *field work* dan studi pustaka. *Field work* diperlukan untuk mengumpulkan data-data primer terkait kondisi umum praktek peternakan kerbau secara tradisional yang dipraktekkan oleh masyarakat Gayo Lues. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan selama *field work* berupa observasi dan wawancara. Sementara itu, data skunder yang diperlukan diperoleh melalui sumber sekunder yang bisa diakses oleh penulis. Sebagian besar data sekunder adalah data menyangkut kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Data *field work* dan studi kepustakaan dalam studi ini selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis atas data regulasi dilakukan dengan mengadopsi metode analisis kebijakan yang kemudian dikolaborasikan dengan metode etnografis. Sekalipun tidak secara utuh, kedua metode tersebut secara berbarengan dipergunakan guna bisa menjawab rumusan masalah selugas mungkin. Dengan demikian kejelasan argument tentang masalah yang dibahas sedapat mungkin diperoleh untuk kemudahan dinarasikan sebagaimana yang dituangkan dalam tulisan ini.

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### ***Uwer*: Sebuah Kearifan Lokal Terkait Penyediaan Pangan di Gayo Lues**

Sangat sedikit sekali literature tentang *Uwer*. Penelusuran di dunia maya hanya memunculkan beberapa publikasi yang menggunakan kata *Uwer*. Hanya saja publikasi tersebut tidak menjelaskan dengan detail apa dan bagaimana *uwer*. Hasil observasi dan wawancara di lapangan yang dilakukan selama *field work* serta merujuk hasil penelusuran atas publikasi yang ada, diketahui bahwa *pureweren* adalah sistem perternakan kerbau yang dipraktekkan oleh masyarakat Gayo di Dataran Tinggi Gayo. Kata *Pureweren* sendiri adalah kata yang berasal dari kosa kata *Uwer*, yang artinya kandang. Pada awalnya tradisi *uwer*

dipraktekkan oleh masyarakat Gayo di tiga kabupaten yang merupakan daerah *culture area*-nya masyarakat Gayo, yaitu; Kabupaten Aceh tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.

Sebagaimana dijelaskan, Uwer sendiri adalah kosa kata Gayo yang artinya kandang. Sekalipun berarti kandang, dalam praktekkan *original*-nya dahulu peternakan kerbau di gayo tidaklah memakai kandang. Kandang saat itu hanya terdiri dari sebuah bangunan yang menjadi tempat peternak memberi mineral berupa garam pada gerombolan ternaknya. Kandang dalam tradisi ternak kerbau tradisional di Gayo memang tidak dipakai sebagai tempat memelihara ternak sebab model pemeliharaan yang sejak dulu dipraktekkan adalah dengan melepaskan kerbau di alam atau hutan sehingga polanya adalah lepas liar. Saat ini tradisi melapsa liat ternak kerbau hanya dapat di jumpai di Gayo Lues. Untuk menjamin agar kerbau yang dilepaskan mau kembali ke lokasi awal dimana ternak tersebut dilepaskan, biasanya pemilik melalui pawang akan memberikan mineral berupa garam kepada kerbau secara periodic atau berkala.

Hasil wawancara dengan pawing diketahui bahwa jadwal pemberian garam jangka waktunya bisa sebulan sekali, tiga bulan sekali atau waktu lainnya sesuai pengetahuan sang pawang. Perlu diketahui bahwa posisi pawang dalam sistem *uwer* lepas liar memang sangat sentral. Pawang ini selain bertanggung jawab dalam proses melepas ternak, pawang juga merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk membangun ikatan dengan gerombolan ternak. Ikatan itu dibangun secara intens salah satunya melalui pemberian garam kepada ternak secara berkala tersebut. Tidak itu saja, dalam sistem pengetahuan lokal, pawang juga dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan gaib/magis dalam mengontrol keberadaan gerombolan kerbau yang menjadi tanggungjawabnya. Hal penting lainnya dari peran pawang juga dapat dilihat saat mana kerbau akan dipanen. Saat pemilik kerbau memerlukan kerbau untuk dijual atau dikonsumsi, kehadiran pawing menjadi sangat penting untuk menangkap kerbau liar yang dikuasainya. Pawing adalah satu-satunya orang yang akan bisa mengumpulkan kerbau liar milik pemodal untuk kemudian di-*panen*.



Berdasarkan literature dan hasil wawancara penulis dengan seorang pawang yang berhasil dijumpai, diketahui bahwa kehidupan orang Gayo dahulunya tidak akan pernah jauh dari kerbau. Pawang yang dijumpai juga menjelaskan bahwa sejak kecil ia melihat kehidupan orang Gayo bersandar pada peternakan kerbau dalam semua aspek. Mau menikah, jual kerbau dan pakai kerbau. Mau bangun rumah orang Gayo jual kerbau. Mau menyekolahkan anak, orang Gayo juga jual kerbau. Saat akan menunaikan ibadah haji-pun orang Gayo juga akan jual kerbau. Pernyataan singkat ini jelas membantu kami memahami bagaimana posisi kerbau di masyarakat Gayo. Bila dahulunya Uwer dengan model lepas liar itu masih dapat dijumpai di hampir semua kabupaten di dataran Tinggi Gayo termasuk di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues. Namun demikian, saat ini praktek uwer model lepas liar ini hanya bisa dijumpai di Kabupaten Gayo Lues. Dari beberapa kecamatan di Gayo Lues, Uwer lepas liar dapat dijumpai di Kecamatan Terangun dan sebagian kecil di Rikit Gaib.

Sebagaimana disebutkan, peternakan kerbau yang dipraktekkan sebagian masyarakat di Kecamatan Terangun dan Rikit Gaib, berbeda polanya dengan peternakan di wilayah lain. Ini dikarenakan di kedua kecamatan inilah pola *uwer* original yang lepas liar tersebut masih dapat dijumpai. Dengan sistem uwer tersebut, para pemilik atau pemelihara kerbau biasanya tidak mencari makanan kerbau, tidak membuat kandang, serta tidak setiap hari melihat kerbau miliknya. Ternak dilepaskan liar di alam (hutan) dan jika ada keperluan tertentu barulah kerbau-kerbau tersebut "dipanggil" oleh pawang untuk dikumpulkan agar bisa dijual atau dikonsumsi.

Setiap kelompok hewan ternak yang dilepasliarkan di hutan ditanggungjawab oleh seorang "pawang". Kerbau-kerbau liar tersebut hanya akan dikumpulkan saat akan "dipanen" atau dipakai jasanya untuk mengolah sawah. Hasil studi di lapangan juga menunjukkan bahwa proses mengumpulkan ternak kerbau yang liar tersebut untuk di kontrol dan dipanen biasanya juga diikuti dengan ritual mistis, seperti membakar kemenyan, membacakan rapalan mantra dan membuat selongsung. Semuanya harus dipimpin oleh pawang kerbau. Kerbau-kerbau yang telah berbulan atau abhakan bertahun-tahun

dilepas akan bisa dipanggil kembali oleh sang pawang. Dalam banyak kisah disebutkan bahwa kerbau yang dilepas pemiliknya di hutan tidak bisa ditangkap oleh orang lain selain pemiliknya melalui pawang.

Dahulu, gerombolan kerbau liar yang diternak dengan menggunakan jasa "Pawang" juga digunakan untuk membantu mengolah sawah. Puluhan atau ratusan ekor kerbau dalam satu gerombolan akan diarahkan oleh pawang ke lahan persawahan di saat musim tanam akan dimulai. Di areal persawahan tersebut, kerbau-kerbau akan dipandu untuk menginjak-injak sawah yang sebelumnya sudah digenangi air. Akibat pijakan puluhan atau ratusan kerbau, lahan sawah akan menjadi lunak sebagaimana lahan yang dibajak. Jika dianggap sudah layak untuk ditanami, maka gerombolan kerbau liar tersebut akan dipandu untuk kembali ke hutan. Namun penggunaan jasa kerbau untuk menginjak-injak sawah agar dapat ditanami saat ini sudah tidak dipakai lagi. Pembajakan sawah dengan bajak dan traktor sudah mengambil alih peran gerombolan kerbau itu.

Dalam perkembangan saat ini, praktek uwer telah mengalami modifikasi. Dalam pengamatan awal, setidaknya ada 4 sistem *uwer* yang dapat dijumpai di Datraan tinggi Gayo:

#### 1. *Uwer* dengan pola lepas liar

Dengan system ini ternak kerbau dilepasliarkan di satu kawasan hutan dengan ritual tertentu dengan titik pelepasan ditandai dengan adanya pondok/kandang. Pondok/ kandang tersebut biasanya berfungsi juga sebagai tempat untuk memberi kerbau unsur mineral berupa air garam dalam kurun waktu tertentu. Namun yang kutanggap untuk mengumpulkan kerbau yang dilepasliarkan tersebut tidaklah harus di pondok tapi bisa di kawasan lain dalam wilayah hutan tergantung keputusan sang pawang.

#### 2. *Uwer* dengan pola lepas siang dan malam dikandangan

Sistem ini relatif sama dengan uwer lepas liar, hanya saja kawasan ternak saat sore hari akan kembali dengan sendirinya ke kandang yang telah dipersiapkan. Dengan system ini ternak kerbau dilepaskan di satu kawasan

tertentu pada saat siang hari. Namun pada saat malam hari kawanan ternak kerbau tersebut akan masuk ke kandang yang lokasinya berada dalam satu lahan yang dipagar dengan ciri adanya sebuah pondok untuk tempat berkumpul kerbau. Uwer versi ini masih memberi ruang kerbau untuk menjelajah karena pada waktu tertentu kawanan kerbau juga kerap tidak pulang karena mencari makan di wilayah yang relatif jauh namun akan kembali ke kandang. Pengawasan kawasan ternak pada uwer

### 3. *Uwer* dengan pola kandang luas

Peternakan ini ditandai dengan adanya pelepasan hewan ternak dalam satu lahan. Agar tidakkan merusa lading atau lahan orang lain, lahan tempat beternak kerbau tersebut dibuat agar dengan beragam bahan. Ada pagar yang dibuat dari kayu, kawat dan ada kalanya hanya berbahan bambo. Ternak kerbau ditempatkan dalam kawasan yang telah dipagar tersebut dengan disediakan pondok berteduh. Pada uwer versi ini, kawanan ternak tidak dilepaskan sehingga sang pemilik atau penjaga harus menyediakan pakan buat kawanan ternak setiap hari.

### 3. *Uwer* dengan pola kandang intensif.

Pola peternak ini biasanya ditandai penggunaan kandang batray dimana disetiap kandang akan ada hewan ternak. Tujuan dari ternak ini biasanya hanya menggemukan untuk dipanen dagingnya atau dijual dalam kurun waktu tertentu. Pemilik atau penjaga bertanggung jawab untuk mencari dan memberi pakan pada ternak yang dikandangkan. Ciri lain dari hewan yang dipelihara model ini biasanya hidung kerbaunya telah dilubangi untuk memudahkan mengendalikannya.

## **Regulasi Pangan dan Non Pangan pada Sistem Ketahanan Pangan Lokal: *Kasus Uwer di Gayo***

Diakui atau tidak, ada banyak regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang secara langsung terkait dengan upaya internal negara dalam menjamin ketersediaan pasokan daging ternak besar, Sapi dan Kerbau. Keberadaan

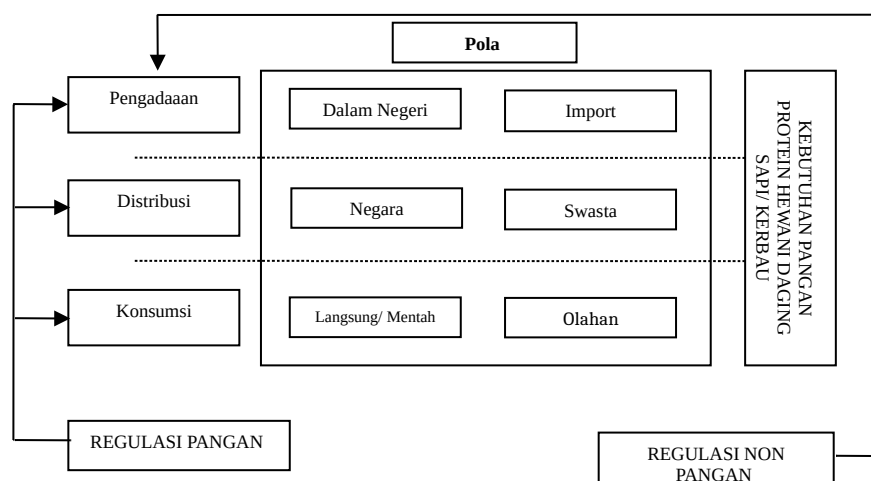
regulasi tersebut jelas-jelas menunjukkan isu ini merupakan isu public yang harus dikelola. Selain banyaknya pihak yang terlibat dan berkepentingan, urgensi daging sapi dan kerbau bagi kehidupan kita jelas merupakan alasan mengapa masalah ini menjadi mendesak untuk diatasi. Sekalipun demikian “rapat” regulasi mengatasi keterbatasan pasokan daging, namun pengaturan aspek lain dari kehidupan berbangsa juga menjadi sangat penting diperhatikan. Oleh karena itu, perhatian pada regulasi yang terkesan tidak memiliki hubungan dengan proses ketersediaan pangan secara nasional namun ikut mempengaruhi kemampuan dalam negeri untuk menyediakan stok keutuhan daging menjadi sangat perlu dilakukan.

Harus dipahami bahwa secara cultural, setiap daerah di Indonesia memiliki sistem tradisional yang ikut menjamin ketersediaan protein hewan besar untuk dikonsumsi. Sistem tersebut telah teruji ratusan tahun bisa menyediakan kebutuhan daging lokal. Salah satu sistem tersebut adalah pola peternakan kebau dan sapi yang telah dipraktekkan secara turun temurun. Hanya saja seiring dengan lahirnya kebijakan dan arah pembangunan yang hendak dicapai, maka keberadaan sistem tersebut mulai ikut berubah. Salah satu regulasi yang banyak mempengaruhi sistem ketersediaan pangan adalah undang-undang Otonomi Daerah. Kebijakan negara untuk mendistribusikan sebagian kewenangannya ke pemerintah daerah telah mendorong pemerintah daerah untuk terpacu meningkatkan pertumbuhan daerahnya masing-masing. Upaya massif yang terlihat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya memacu pendapatan asli daerah adalah dengan mengatur ulang pola pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Salah satu wujud nyata adalah mendorong privatisasi lahan-lahan yang ada. Pada kondisi demikian, pola peternakan lepas liar yang juga banyak dipraktekkan oleh masyarakat di nusantara mulai tidak mendapat tempat. Pada dasarnya mengecilnya lahan peternakan sistem lepas liar juga sudah terjadi di periode tahun 1980-an. Pada periode itu, pembukaan lahan perkebunan besar-besaran mendorong pembukaan lahan hutan yang sebelumnya banyak dimanfaatkan sebagai lahan

pelepasliaran ternak. Pola yang sama demikian itulah yang relatif juga terjadi pada periode setelah reformasi menggelinding.

Jika kita bisa dipetakan, maka secara garis besar kebijakan pengelolaan pangan protein hewani berupa daging dapat disederhanakan sebagai berikut:

Gambar 1  
Bagan Regulasi terkait Pengelolaan Pangan Daging di Indonesia



Sementara itu, inventarisasi awal atas regulasi terkait pengelolaan pangan daging di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1  
Matriks Inventarisasi Regulasi Langsung dan Tidak Langsung terkait Pangan Protein Hewani

Bentuk Regulasi	Tentang	Nomor	Th	Status	Sifat
Undang-undang	Pangan	7	1996	Sudah Diperbaharui	pangan
	Pangan	18	2012	Aktif	pangan
	Peternakan dan Kesehatan Hewan.	41	2014	Aktif	pangan
	Pemerintahan Daerah	22	1999	Sudah Diperbaharui	non pangan
	Pemerintahan Daerah	32	2004	Sudah Diperbaharui	non pangan
	Pemerintahan Daerah	23	2014	Aktif	non pangan

	Desa	6	2016	Aktif	non pangan
Peraturan Pemerintah	Ketahanan Pangan	68	2002	Aktif	pangan
	Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan	28	2004	Aktif	pangan
	Pemberdayaan Peternak	6	2013	Aktif	pangan
Peraturan Menteri	Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan	Perdagangan No: 59/M-DAG/PER/8 /2016	2016	Sudah diperbaharui	pangan
	Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.59/M-DAG/PER/8/2016 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan	Perdagangan No: 13/M-DAG/PER/2 /2017	2017	Aktif	pangan
	tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi Dan Kerbau Bunting	Pertanian No: 48	2016	Aktif	pangan
	Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik.	Pertanian No: 49	2016	Aktif	pangan

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2018

Karut marut mengenai upaya penyediaan sumber protein hewani secara nasional dapat dilihat dari isu korupsi terkait kebijakan penambahan jumlah kuota daging impor yang dalam beberapa tahun terakhir selalu menghiasi atmosfer politik nasional. (baca Noor, 2015; Ali, 2016). Kisruh tersebut menurut Pambagyo (2011) juga terjadi kerana ketersediaan daging sapi, baik impor maupun lokal, sangat terkait dengan ketahanan pangan nasional.

Daging sebagai sumber protein hewani saat ini- termasuk daging sapi dan kerbau- ketersediannya telah menjadi hal penting yang statusnya sama pentingnya dengan ketersediaan beras, gula, jagung, telur, unggas, kedelai dan sebagainya. Bila kebutuhan lain selain sembilan bahan pokok (sembako) masih dapat ditunda namun kebutuhan daging akan sangat sulit jika ditunda pemenuhannya terutama jika dikaitkan dengan kebutuhan budaya. Ketersediaan daging dan susu sebagai bahan pangan diakui atau tidak bukan merupakan bahan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga berhubungan dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perspektif sosial dan budaya. Lebih dari itu kebutuhan daging dan susu sebagai upaya untuk memenuhi konsumsi protein hewani sangat terkait dengan kesehatan dan kecerdasan bangsa. Sulit rasanya membayangkan suatu bangsa akan maju dan berdiri tangguh jika tidak memiliki pijakan yang kuat dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, termasuk pangan yang menjadi sumber unsur protein.

Sebagai negara yang besar dengan potensi sumberdaya alam dan manusia yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk bisa memenuhi kebutuhan daging sendiri, walaupun secara faktual fakta yang ada menyatakan sebaliknya. Inilah yang menjadikan isu ketersediaan daging akan menjadi paradoksial dalam beberapa waktu ke depan.

Seiring dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan, sistem beternak tradisional layaknya *uwer* atau bahwa sistem *Pureweren* di masyarakat Gayo telah mulai ditinggalkan. Indikasi tentang hal ini dapat dilihat dari volume pemeraktekan sistem peternakan ini yang mulai mengecil. Saat ini studi ini dilakukan tahun 2018, aktivitas *pureweren*- originil hanya dapat ditemukan di

dua satu kecamatan saja di Kabupaten Gayo Lues yaitu Kecamatan Rikit Gaib dan Terangun.

Satu hal lain juga mengindikasikan kurangnya perhatian pada sistem ternak kerbau model ini adalah program introdusir hewan ternak selain kerbau oleh pemerintah. Pada kasus di Aceh secara umum termasuk di Gayo Lues, hewan ternak yang menjadi komoditi program untuk diintrodusir dan diyakini bisa mengatasi kebutuhan protein adalah sapi Bali. Hadirnya Sapi Bali - diakui atau tidak telah ikut mendesak *uwer* atau sistem *Pureweren* ke arah yang tidak lagi dianggap bernilai ekonomis. Namun demikian kehadiran Sapi Bali jelas bukan satu-satunya penyebab *uwer* dan atau *pureweren* mulai ditinggalkan.

Pengembangan wilayah melalui kebijakan pemekaran daerah harus juga dilihat sebagai faktor yang ikut mengakslerasi *uwer* atau *pureweren* mulai ditinggalkan. Pada kasus di Kabupaten Gayo Lues, mulai sulitnya menemukan *uwer* atau mulai ditinggalkannya sistem *pureweren* juga bisa (?) dikarenakan privatisasi lahan yang semakin masif. Sebagai sebuah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues melalui pemerintahnya jelas memiliki daya upaya untuk mendorong peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai cara. Salah satu yang upaya yang belakangan ini begitu nyata terlihat adalah alih fungsi lahan yang terlebih dahulu melalui proses privatisasi lahan. Hal lain yang menjadi alasan pembahasan tentang sistem ternak kerbau di Gayo Lues menjadi penting dikarenakan secara kultural, kerbau adalah hewan yang tidak hanya memiliki arti sebagai sumber protein namun juga punya nilai sosial budaya. Untuk itu, bentuk upaya untuk tetap mempertahankan kerbau sebagai hewan ternak diantaranya adalah dengan melakukan pembaharuan sistem peternakannya. Kondisi ini terlihat jelas terlihat jelas dari sebuah reportase yang dipublikasi dalam sebuah koran lokal yang menyebutkan bahwa:

"Biasanya masyarakat memelihara kerbau dan sapi secara liar tetapi saat ini akan di ubah sistem kandang. Baik secara umum maupun secara peorangan. Kita berharap ada regulasi dari steak holder. Membuat satu kawasan peternakan yang permanen. Agar julukan daerah produksi kerbau di dataran tinggi Gayo Lues bisa di pertahankan" (Yudi, 2014).



Upaya mengubah sistem peternakan secara sosial bukanlah masalah yang mudah. Sepintas hal tersebut memang menguntungkan akan tetapi perubahan pada sistem peternakan ini gilirannya juga akan berakibat pada hilangnya pranata sosial pendukung sistem peternakan tradisonal. Pada kondisi tertentu bukan tidak mungkin akan bisa memunculkan disharmoni di masyarakat. Bila beberapa puluh tahun silam di hampir semua desa di dataran tinggi Gayo terdapat ditemukan *uwer* atau praktek sistem *Pureweren*, namun saat ini hanya tersisa di beberapa desa saja. Di Kabupaten Gayo Lues, konsentrasi *uwer* yang masih mempraktekkan sistem *Pureweren* ini sebagian besar bisa dijumpai di Kecamatan Terangun. Namun demikian, jumlah peternak dan hewan kerbau di Terangun juga sudah mulai berkurang.

Harian Aceh (2014) dalam sebuah repostasinya menjelaskan bahwa berkurangnya praktek tradisi beternak dan jumlah kerbau di daerah Terangun diyakini akibat banyak warga beralih mata pencaharian menjadi petani Nilam, Sere dan Jagung. Akibatnya Kecamatan Terangun yang sebelumnya dikenal sebagai kota peternakan kerbau, kini menjadi kota penghasil minyak nilam.

Gejala dimana sumberdaya lokal yang selama ini dikembangkan dengan berbasis pada pengetahuan lokal (etnosains) mulai mengalami gangguan seiring kebijakan Negara juga terjadi pada kasus *uwer*. Regulasi pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan Kerbau Gayo sebagai salah satu sumberdaya genetik ternak local Indonesia dengan Sk Nomor: 302/Kpts/Sr.120/5/2017 tanggal 14 Mei 2017. Kehadiran regulasi tersebut sepenuhnya belum direspon dengan regulasi local yang lebih praktis untuk melindungi keberadaan kerbau Gayo dan system peternakan yang secara berabad telah dipaktekan.

## Penutup

Merujuk pada narasi yang telah disampaikan di atas, maka beberapa ahal yang bisa disimpulkan dalam studi awal ini adalah:

1. Hadirnya regulasi kebijakan pangan yang secara langsung bertujuan meningkatkan kemampuan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan belum sepenuhnya menunjukkan hasil optimal. Salah satu penyebabnya adalah regulasi yang ditetapkan sering tidak berbasis pada identifikasi atas potensi lokal. Selama ini regulasi yang dibuat dalam mengatur pemenuhan kebutuhan daging sifatnya reaktif dan bukan solutif apalagi antisipatif. Selain itu, regulasi yang mengatur ketersediaan pangan protein hewani dikelola oleh banyak sektor sehingga ketidakmatangan koordinasi berpotensi mengakibatkan tujuan regulasi tidak tercapai.
2. Di tingkat implementasi regulasi, ada banyak regulasi pangan yang mengabaikan nilai ternak secara budaya sehingga kearifan lokal terkait penyediaan protein hewani di banyak tempat mulai menghilang atau bahkan ditinggalkan. Selain dianggap tidak cocok dengan semangat pembangunan, kehadiran sistem peternakan lokal juga kerap dianggap berefek negatif secara ekologi. Dengan demikian, potensi lokal di nusantara dalam menjamin kebutuhan pangan daging yang telah efektif ratusan tahun malah tidak mendapat tempat seiring dengan regulasi yang ada.
3. Secara historis, praktek peternakan dengan melepasliarkan hewan ternak dahulunya dapat dijumpai di sepanjang dataran tinggi bukit barisan di Sumatera termasuk di dataraan Tinggi Tapanuli dan Sumatera Barat. Seiring dengan pembukaan kawasan hutan sebagai lahan pemukiman, pertanian dan industri, praktek melepasliarkan ternak di hutan juga ikut mengalami degradasi. Praktek uwer yang dulunya juga berpola sama pada akhirnya juga mengalami modifikasi

dan saat ini eksistensinya hanya dapat dijumpai di beberapa kecamatan saja di Kabupaten Gayo Lues.

4. Regulasi pangan yang berupaya meningkatkan jumlah ternak pedaging yang dipraktekkan di dataran tinggi Gayo ternyata juga tidak sensitif budaya. Jenis ternak yang kerap diberikan sebagai bantuan pemerintah bukanlah kerbau yang notabenenya adalah hewan yang telah akrab ditenak melain sapi.
5. Otonomi daerah yang berorientasi pada diversifikasi sumber pendapatan daerah telah mendorong privatisasi lahan komunal sehingga areal lepas liar ternak semakin menyempit. Kondisi ini di Gayo Lues secara langsung berpotensi ikut menyebabkan degradasi nilai *uwer*.

Memperhatikan kondisi ini, maka pemerintah daerah termasuk Pemerintah Gayo Lues sebaiknya melakukan kajian mendalam guna mengidentifikasi kebutuhan lahan dan potensi lahan tersedia yang bisa mendukung sistem peternakan lokal untuk tetap dipertahakan. Keterbatasan waktu dan lain hal dalam melihat banyak aspek terutama aspek kenomis dari setiap versi *uwer* pada studi ini menyebabkan penjelasan atas setiap varian *uwer* yang juga masih sangat perlu dilakukan.

Urgensi lain dari perlunya kajian ini ditikembangkan adalah juga menyangkut fakta kultural bahwa kerbau merupakan hewan yang memiliki nilai sosial selain nilai ekonomi bagi masyarakat Gayo termasuk di Gayo Lues. Dengan mendorong setiap daerah untuk menjaga kearifan lokal terkait penyediaan protein hewan secara legal formal, maka upaya mengatasi permasalahan kebutuhan pangan berupa daging akan bisa di atasi dengan lebih tepat dan tetap berbasis pada kebudayaan lokal di nusantara.

### Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. 2016. *Kisruh Daging Sapi dan Permasalahannya*. Artikel dimuat di <https://www.posbali.id/kisruh-daging-sapi-dan-permasalahannya> pada 15 Juni 2016 diakses pada 1 Oktober 2018
- Harian Aceh. 2014. "Kerbau di Terangon Mulai Berkurang". Dipublikasi pada Kamis 9 Oktober dan dimuat pada laman <http://www.harianaceh.com>
- Malthus, Robert. 1978. *An Essay on the Principle of Population, An Essay on the Principle of Population, as it Affects the Future Improvement of Society with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers*. London: Printed for J. Johnson, in St. Paul's Church-Yard (<http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf>)
- Noor, Ronny Rachman. 2015. *Kisruh Daging Sapi*. Artikel dimuat di <https://www.kompasiana.com> pada 11 Agustus pukul 07:29 Wib diakses pada 1 Oktober 2018
- Pambago, Agus. 2011. *Politik Ketahanan Pangan vs Sapi Australia*. Jurnal Medan, 17 Juni.
- Reily. Michael. 2018. *Indonesia Diprediksi Masih Kurang Pasokan Daging Sapi Tahun Ini*. Artikel dimuat pada situs [katadata.co.id](http://katadata.co.id). pada tanggal 19 Februari diakses pada 12 Maret 2018.
- Suryana, Ahmad. 2007. *Dukungan Teknologi Penyediaan Produk Pangan Peternakan Bermutu, Aman Dan Halal*. Artikel Ilmiah disampaikan pada Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia XXVII dengan tema Dukungan Teknologi untuk Meningkatkan Produk Pangan Hewani dalam Rangka Pemenuhan Gizi Masyarakat, tanggal 21 Nopember di Gedung Auditorium II, Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Bogor. juga dipublikasi pada [www.litbang.pertanian.go.id/special/HPS/dukungan\\_tek\\_peternakan.pdf](http://www.litbang.pertanian.go.id/special/HPS/dukungan_tek_peternakan.pdf)
- Tujan, Antonio (Ed.). 2007. *Modul tentang Ketahanan Pangan: Panduan Pelatihan untuk Kedaulatan Pangan*. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). Indonesia
- Yudi, Bambang. 2014. *Ternak Bantuan Jangan Dijual*. Artikel dimuat pada laman <http://www.insetgalus.com> pada tanggal 10 Desember diakses pada 28 Desember 2014